

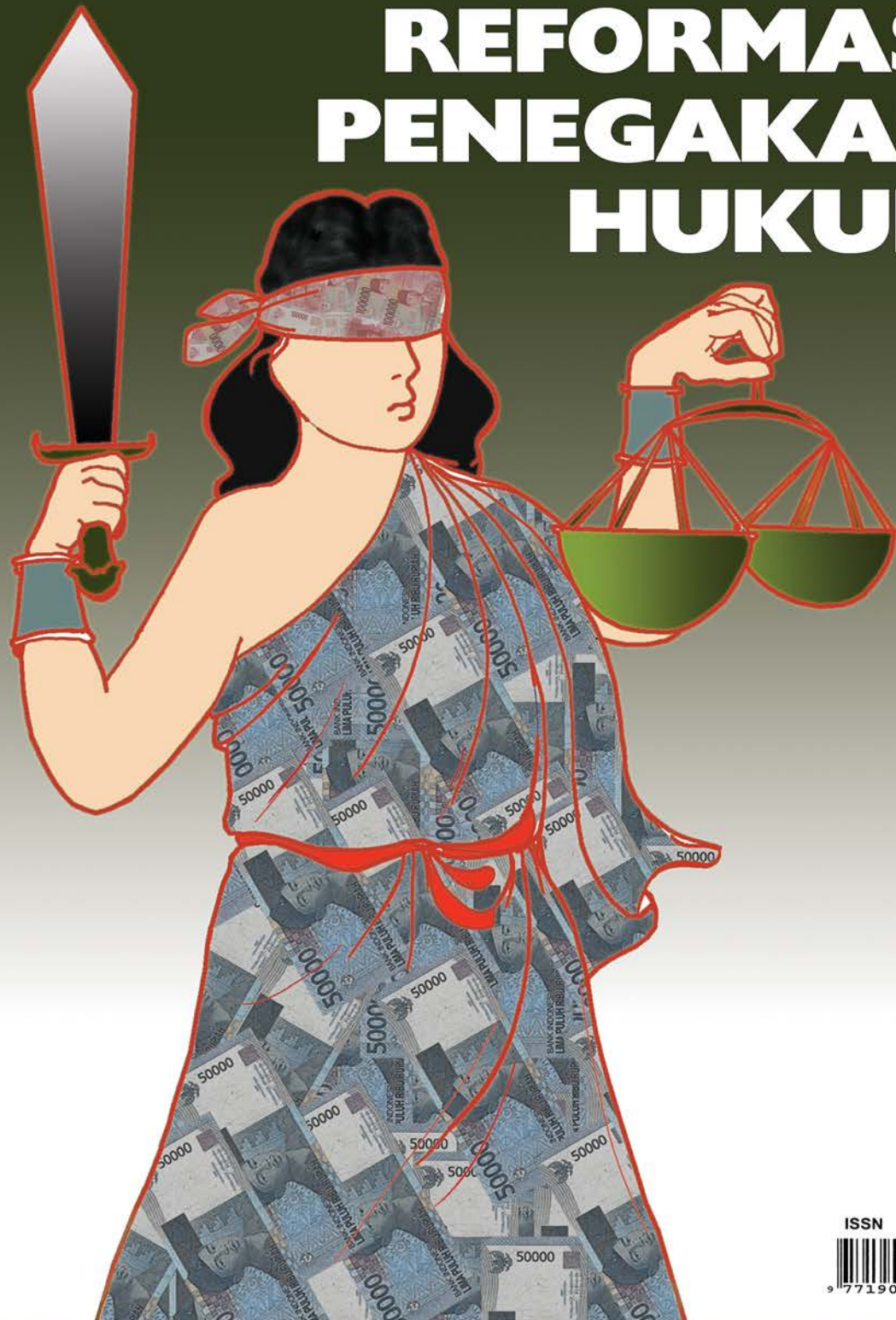
AL-ZAYTUN-DITJEN PLS LAKUKAN PELATIHAN SERTIFIKASI ICDL

BERITAINDONESIA®

EDISI 37 TAHUN II ★ 27 APRIL - 10 MEI 2007

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

REFORMASI PENEGAKAN HUKUM



ISSN 1907-977X



9 771907 977085

Beras Basmati Al-Zaytun

Introduksi India

Beras Basmati adalah dari bangsa padi asal India dan Pakistan. Basmati dalam bahasa Urdu/Hindi berarti harum dan wangi, bentuk bulirnya panjang .

Beras Basmati yang harum terkenal di seluruh dunia, banyak orang ingin menanamnya. Harganya pun menawan tinggi. Kini di Indonesia telah dibudidayakan, produksinya sangat baik. Tepatnya di Al-Zaytun, sejak tahun 2005 telah ditanam ratusan hektar, produksinya cukup memuaskan.

Beras Basmati produk Al-Zaytun memiliki panjang tidak kurang dari 7 mm dengan tampilan putih bersinar.

Indonesia mengimport banyak Beras Basmati dari India dan Pakistan untuk memenuhi konsumen penggemarnya.

Beras Basmati produk Al-Zaytun diharapkan dapat mengimbangi import yang telah berjalan.

Bagi penggemar Nasi Briyani, Nasi Kabuli dll, kiranya tidak lagi bergantung Beras Basmati import, Al-Zaytun siap memasok.

Tentunya harga pasti bersaing, termasuk citarasanya.

Bumi Indonesia memberi citarasa Beras Basmati yang spesifik. Silahkan mencoba Beras Basmati produk Al-Zaytun.

Syukria.

Nutrition Highlights *)

Basmati rice, 1 cup (200g) (cooked)

Calories : 205

Protein : 4.2g

Carbohydrate : 44.5g

Total Fat : 0.44g

Fiber : 0.63g

***Good source of :**

Iron : 1.9mg

Selenium : 11.8mcg

Thiamine : 0.26mg

Niacin : 2.3mg

*) Sumber : The TruSTAR Health Encyclopedia



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 37/Th.IV/ 27 April - 10 Mei 2007

DARI REDAKSI	4
SURAT KOMENTAR	5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA	7
BERITA TERDEPAN	12
VISI BERITA	13

BERITA UTAMA

REFORMASI PENEGAKAN HUKUM

Sistem penegakan hukum sudah bagus, tetapi belum lengkap. Tidak ada sanksi hukum bagi petinggi negara, khususnya Presiden dan Menteri, jika tidak melaporkan atau menyembunyikan kekayaannya. Sebaik apa pun sebuah sistem akan lumpuh di tangan penguasa dan aparat penegak hukum yang korup. Karena hukum ada dalam genggaman mereka. Hanya sapu yang bersih yang bisa membersihkan lantai yang kotor. 14



"Sekali-sekali Gantung Dulu Koruptor Itu"	15
Dua Gajah Berebut Hutan	16
Memelototi Kerja Jaksa dan Polisi	17
Virus Korupsi di Akar Hukum	18
Kolusi di Antara Aparat Hukum	19
Penegakan Hukum Tebang Pilih	21
Banyak Kendala Membeli KPK	23
Perlu Pembuktian Terbalik	25
Reformasi Proses Hukum di Kepolisian	26

BERITA KHAS

Praharu di IPDN Pasca Kematian Cliff	28
--	----

BERITA NEWSMAKER

Inu Kencana	31
-------------------	----

BERITA NASIONAL

Suara dari Yogya	32
------------------------	----

BERITA POLITIK

Isu Reshuffle di Kebun Durian	33
-------------------------------------	----

BERITA EKONOMI

Harapan Semakin Tipis	40
Buah Simalakama Bubble Economy	41
Pembentukan Pasar Tunggal	42



BERITA DAERAH

DPRD Kabupaten Malinau Prioritaskan	43
Geliat Jawa Barat	44
Tiga Kapolres di Jajaran	46
Perangi terus Kematian dan Kemaksyatan	46

LINTAS MEDIA

Misteri Ongen Dalam Kasus Munir	47
---------------------------------------	----

BERITA Hiburan

Spider-Man Berubah Hitam	48
--------------------------------	----



BERITA HANKAM

Kopassus Terus Berlatih dan Belajar	50
---	----



Dharma Pertiwi Peduli Sosial	51
Sosialisasi Gratifikasi di Mabes TNI	51

BERITA TOKOH

Muladi	52
--------------	----

BERITA HUKUM

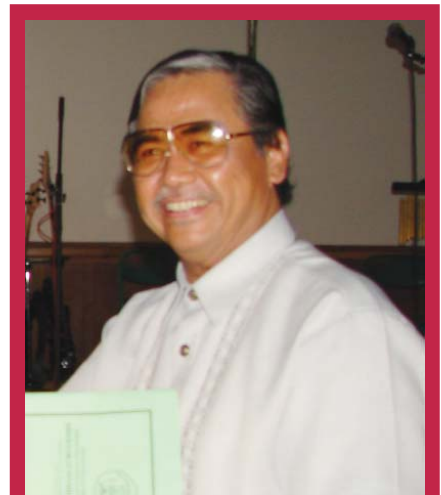
Keluarga Ikut Terseret	53
Menyoal Surat Pemulus Jalan	54
Menunggu Nyanyian Baru	55

BERITA MANCANEGERA

Senin Berdarah di VTU	56
Tujuh Penembakan Paling Berdarah	56
Otoritas Moral Bank Dunia Terguncang	58

BERITA IPTEK

Satu Ponsel Dua Nomor	59
-----------------------------	----



LENTERA

AL-ZAYTUN-DITJEN PLS LAKUKAN PELATIHAN SERTIFIKASI ICDL

DIKUTI PEGAWAI UPT DITJEN PLS SE-INDONESIA

Kerjasama yang sinergis antara Al-Zaytun dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), semakin erat saja. 34

BERITA HUMANIORA

Menjemput Maut atau	60
---------------------------	----



BERITA PUBLIK

Bangun Prasarana, Optimumkan Pelayanan	62
Tantangan dan Peluang	63

BERITA OLAHRAGA

Semifinal Piala Champion "Dirajai" Inggris	64
--	----



AC Milan Diharapkan	64
Pelatan SEA Games Mulai	65
Munas PSSI Rawan Politik Uang	65

BERITA KESEHATAN

Asap Untuk Nyamuk-Nyamuk Nakal	66
--------------------------------------	----

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Syahbuddin Hamzah (Redaktur Eksekutif)
Mangatur Lorieclide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Haposan Tampubolon
Henry Maruwas

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwani Triatmo
Sarjiman
Doan Adikara Pudan
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorieclide Paniroy

Desainer:
ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Purwakarta: Bernard Sihite,
Tarakan: Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publisitas Indoaprint

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Kuangan dan Umum:
Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X



foto: dok

MYR Agung Sidayu (kedua dari kanan), pimpinan ICDL Licensee untuk Indonesia, mewakili Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) foto bersama dengan Ace Suryadi dan Bambang Sudibyo (kedua dan ketiga dari kiri).

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca yang kami muliakan,

Sungguh miris rasanya mengetahui kampus pendidik para pamong praja di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat sarat dengan tradisi buruk aksi brutalisme para senior terhadap junior. Entah apa sesungguhnya yang terjadi di sana, para junior seolah *nrimo* saja diperlakukan kasar, dan seniornya merasa pula seperti tak bersalah melakukan penyalahgunaan. Demikian pula para pemangku kepentingan seolah tak sadar telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tabir gelap di Kampus IPDN Jatinangor memperoleh porsi pemberitaan cukup banyak kali ini, kami tuangkan dalam rubrik *Berita Khas*, *Newsmaker*, *Lintas Tajuk*.

Para Pembaca yang kami hargai,

Reformasi aparat penegak hukum mutlak dilakukan secara mendasar apabila negeri ini ingin selamat mencapai garis akhir kemakmuran sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

Duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla masih memiliki sedikit sisa waktu untuk melakukan reformasi aparat penegak hukum. Reformasi penegakan hukum harus dilakukan terhadap sistem dan aparatnya. Pemerintahan mereka diharapkan mewariskan aparat hukum yang steril dari godaan korupsi (*Berita Utama*).

Kami juga menyoroti posisi Al-Zaytun selaku lembaga pendidikan terpadu yang modern bersetting global semakin memperoleh tempat di hati masyarakat. Bahkan, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Depdiknas, menempatkan Kampus ini sebagai mitra sejajar dalam memajukan pendidikan nonformal (*Lentera*).

Sidang Pembaca yang kami banggakan,

Banyak berita menarik yang ingin kami hantarkan kali ini. Tapi ada baiknya langsung saja dilanjutkan ke halaman demi halaman berikutnya. Semoga semua sajian kami bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke:

Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:
• http : www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
• email : redaksi@berindo.com
• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
Telp. (021) 70930474, 82931113
(021) 83701736
Fax. (021) 82931113, 9101871

Mahasiswa IPDN Keenakan

Saya adalah alumni Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta yang baru saja diwisuda pada bulan Maret 2007. Melihat dan mendengar peristiwa di STPDN dan kemudian menjadi IPDN Jatinagor, saya menjadi prihatin berikut geram. Fasilitas yang diterima oleh mahasiswa IPDN sangat berlebihan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Padahal mahasiswa Universitas Negeri lainnya tidak pernah mendapatkan separuh saja dari fasilitas seperti yang mereka terima. Begitu mereka diterima

sebagai mahasiswa di IPDN otomatis mereka sudah menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), mereka mendapatkan gaji. Bukankah mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri lainnya ini punya level yang sama tapi diperlakukan sangat berbeda. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri lainnya seperti dianaktirikan. Sangat tidak adil. Sistem asrama pada IPDN jelas-jelas memberikan kesempatan bagi para senior untuk menjemput juniornya di luar jam pengasuhan praja, kemudian menunjukkan sifat diktator dan barbar para senior kepada juniornya. Seharusnya sistem asrama dihapuskan sehingga tidak menimbulkan kejadian seperti yang dialami Cliff Muntu. Seragam tetap diberikan, tapi tanpa pangkat dan topi. Karena pangkat dan topi yang mereka kenakan sekarang membuat mereka merasa sedang melakukan pendidikan militer, padahal mereka jelas-jelas akan menjadi PNS alias Pegawai Negeri Sipil. Apa yang diharapkan oleh Negara dari mereka? Tentu jiwa sipil mereka.

Any Restiana

anyasagara@yahoo.com

Suka Membaca Berita Indonesia

Saya sangat tertarik membaca berita yang disajikan oleh Majalah Berita Indonesia. Sayangnya saya tidak bisa mendapatkannya secara rutin. Apa saya bisa menjadi wartawan sekaligus agen bagi media ini? Saya lulusan Komunikasi Jurnalistik. Trims.

Eris Risman

erisman77@yahoo.com

Trotoar di Jakarta

Trotoar di Jakarta sebagai tempat pejalan kaki sudah berubah fungsi menjadi tempat berjualan, pangkalan ojek dan bahkan tempat jalur sepeda motor. Hal ini terjadi di banyak jalan trotoar di Jakarta dimana semua orang dengan mudah melihatnya termasuk Pemprov DKI, namun tidak ada upaya penertiban.

Fungsi trotoar yang hilang menyebabkan orang tidak ada pilihan kecuali memiliki kendaraan bermotor yang dampaknya kemacetan, polusi udara dan beragamnya kriminalitas di jalanan.

Asep S

stv_jaya@yahoo.com

BUNG WARTO

MENURUTMU
SIAPA PALING LAYAK
JADI LURAH
TAHUN
DEPAN...

MASIH AKU
OPO BUNE?



AKU PILIH
YANG BARU-BARU
SAJA, PAK.
YANG TEGAS
BERANI, CEPAT
SELAMATKAN
PERUT



DEADY/07

Uang Rakyat Dipakai Menjagal Siswa

Yang saya tidak setuju dengan IPDN adalah fasilitas negara dan uang pajak yang digunakan untuk membiayai aktivitas mereka. Kalau mereka mau evaluasi, sudahkah mereka menghitung cost and benefit? Setiap rupiah yang dikeluarkan, berapa besar manfaatnya? Apa indikator keberhasilan mereka? Kalau mereka tidak bisa, mereka bisa undang pihak ketiga untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Buktikan dengan data bahwa uang negara yang dikeluarkan punya manfaat yang strategis dibanding bila digunakan untuk sektor lain. Kalau IPDN ingin dipertahankan, mereka harus mandiri seperti kam-

pus-kampus negeri lainnya. Pembayar pajak yang sedih karena uangnya dipakai menjagal siswa.

I Made Anom Wiranata
anomwiranata@yahoo.co.id

IPDN Dibubarkan Solusi Terbaik

Menanggapi kematian praja Cliff Muntu di IPDN, kita semua merasa prihatin dengan pembelaan oleh penanggung jawab institusi yakni rektor maupun Sekjen Depdagri. Bahkan rektor pernah berkomentar pola pengasuhan yang diterapkan adalah untuk membentuk "nation & character building", sehingga perlu dipertahankan. Kalau kita kaitkan antara pembentukan karakter dan pengasuhan seperti

itu merupakan program sengaja atau tidak, jelas sama sekali kurang benar. Pengasuhan biasanya diterapkan untuk anak balita/prasekolah, pendidikan untuk usia sekolah (SD s/d SMA) dan pengajaran untuk periode setelah itu. Dengan demikian pola pengasuhan pada IPDN dengan kekerasan jelas merupakan program semacam cuci otak untuk mendapatkan karakter yang diinginkan yaitu kekerasan, layaknya balita yang masih polos yang diisi dengan pola hidup yang penuh dengan kekerasan, pembalasan dendam dan lainnya. Buktinya? Setelah kasus Wahyu Hidayat, kasus yang sama terulang kembali. Oleh sebab itu saya mengusulkan agar kalau perlu

dilakukan evaluasi psikologis ulang terhadap efek "character building" di IPDN terhadap para alumnus IPDN. Pembubaran IPDN memang solusi yang paling baik, selain karena pembentukan institusi tersebut menyalahi UU juga pendidikan tinggi sudah banyak menyebar di seluruh Wilayah Indonesia.

Sigit Tedjokumoro
sigit.tedjokumoro@yahoo.co.id

Pembinaan PSSI Tidak Becus

Tanggal 19 April 2007 Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Munas PSSI di Makassar. Dalam sambutannya Wapres mempertanyakan "Ada apa dengan sepak bola Indonesia?" Hal ini juga pasti sering menjadi pertanyaan dalam benak banyak orang. Wapres membandingkan Indonesia dengan negara kecil seperti Togo dan Pantai Gading yang bisa berprestasi dalam bidang sepak bola, kenapa Indonesia tidak bisa? Ada apa dengan sepak bola Indonesia? Menurut saya JK sebagai orang nomor 2 di Republik ini tidak perlu mempertanyakan hal seperti ini. Beliau pasti sudah tahu kalau hal tersebut disebabkan oleh kepengurusan dan pembinaan yang tidak becus.

Ilham
lcky_kml@yahoo.com

Transjakarta Seenaknya Sendiri

Atas nama pengguna jalan umum yang taat membayar pajak, saya sampaikan kepada bus Transjakarta agar tidak besar kepala, karena diberi jalur khusus, lantas bablas saja tidak berhati-hati. Padahal banyak kecelakaan yang melibatkan bus tersebut, namun pihak Transjakarta malah menyalahkan pengguna jalan lain yang melintas di lintasan bus itu. Transjakarta sendiri kan belum bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Jadi tolong jangan arogan begitu lah.

Lucyana
univjaya@centrin.net.id

PASTIKAN

TARIF IKLAN

BERITAINDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kuping (kanan & kiri)
minimal lima kali pemuatan
@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736

Fax.(021) 8293113, 9101871

12/04/2007

Perampokan Berdarah di Bandung

Kawanan penjahat bersenjata api merampok Toko Emas ABC di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung sekitar pukul 18.30 WIB. Sebanyak 10 orang tertembak, termasuk empat polisi, setelah kawanan penjahat itu melepaskan tembakan membabi buta terhadap orang-orang yang ada di sekitar toko itu. Dua orang tewas tertembak, satu di antaranya adalah pemilik toko, Tongky, dan M Taufik Iskandar, warga Siti Munigar Gg Kacih Tengah, yang kebetulan bersama istrinya sedang masuk ke dalam toko. Para perampok berhasil menggondol 8 kilogram emas. Sejumlah saksi mata mengungkapkan, di antara keramaian itu tiba-tiba terdengar suara letusan seperti petasan. Di dalam toko ada yang berteriak, "Kosongkan." Seseorang tiba-tiba menaiki etalase toko dan mengacungkan pistol serta tanpa basa-basi menembak Tongky. Setelah itu, muncul dua perampok lainnya menembakkan senjata laras panjang di tangannya. Yang ditembak pun orang-orang sekitar di luar toko yang sedang melakukan aktivitas jual beli atau sedang berjalan-jalan. Sejumlah polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Astana Anyar yang tiba di lokasi kejadian pun tak luput dari aksi brutal para penjahat itu. Melihat empat petugas roboh, keenam perampok

tersebut kabur dengan motornya masing-masing.

13/04/2007

PGN-Telkom Kerja Sama

Manajemen PT Perusahaan Gas Negara dan PT Telekomunikasi Indonesia mengikat perjanjian kerja sama pemanfaatan jaringan serat optik. Naskah kerja sama ditandatangani Direktur Utama PGN Sutikno dan Direktur Network Solution Telkom I Nyoman G Wiryanata, di sela-sela kegiatan Forum BUMN 2007 di Jakarta. PGN dan Telkom sepakat bekerja sama membuat konsep bisnis yang saling menguntungkan dalam bidang pemanfaatan jaringan serat optik. Proses kerja sama akan berlanjut dengan melakukan riset teknis untuk mengetahui kelayakan konsepnya. Bagi PGN, kerja sama ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan jaringan serat optik yang terpasang pada jaringan pipa gas bumi. Selama ini jaringan serat optik itu hanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi bagi pemeliharaan jaringan pipa gas. PGN memiliki jaringan serat optik yang terletak di sepanjang Grissik, Sumatera Selatan, sampai perbatasan Singapura. Selama ini, PGN juga sedang membangun jaringan serat optik dari Grissik sampai Cilegon, Jawa Barat. Selanjutnya, PGN akan mengalihkan dan menunjuk anak perusahaannya di bidang

telekomunikasi untuk mengelola jaringan serat optik tersebut. Saat ini Telkom berusaha meningkatkan kapasitas serat optiknya. Tambahan kapasitas serat optik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi, baik untuk produk telepon tetap, Flexi, Speedy, maupun 3G.

14/04/2007

LSM Tukang Kliping

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat seharusnya dapat dikontrol karena mereka memakai dana masyarakat atau dana dari lembaga donor. Bahkan ironisnya, ada LSM yang kerjanya hanya mengumpulkan kliping koran dan itu yang mereka laporkan sebagai hasil kerja ke lembaga donor. Demikian mengemuka dalam seminar bertema "Perlunya Mengaudit Agenda dan Sumber Dana Asing terhadap LSM yang Merugikan Rakyat, Bangsa, dan Negara" di Jakarta. Pembantu Rektor I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Makruf mengatakan, kontrol juga diperlukan karena seperti halnya pemerintah, tidak semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Jamhari, LSM di negara maju relatif mudah dikontrol oleh pemerintah setempat karena mereka mendapatkan dana dari pemerintah. Namun, hal ini sulit terjadi di Indonesia karena hampir semua

Karikatur Berita

LSM-nya mendapatkan dana dari luar negeri. Praktisi hukum Elza Syarif menyatakan, kontrol terhadap LSM Indonesia, yang terjadi selama ini, hanya dalam bentuk pelaporan yang mereka buat ke lembaga donor. Jarang sekali ada LSM yang juga melaporkan kegiatannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran atau rekan kerja mereka. "Ironisnya, sekarang ada LSM yang kerjanya hanya mengumpulkan klipring koran dan itu yang mereka laporkan sebagai hasil kerja ke donor," tutur dia.

15/04/2007

Mbah Maridjan 'Masuk' Golkar

Tidak seperti umumnya pertemuan politik, penutupan acara Rapat Konsultasi Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Yogyakarta, justru dilakukan dengan menghadirkan juru kunci Gunung Merapi, R Ngabei Surakso Hargo atau dikenal dengan nama Mbah Maridjan. Kehadiran Mbah Maridjan sempat membuat pengurus DPD Partai Golkar se-Indonesia terkejut. Mbah Maridjan hadir dalam acara penutupan bukan karena ia telah masuk ke partai berlambang pohon beringin tersebut, namun atas undangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla serta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kalla mengatakan, walaupun sudah puluhan tahun, sejak tahun 1974 mengabdikan diri menjaga Merapi, pria berumur 80 tahun tersebut masih tetap setia menjalankan tugasnya. Berangkat dari situlah, kata Kalla, kader Golkar patut "berkaca" pada pria berusia 80 tahun itu. Karena dengan nilai-nilai itulah, Mbah Maridjan telah

menyelamatkan bangsa ini. Sementara mbah Maridjan sendiri, dalam sambutan penutupannya, dengan rendah hati mengatakan selama ini bisa terus mengabdikan karena kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat kuasa itulah, katanya, amanah yang dilimpahkan padanya untuk menjaga keselamatan masyarakat di sekitar Merapi.

Ultah Ke-80 Paus Benediktus XVI

Puluhan ribu warga Katolik Roma, Minggu (15/4) pagi di Lapangan Santo Petrus, merayakan ulang tahun ke-80 Paus Benediktus XVI. Paus tampak sehat dan berseri-seri hadir di tengah-tengah mereka. Berkali-kali ia menerima karangan bunga dan sapaan hangat umat. "Terima kasih, terima kasih atas sambutan hangat ini," kata Paus sambil menyalami umat. Perayaan ulang tahun itu digelar sehari lebih awal dari hari jadi pemimpin semiliar umat Katolik Roma sedunia itu. Puluhan kardinal dan pastor membaur dengan umat yang sebagian memakai pakaian tradisional Bavaria dengan membawa bendera Jerman. Mereka mengucapkan doa syukur bersama atas karunia umur panjang dan kesehatan Paus. Paus yang memiliki nama asli Joseph Ratzinger itu lahir 16 April 1927 di Markti Am Inn, sebuah desa di tepi sungai kota Bavaria di perbatasan Jerman-Austria. Sejak menjadi Paus dua tahun lalu, ia berusaha memulihkan hubungan antarumat beragama, terutama sesama pengikut Kristus. Di Berlin, Jerman, perayaan ulang tahun Paus dipusatkan di Katedral St Hedwig, yang dihadiri Kanselir Jerman Angela Merkel.

"Dari hati yang dalam saya mengucapkan selamat atas hari jadi Paduka," ucapnya. "Gagasan-gagasan yang Paduka sampaikan telah ikut meneguhkan kerja dan karya saya," kata pemimpin Jerman penganut Kristen Protestan yang taat itu.

16/04/2007

Hamid Dikecam Lagi

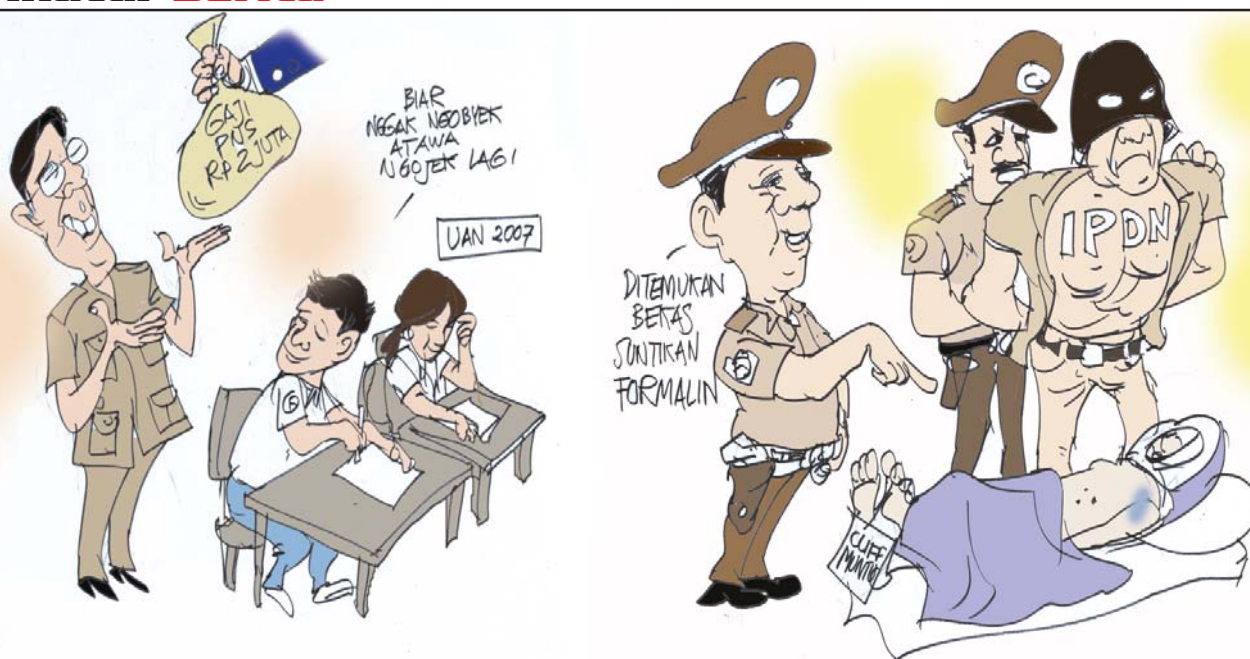
Penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dijadikan background dalam iklan UU Kewarganegaraan yang dilakoni Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mendapat kecaman di DPR. Beberapa pihak menilai Hamid tidak mengerti hukum dan sudah melakukan pelecehan. Sebab, dalam aturannya, lagu Indonesia Raya memang tidak boleh dijadikan sebagai reklame dalam bentuk apa pun. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Meski PP ini hampir berumur 50 tahun, namun PP ini masih berlaku hingga sekarang. Karena itu, iklan tersebut bisa jadi melanggar aturan ini. Iklan ini telah dipublikasikan oleh sejumlah televisi. Anggota DPR Alvin Lie meminta Hamid Awaludin mempertanggungjawabkan iklan UU Kewarganegaraan yang memakai lagu Kebangsaan itu. "Saya menyambut baik UU Kewarganegaraan. Tapi, jangan sampai pariwara menyalahi aturan hukum yang ada," kata Alvin.

17/04/2007

2009, Gaji PNS Terkecil Rp 2 Juta

Mulai tahun 2009, pendapatan bersih pegawai negeri sipil atau PNS golongan

Karikatur Berita



terendah ditargetkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Syahril Loetan mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (17/4). Menurut Syahril, kenaikan pendapatan bersih PNS itu dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki sistem penggajian, menghapuskan potensi korupsi di birokrasi, serta memperbaiki pelayanan publik. Kenaikan pendapatan bersih PNS tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009. Pada tahun 2006 pemerintah dan DPR menetapkan pendapatan bersih PNS golongan terendah sebesar Rp 1 juta per bulan. Kemudian, tahun 2007 ditetapkan Rp 1,5 juta per bulan. Pendapatan bersih adalah seluruh penerimaan yang dibawa ke rumah. Selain itu, gaji pokok PNS telah dinaikkan 10 persen pada tahun 2006 dan 15 persen pada tahun 2007. Adapun untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer, pemerintah memprogramkan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, rata-rata 50.000 orang per tahun.

18/04/2007

Saritem Resmi Ditutup

Lokalisasi Saritem di Bandung, Jawa Barat, akhirnya ditutup. Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Bangunan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan serta aparat TNI dan Polri melakukan penyegelan. Me-

reka memantek pintu-pintu dengan kayu dan paku, serta menempelkan stiker putih bertuliskan 'SEGEL' berwarna merah. Penyegelan berlangsung lancar karena penghuni Saritem sudah pada pulang kampung. Hanya ada protes kecil dari beberapa warga lantaran ada beberapa petugas yang 'salah alamat' menyegel rumah warga. Penyegelan dilakukan karena lokalisasi ini dianggap melanggar pasal 49 ayat 1 Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005. Mengenai nasib warga Saritem ke depan, Kepala Satpol PP Bandung Priyana Wirasaputra mengatakan hal itu akan dibahas oleh dinas terkait, terutama Dinas Sosial.

19/04/2007

Hussein Umar Telah Tiada

Ulama dan pejuang Islam Indonesia, Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Hussein Umar meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta dan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta. Almarhum meninggal pada usia 67 tahun akibat sakit jantung dan gangguan pernapasan. Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak di antara para pelayat di kediaman almarhum di Jalan Manggis, Kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat. Jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak setelah disemayamkan di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Ketua DDII KH Cholil Ridwan mengatakan, almarhum merupakan senior yang sangat istikamah dalam memperjuangkan Islam. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Din Syamsuddin sekuat tenaga ke DDII mengatakan, kepergian almarhum merupakan kehilangan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

BPK Rilis SPKN

Untuk meningkatkan pengelolaan uang milik rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Peraturan itu merupakan peraturan pertama yang dikeluarkan BPK sejak didirikan 60 tahun yang lalu. SPKN tersebut setara dengan peraturan pemerintah, sehingga mengikat dalam pemeriksaan serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. "SPKN merupakan pelengkap untuk memperkuat standarisasi pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara," kata Ketua BPK Anwar Nasution saat meluncurkan SPKN di kantornya. Standar pertama yang dikeluarkan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui PP No 24/2005. Peraturan tersebut berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilakukan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara itu tak hanya meliputi APBN dan APBD. Tapi juga mencakup BUMN, BUMD, maupun lembaga swasta yang menerima subsidi ataupun aliran dana dari negara. Selain sebagai patokan pemeriksaan auditor BPK, SPKN juga dipergunakan akuntan publik atau pihak lain yang mengaudit keuangan negara. "Diharapkan mulai 2008, BPK mengikutsertakan kantor



akuntan publik untuk memeriksa keuangan sektor publik." SPKN memuat tujuh Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). Yaitu, standar umum; pelaksanaan pemeriksaan keuangan; pelaporan pemeriksaan keuangan; dan standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Lalu, standar pelaporan pemeriksaan kinerja; pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

20/04/2007

Neloe Jadi Tersangka Lagi

Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri ECW Neloe kembali ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi oleh penyidik Kejaksaan Agung. Bersama Neloe, mantan Direktur Risk Management I Wayan Pugeg dan mantan EVP Coordinator Corporate & Government M Sholeh Tasrip, juga ditetapkan sebagai tersangka. "Mereka ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dalam pengambilalihan aset PT Kiani Kertas yang diduga merugikan negara Rp 1,8 triliun," kata Direktur Penyidikan Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Muhammad Salim. Sebelumnya, ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasrip pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan korupsi pemberian kredit PT Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara yang merugikan negara 18,5 juta dollar AS atau Rp 160 miliar. Majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Gatot Suharnoto memvonis bebas pada 20 Februari 2006. Atas putusan itu, tim

jaksa yang diketuai Baringin Sianturi mengajukan kasasi. Hingga kini Mahkamah Agung belum menjatuhkan putusan atas kasasi perkara tersebut.

21/04/2007

Demo 9.000 Karyawan Freeport Berakhir

Demo ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlangsung sejak Rabu (17/4) berakhir dengan damai (21/4) setelah PT FI memenuhi tuntutan mereka yang diberi nama Resolusi Tongoi Papua. Kedua belah pihak sepakat bahwa kisaran gaji terendah yang bakal dinegosiasikan dalam perundingan pembaruan perjanjian kerja bersama berkisar Rp 3,1 juta hingga Rp 3,6 juta. Ketua Umum Tongoi Papua (organisasi para karyawan PT Freeport Indonesia/FI asli Papua) Frans Pigome menyatakan, dengan kesepakatan itu, pihaknya mengakhiri mogok kerja dan mulai bekerja normal Minggu malam. Sebelumnya, Jumat (20/4) manajemen PT FI dan Tongoi Papua sudah menyepakati pembentukan departemen khusus untuk mengurus masalah karyawan asal Papua yang diusulkan Tongoi Papua. Departemen khusus itu diberi nama Papuan Affair Development. Perundingan maraton itu juga menyepakati pembenahan manajemen PT FI. Pembenahan itu termasuk penggantian anggota staf manajemen yang terbukti merugikan karyawan atau PT FI.

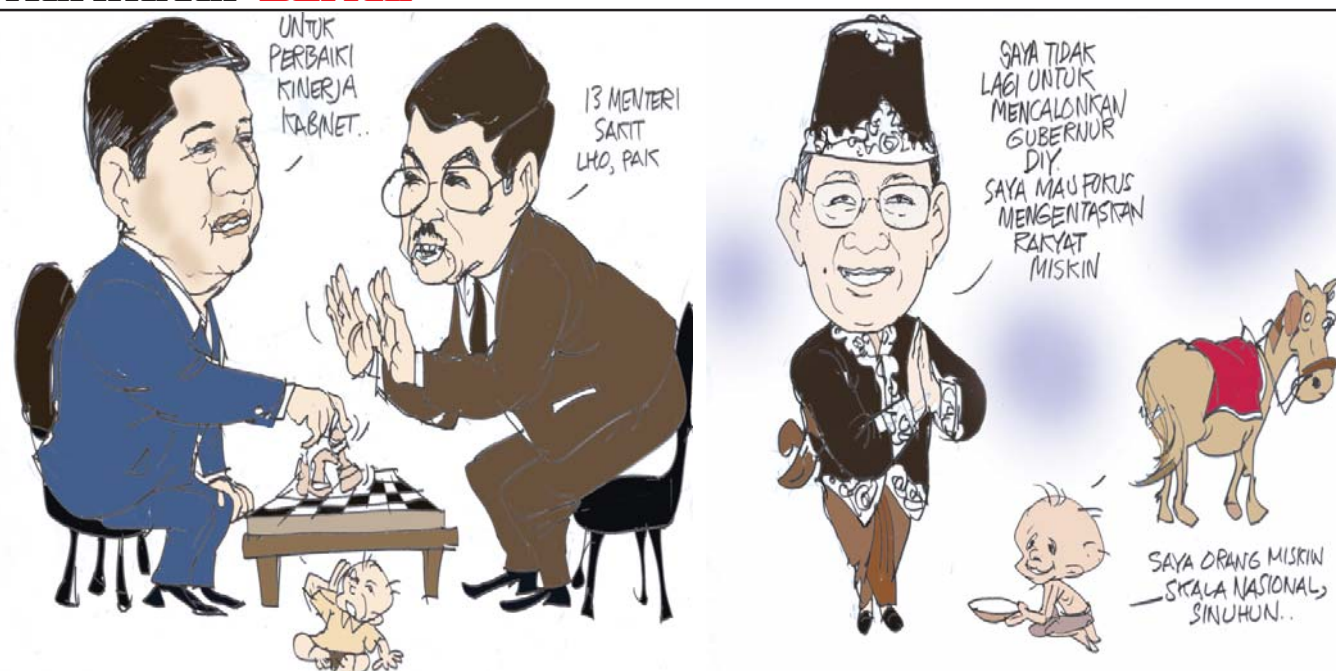
22/04/2007

Korban Lapindo Masih Berunjuk Rasa

Seminggu telah berlalu sejak kedatangan korban lumpur Lapindo ke Jakarta (16/4). Sekitar seratusan warga Perumahan

Tanggulain Anggun Sejahtera 1 (Perumtas 1) mengaku akan tetap melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara hingga tuntutan mereka menerima pembayaran secara cash and carry dipenuhi. Dalam skema pembayaran 20-80, untuk membantu proses pencairan ganti rugi tahap pertama sebesar 20 persen, pemerintah akan mengusahakan supaya sertifikat tanah milik warga Perumtas 1 itu tidak perlu ditebus dari bank. Sertifikat di bank baru diambil setelah pencairan kedua 80 persen dan menjadi milik Lapindo Brantas Inc. Biaya pengambilan sertifikat dipotong dari dana yang diberikan Lapindo. Namun skema pembayaran ini dinilai warga Perumtas 1 tidak cocok bagi mereka. Masalahnya, warga masih menunggak utang cicilan rumah di bank. Jika dijumlahkan, uang ganti rugi itu tidak senilai dengan harga rumah saat ini. Padahal, warga masih dibebani membayar uang cicilan rumah yang tenggelam di lumpur dan harus menyewa atau membeli rumah baru. Pemerintah sendiri menyatakan tidak mungkin memenuhi tuntutan warga Perumahan Tanggulain Anggun Sejahtera 1 yang meminta ganti rugi tunai 100 persen sekaligus. Dalam pertemuannya dengan warga Perumtas 1 (24/4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden M Jusuf Kalla memutuskan pembayaran ganti rugi dipercepat selama setahun dari sebelumnya dua tahun untuk pembayaran sisa 80 persen dan pembayaran 20 persen secara utuh. Keputusan pemerintah ini membuat sikap warga Perumtas 1 terbelah. Mereka yang menyatakan tidak puas beralasan bahwa selain

Karikatur Berita



keputusan itu hanya dituangkan dalam dua lembar notula hasil pertemuan, warga juga tetap menuntut pemerintah membayar secara sekaligus pembayaran kerugian itu, dengan cara menalangi sisa pembayaran 80 persen lewat APBN. Sedang sebagian lagi menanggapi positif keputusan pemerintah itu sebab mereka sudah dapat membeli tempat tinggal baru.

23/04/2007

Peruntuh Uni Soviet Wafat

Mantan Presiden Boris Yeltsin meninggal dunia pada usia 76 tahun setelah mengalami gagal jantung. Jubir Kremlin, Alexander Smirnov, mengonfirmasi kematian Yeltsin di Rumah Sakit Klinik Pusat di Moskwa. Yeltsin turut membidani kejatuhan akhir Uni Soviet dan mendorong Rusia menuju pluralisme. Banyak warga Rusia yang tak bisa melupakan kepahitan hidup pada pemerintahan Yeltsin. Reformasi ekonomi dukungan Barat justru membuat perekonomian ambruk, hancurnya dana-dana pensiunan, namun ironisnya ada segelintir orang kaya mendadak. Ia pun dikenang dengan buruk oleh warga Chechnya karena serangan besar-besaran yang menewaskan 10.000 orang pada dekade 1990-an. Yeltsin dimakamkan Rabu sore (25/4) di pemakaman Novodevichy, Moskwa. Di sana juga dimakamkan mantan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, Raisa Gorbacheva, dan penulis skenario bernama besar dari era Uni Soviet, Anton Chekhov. Sekitar 35.000 pelayat memberikan penghormatan terakhir dan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Para pemimpin dunia juga

hadir seperti mantan Presiden AS Bill Clinton dan George HW Bush, ayah dari Presiden George W Bush, mantan Presiden Mikhail Gorbachev, Presiden Jerman Horst Koehler, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris John Major, Pangeran Andrew, dan mantan PM Italia Giulio Andreotti.

24/04/2007

Penerbitan SPN Ditunda

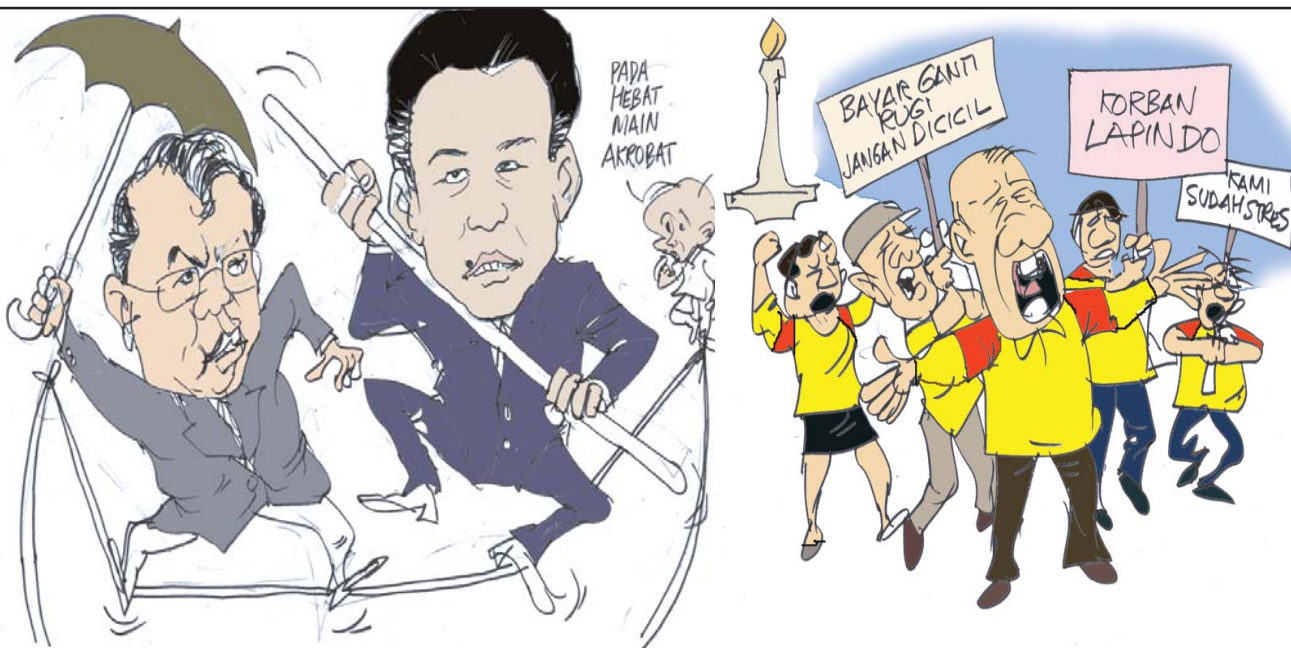
Departemen Keuangan menunda lelang perdana obligasi negara berjangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara dari rencana awal tanggal 24 April 2007 ke waktu yang belum dapat ditentukan. Penundaan dilakukan karena aturan mengenai pajak atas diskonto SPN belum tuntas. Untuk menuntaskannya, Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Pajak harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak atas Diskonto SPN menegaskan, PPh atas diskonto dipungut di pasar perdana sebesar 20 persen. Hal itu menyebabkan dua masalah. Pertama, PP itu hanya mengatur pasar perdana, tidak mengatur pungutan pajak di pasar sekunder. Padahal, di pasar sekunder ada transaksi jual beli SPN yang merupakan objek PPh. Kedua, PP itu tidak menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang harus membayar pajak dalam transaksi SPN di pasar perdana. SPN dijual dengan harga di bawah 100 persen atau diberi harga diskon. Diskon tersebut seharusnya dikenakan pajak. Dengan demikian, terdapat dua aturan teknis yang harus diterbitkan, yakni Peraturan Menteri

Keuangan tentang tatacara pemungutan PPh atas diskonto SPN dan PBI tentang pengaturan pungutan pajak tersebut. Posisi BI sangat strategis karena nantinya akan menjadi agen lelang, agen pembayar, dan wajib pungut pajak atas diskonto SPN. Rahmat menegaskan, penundaan ini tidak akan berdampak negatif terhadap pembiayaan anggaran.

25/04/2007

Laut Indonesia Paling Berbahaya

Wilayah laut Indonesia dinilai tetap paling berbahaya di dunia. Berdasarkan data tiga bulan pertama tahun 2007, hampir seperempat dari perompakan yang ada di seluruh dunia terjadi di wilayah laut Indonesia. Demikian disampaikan Biro Maritim Internasional (IMB) yang berkantor pusat di London, dalam pernyataannya, Rabu (25/4). Secara keseluruhan, disampaikan, laporan serangan di laut secara global turun hampir sepertiga, menjadi 41 kasus, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sejak tahun lalu, Indonesia telah meningkatkan patroli-patroli di laut dan menurunkan angka serangan dari 19 kasus pada tiga bulan pertama tahun 2006. Secara khusus perompakan di kawasan Selat Malaka yang menjadi urat nadi transportasi laut dunia itu, disebutkan IMB, terus menurun dengan hanya dua serangan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Meski demikian, IMB tetap memperingatkan para pelaut untuk bersiaga bilamana melewati Selat Malaka, yang dikontrol bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.



SBY Dikelilingi Perisai

Sebelum Presiden/Kepala Negara mengambil sebuah keputusan atau langkah strategis dan fundamental, siapakah yang patut didengar? Sepatutnyalah Presiden mendengarkan para penasihatnya. Namun dipahami, begitu banyak orang mengelilingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mematuhi amanat undang-undang (No.19/2006) SBY, panggilan akrab Presiden Susilo, membentuk Dewan Pertimbangan Presiden beranggotakan 9 orang. Nama-nama yang duduk di DPP cukup kredibel dan memiliki reputasi di bidang mereka masing-masing. Mungkin hanya satu dua nama dan portofolio perlu diberi catatan kaki.

Anggota DPP yang dilantik SBY (11/4); mantan Menlu Ali Alatas (hubungan internasional), mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim (lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan), Ketua Umum Partai Pelopor Rachmawati Soekarnoputri (politik), mantan Menpan TB Silalahi (pertahanan dan keamanan), Ketua Umum PIB Dr. Sjahrir (ekonomi), pengurus MUI Ma'ruf Amin (kehidupan beragama), pengacara Adnan Buyung Nasution (hukum), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Prof. Subur Budhisantoso (sosial-budaya) dan Prof. Rudy A. Gany (pertanian).

Dua nama dipertanyakan oleh publik, seperti Rachmawati dan Sjahrir. Sudah patutkah mereka menempati posisi sangat terhormat tersebut? Soalnya, tidak sembarang orang bisa memberikan masukan dan nasihat kepada Presiden/Kepala Negara, orang nomor satu di negeri ini. Keduanya memimpin partai politik, bisa dipastikan berpola pikir partisan. Sedangkan nasihat dan masukan kepada Presiden/Kepala Negara semestinya bersifat holistik, menyangkut kepentingan rakyat dan bangsa dalam jangka panjang.

Dan soal portofolio juga dipertanyakan, yaitu tentang penasihat urusan kehidupan beragama dan pertanian. Dalam urusan kehidupan beragama, Presiden sebenarnya cukup melakukan pertemuan periodik dengan para tokoh dan pemuka agama—Islam, Kristen/Katolik, Budha dan Hindu. Sedangkan untuk urusan pertanian, cukup dilakukan oleh Menteri Pertanian, termasuk masalah-masalah teknis lainnya, seperti pendidikan, perindustrian, perdagangan dan kelautan.

Kritik tentang organisasi, personalia dan mekanisme kerja DPP datang dari pakar tata negara Prof. Harun Al Rasyid, peneliti CSIS Indra Jaya Piliang dan ekonom Faisal Basri. Menurut Harun

Presiden cukup mengangkat para penasihat—tidak harus dalam wadah Dewan. Soalnya, Dewan membutuhkan tata tertib dan anggaran. “DPP bisa menjadi semacam DPA baru,” kata Harun.

Piliang mempersoalkan tidak adanya akses publik untuk mengetahui isi pertimbangan DPP. Sedangkan bagi Faisal, DPP hanyalah akomodasi politik karena tidak memiliki mekanisme untuk mempercepat dan mempertajam pengambilan keputusan Presiden.

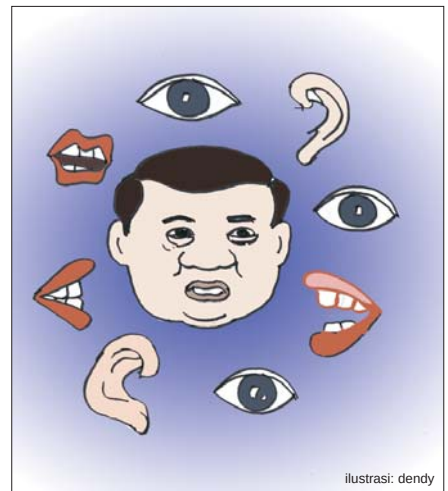
SBY hanya meminta mereka dapat memberikan kontribusi atas pengambilan keputusan, penetapan kebijakan dan tindakan pemerintah, terutama yang bersifat lebih strategis dan fundamental. SBY memberi catatan, bahwa dia menerima kontribusi serupa dari Wakil Presiden, para menteri, gubernur dan juga kepala daerah.

Penasihat senior, Emil Salim, berkomenter, “DPP mesti tahu diri. Tidak boleh punya agenda terselubung, dan tidak boleh berbicara kepada pers tentang nasihat dan masukan yang disampaikan kepada Presiden.”

DPP mesti tahu diri, karena selain Wapres dan Menteri, di sekeliling Presiden masih ada staf khusus yang dibentuk awal tahun 2006. Mereka adalah Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Sardan Marbun, Irvan Edison, Heru Lelono, Yenny Zannuba Wahid dan Kurdi Mustofa. Ketujuh orang itu diberi tugas menjadi juru bicara Presiden untuk urusan publik sampai politik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di ujung tahun tersebut, SBY masih membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Kehadiran UKP3R semula ditentang keras Wakil Presiden dan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. Unit Kerja yang dipimpin Marsillam Simandjuntak dan beranggotakan, Agus Widjojo dan Edwin Gerungan, ini mempunyai tugas teramat luas. Mereka memantau program reformasi, memperbaiki iklim investasi dan administrasi pemerintah, mendorong kinerja usaha kecil, menengah dan BUM serta memperbaiki penegakan hukum.

Survei *Kompas* mengenai tiga badan di sekeliling Presiden memperlihatkan



ilustrasi: denny

respon publik; UKP3R (62,8%), Staf Khusus (59,9%) dan DPP (66,8%). Respon yang cukup tinggi itu, mencerminkan keinginan masyarakat agar pemerintah, khususnya Presiden, bisa memperbaiki keadaan. Bisa juga sebaliknya, akibat kekecewaan mereka terhadap lembaga yang ada, seperti kabinet. Juga ada dugaan, DPP dibentuk untuk menjadi perisai rasa tidak percaya diri SBY menghadapi serangan lawan-lawan politiknya.

Lawan politik SBY yang pernah memintanya mengembalikan mandat kepada rakyat, Hariman Siregar ragu bahwa SBY akan mendengar nasihat DPP. “Soalnya, SBY selama ini selalu ragu di dalam mengambil keputusan,” kata Hariman. Hariman bersama rekan-rekannya di Indemo belum lama ini bertemu dengan penasihat hukum SBY, Adnan Buyung Nasution.

Adnan percaya bahwa SBY masih mau mendengar nasihat para anggota DPP. Namun Buyung mengakui tidak semua nasihat akan didengar atau akan dijadikan dasar keputusan atau kebijakan. Seperti komitmen SBY sendiri, pandangan dan pertimbangan DPP tetap diperlukan untuk membulatkan semua keputusan, kebijakan dan langkah yang diambilnya. Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan, selain UU para penasihat juga terikat kode etik. Soalnya, pertimbangan itu tidak mengikat, Presiden bisa setuju atau tidak. Kalau dibuka ke publik bisa menimbulkan persoalan politik.

Sepertinya harapan rakyat sangat tipis bagi perbaikan, terutama menyangkut taraf hidup mereka. Namun SBY ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah tidak putus-putusnya melakukan perbaikan. Strategi inilah yang bisa dibaca dari pembentukan berbagai lembaga di sekelilingnya. Namun langkah tersebut juga bisa menjadi bumerang: cermin ketidakmampuan SBY untuk memperbaiki kinerja kabinetnya. ■ SH

Budaya Korupsi

Benarkah perilaku korup sudah jadi budaya bangsa? Sejumlah fakta empiris dan penelitian memberi jawaban, benar. Jika perilaku korup benar-benar sudah jadi budaya, maka bangsa ini butuh waktu panjang, kerja keras dan konsistensi untuk mendobraknya.

Orang nomor satu negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2/8-2006) pernah berikrar: "Pemberantasan korupsi harus dilakukan sekarang juga dan jangan ditunda. Jangan ada pengecualian." Agaknya, setelah menjalani masa jabatan dua tahun, Presiden perlu menegaskan kembali komitmen dan kesungguhannya di dalam memerangi "budaya korupsi."

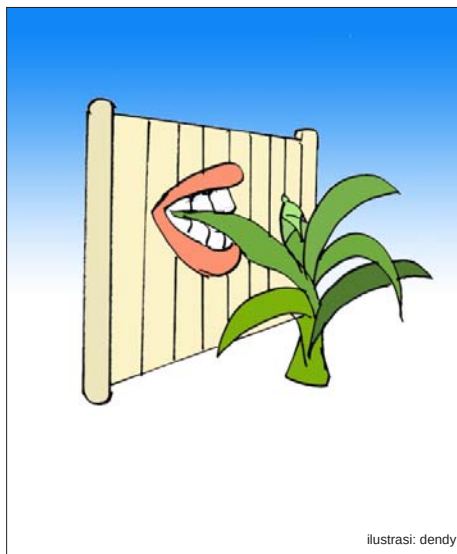
Sebab, fakta tentang tindak korupsi yang muncul ke permukaan hanyalah puncak gunung es, mengerucut di atas dan membeku di dasar. Banyak perbuatan korupsi yang kita dapati dan hadapi sendiri di kantor-kantor pemerintah, mulai dari tingkat bawah sampai di jantung pemerintahan. Demikian pula di kantor-kantor aparat penegak hukum; kepolisian, kejaksaan dan pengadilan—dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.

Tetapi dalam kondisi seperti itu, ada saja orang yang memberi pembenaran bahwa pegawai negeri sipil (PNS), baik itu aparat birokrasi maupun penegak hukum, menggunakan sekecil apa pun peluang untuk berbuat korup, karena gaji mereka kecil. Sikap seperti ini, sungguh berbahaya, karena cenderung melestarikan budaya korupsi.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII), tahun 2006, mengukuhkan dugaan bahwa hakim, polisi dan militer, menempati urutan teratas di dalam memanfaatkan peluang untuk berbuat korup. Kemudian disusul oleh aparat Bea Cukai dan Badan Pertahanan Nasional. Sebenarnya masih ada yang luput dari perhatian TII, misalnya guru, pegawai kantor kelurahan, kecamatan dan rumah sakit. Di hampir semua instansi pemerintah, bercokol stigma, "ada uang semua urusan beres." Maka muncul plesetan, "uang yang maha kuasa."

Kalau berpijak pada fakta dan budaya korupsi serta hasil survei PERC yang bermarkas di Hong Kong, maka masa depan bangsa ini benar-benar gelap. Seolah-olah ke mana pun kita melangkah makhluk yang bernama "korupsi" selalu ada. Selain pencurian uang negara dan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat birokrasi dan penegak hukum, di mana pun kita menemukan wajah lain dari korupsi, seperti manipulasi timbangan dan mutu barang serta penggunaan bahan-bahan pengawet oleh para pedagang.

Perilaku korup yang membudaya menggerogoti sumber daya negara dan rakyat, menimbulkan distorsi ekonomi di semua lini, dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena sebagian besar anggota masyarakat, terutama PNS, membangun kehidupan mereka bukan di atas gaji riil yang mereka peroleh. Mesti disadari, suatu saat sumber penghasilan ilegal akan tertutup. Dalam kondisi seperti ini, tentu menimbulkan kegoncangan tatanan keluarga, dalam skope yang luas berdampak



ilustrasi: denny

pada tatanan sosial masyarakat.

Sebuah bangsa yang mendewakan kebendaan, masyarakatnya condong melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Karena dengan uang, mereka akan mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang terbaik. Sedangkan mereka yang miskin akan semakin terpinggirkan. Fatalnya, mereka yang mendapatkan uang dari hasil korupsi, bahkan bisa "membeli hukum" dengan harga seberapa pun. Soalnya, uang yang mereka peroleh dengan mudah, lantaran kedudukan dan kesempatan yang dimiliki.

Karena itu, anggota masyarakat yang tidak punya keterampilan, mencari uang dengan cara apa pun, termasuk menggunakan jasa dukun. Makanya, praktik perdukunan, paranormal dan "orang pintar" marak di mana-mana. Mereka pun mendapatkan uang dengan mudah dari "pasien-

pasien" mereka, mulai dari masyarakat kecil yang mencari *pesugihan* sampai mereka yang mengejar jabatan, pejabat yang ingin mempertahankan jabatan atau jabatan yang lebih tinggi, kalau bisa sampai gubernur dan presiden.

Dalam dimensi ini, perilaku korup sudah memasuki kawasan yang tak mungkin dijangkau oleh tangan-tangan hukum. Korupsi berubah menjadi "virus kanker" yang menggerogoti logika dan ketahanan masyarakat. Karenanya, kita, terutama para pemimpin yang masih waras, mesti menyadari dan berbuat untuk menyembuhkan bangsa ini dari "penyakit aneh" ini.

Sementara penyakit kekurangan dan ketidakberdayaan ekonomi dialami oleh 109 juta jiwa. Mereka sudah lama bergulat dalam kemiskinan. Kesulitan ekonomi akut juga dialami oleh tenaga-tenaga kerja produktif yang sedang menganggur, menunggu kesempatan kerja yang tak pasti. Jumlah mereka tidak sedikit—40 juta penganggur terselebung ditambah 10 juta lebih penganggur terbuka.

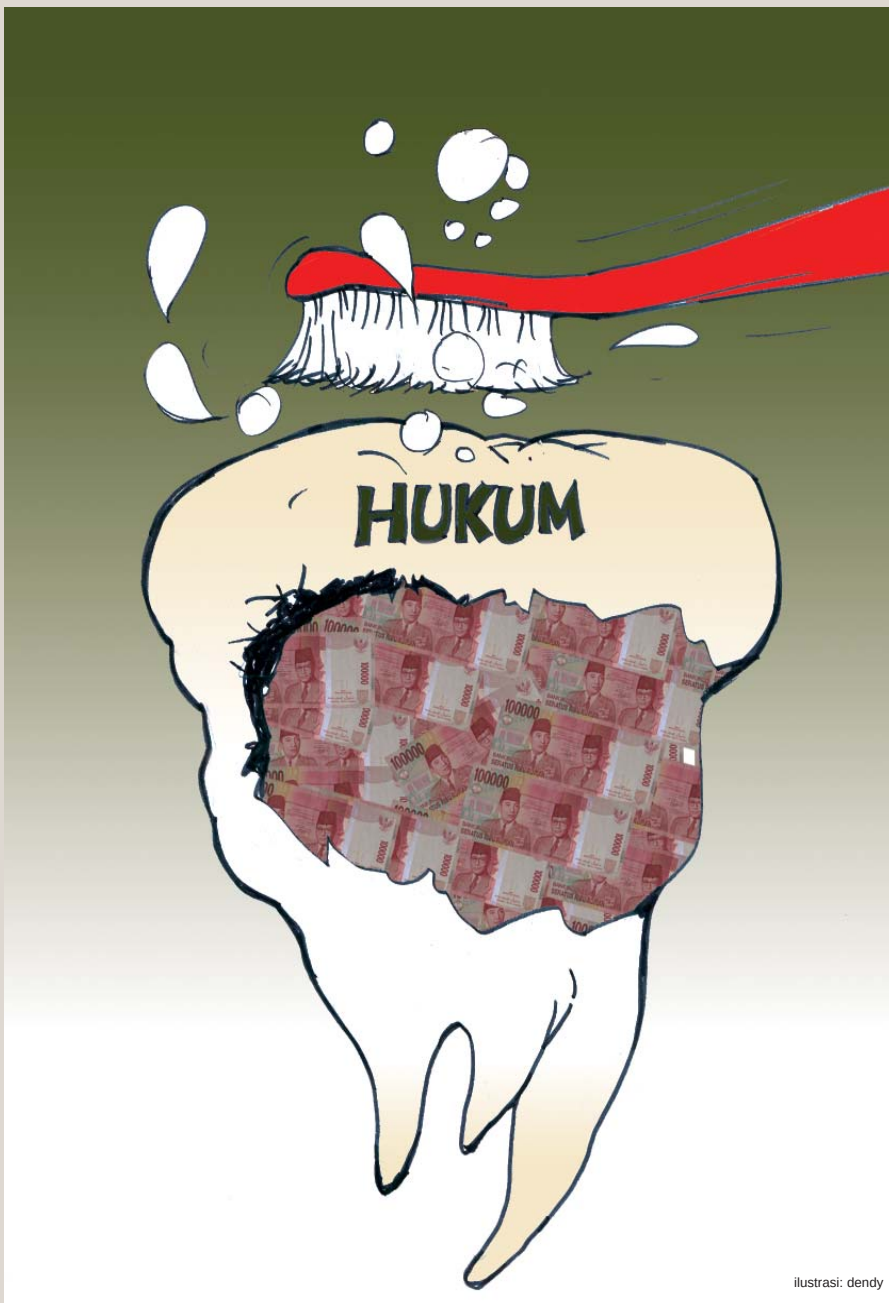
Bilamana tangan-tangan hukum tidak mampu menjangkau semua mereka yang buta mata hatinya, karena bergelimang harta hasil korupsi, maka kita hanya bisa mengimbau agar mereka, terutama yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sadar dan terketuk hati nuraninya melihat jutaan saudaranya yang hidup bergelimang kemiskinan dan kesulitan. Karena penyebab dari sebagian besar kemiskinan dan kesulitan tersebut adalah ulah mereka juga.

Selain langkah hukum dan imbauan, memang ada pilihan yang paling radikal, untuk memberantas budaya korupsi, *zero option* (titik nol). Tetapi dengan *zero option* sama artinya dengan revolusi yang akan memakan banyak korban. *Zero option* berarti memangkas satu generasi supaya bangsa ini sembuh dari rongrongan "virus korupsi" atau melakukan pengobatan konvensional dengan dosis yang lebih tinggi.

Namun, kita wajib percaya bahwa di ujung kesempitan ada kelonggaran, dan di ujung kesulitan ada kemudahan. Maka tugas para pemimpin, formal atau non-formal, memberi harapan yang pasti dan membangkitkan optimisme rakyat.

Untuk mendobrak budaya korupsi, tak apa kita hidupkan kembali tema kampanye yang mengantarkan SBY-JK ke kursi kekuasaan, "bersama kita bisa." ■

REFORMASI PENEK



ilustrasi: denty

Sistem penegakan hukum sudah bagus, tetapi belum lengkap. Tidak ada sanksi hukum bagi petinggi negara, khususnya Presiden dan Menteri, jika tidak melaporkan atau menyembunyikan kekayaannya. Sebaik apa pun sebuah sistem akan lumpuh di tangan penguasa dan aparat penegak hukum yang korup. Karena hukum ada dalam genggamannya mereka. Hanya sapu yang bersih yang bisa membersihkan lantai yang kotor.

Uang suap, ibarat bumbu masak, boleh dibilang identik dengan penyedap pelayanan publik. Boleh jadi aparat pelayanan publik, khususnya aparat penegak hukum, sebagian besar sudah ke>tagihan "bumbu sedap pelayanan." Kebiasaan tersebut digambarkan sudah membudaya, bagi pemberi, apalagi penerima uang suap.

Kalau tidak percaya, silakan simak hasil survei Transparency International Indonesia (TII), tahun 2006. Menurut survei tersebut, aparat kepolisian, militer dan peradilan menempati urutan teratas dengan rekor masing-masing 70, 55 dan 53 persen. TII melakukan survei terhadap 1.760 responden yang tersebar di 32 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Pengurus TII, Todung Mulia Lubis, para responden yang berprofesi pengusaha, terbelah di dalam memandang uang suap. Sebanyak 49 persen responden setuju dengan praktik suap dalam pelayanan publik. Yang setuju punya alasan sendiri—suap suatu yang lumrah ibarat memberi zakat, supaya urusan lancar dan lantaran gaji pegawai negeri kecil.

Sedangkan responden yang tidak setuju (50%), juga punya alasan: merusak sistem dan menimbulkan biaya tinggi.

Temuan lain TII, para responden (32%) mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi suap dan korupsi, menempati urutan pertama (32%). Andalan kedua, asosiasi bisnis (24%), andalan ketiga dan keempat, pers (16%) dan LSM (12%). Sedangkan polisi dan tokoh agama masing-masing memperoleh kepercayaan 6% dan 3%.

Sedangkan pihak KPK sendiri, menurut Deputy Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, Junino Jahya, masih mengalami kendala internal, terutama sumber daya yang terbatas. "Itu bisa ditutupi jika aparat hukum lain bisa membantu," kata Junino kepada Maruwas dari *Berita Indonesia*. Tetapi Junino mengamati, aparat kepolisian dan kejaksaan sampai saat ini masih menghadapi kesulitan. Ini, katanya, terlepas dari integritas para anggota. Beban mereka sangat banyak di dalam penyelesaian pidana umum.

KPK juga masih mengeluhkan serangan balik dari koruptor, dibikin repot oleh pengadilan *judicial review* (uji material UU) ke Mahkamah Konstitusi. Ada juga pendapat-pendapat di media massa yang menyerang KPK. "Ini menambah beban

GAKAN HUKUM

psikologis dan psikis bagi kami, karena harus melayani tuntutan perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Junino.

Kendala lain dari sisi undang-undang, misalnya tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Para petinggi memang wajib melaporkan kekayaan mereka, tetapi tidak ada sanksi hukum. Kata

Junino: “Kalau tidak melapor atau keanehan di dalamnya, tidak ada sanksi hukum.” Kesulitan ini ditambah oleh belum adanya UU Pembuktian Terbalik serta UU Perlindungan Saksi. Padahal dalam gerakan pemberantasan korupsi diperlukan dukungan dari masyarakat.

Soal hubungan dengan KPK dan Tipikor,

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Hendarman Supandji, mengatakan di dalam penanganan perkara korupsi tidak perlu dipermasalahkan dan tidak akan tumpang tindih. Soalnya, KPK dan Tipikor memiliki payung hukum (UU No.20/2002 dan Keppres No.11/2005). “Yang perlu dilakukan koordinasi antara Kejaksaan,

Ketua BPK Anwar Nasution:

“Sekali-sekali Gantung Dulu Koruptor Itu”

Tidak Anwar Nasution namanya kalau tidak melontarkan gagasan kontroversial. Menyangkut pemberantasan korupsi di Indonesia pun, pria kelahiran Sipirok, Sumatera Utara ini mengusulkan agar koruptor sesekali digantung. Secara umum, Mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia ini melihat penegakan hukum masih lemah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Terlebih dengan penegak hukum yang terlibat dengan praktik pungli dan suap.

Bagaimana penilaian Bapak tentang penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia hingga saat ini?

Itu yang membedakan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan China dan Korea. Makanya itu dua presiden Korea masuk penjara, jenderal bintang empat. Di sini (Indonesia-red) tidak ada yang dimasukkan ke penjara, hanya omong doang. Lihat cebol-cebol (konglomerat-red) itu di Korea masuk penjara. Di sini apa ada toke-toke yang masuk penjara, bahkan dapat kredit lagi.

Apakah itu dapat dianggap tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi?

Ada kemajuan. Mana ada di masa lalu itu (mantan pejabat-red) yang masuk penjara. Mana ada dulu menteri agama yang dianggap setengah dewa juga dihukum.

Tetapi mengapa masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja penegak hukum?

Ada kemajuan, cuma memang masih banyak masalah. Antara lain menteri-menteri Ibu Mega (Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri-red) masuk penjara, kenapa menteri-menteri yang sekarang ini tidak masuk penjara? Lihat saja penyaluran (transfer-red) uang si Tommy itu. Itu kan sedih kita melihat itu. Lihat Mensesnegnya itu, yang sehari-hari mendampingi presiden. Cobalah lihat bagaimana ia mengurus uang Tommy itu. Itulah Menteri Hukum dan HAM.



foto: berindo arif

Dalam UU, BPK memiliki kewenangan melaporkan temuan-temuan yang berindikasi korupsi kepada penegak hukum. Bagaimana respon mereka terhadap laporan BPK?

Ya ada respon. Lihat KPK, Jaksa Agung, Tipikor, bekerja berdasarkan laporan BPK. Tetapi masih banyak juga yang sangat mengecewakan. Misalnya, cobalah lihat praktek-praktek bagaimana penegak hukum itu cari duit.

Banyak sekali pungli di situ. Bagaimana mereka mendapatkan PNB, ia bikin peraturan sendiri, ia pungut sendiri, ia simpan sendiri, ia gunakan sendiri, tanpa mengacu pada UU, seperti uang perkara di Mahkamah Agung.

Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan korupsi di Indonesia?

Penegak hukum....! Sesekali gantung dulu orang (koruptor-red) itu. ■ MS, SH

KPK dan Polri,” kata Hendarman.

Hendarman, menyampaikan jawaban tertulis kepada *BI*, mengutarakan bahwa penegakan hukum juga perlu melakukan reformasi, khususnya reformasi di bidang penanganan perkara pidana. Kata Hendarman, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel dan independen. Namun dia menyarankan reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara bertahap, simultan dan berkelanjutan.

Sistem yang sudah tersistem di Kejaksaan, kata Hendarman, melalui pengendalian penanganan perkara korupsi secara berjenjang. dan dengan pengawasan melekat (*Waskat*) untuk mencegah aparat jaksa tergoda dalam lingkaran mafia peradilan. Selain dengan *Waskat*, integritas para jaksa, menurut Hendarman, ditingkatkan dengan “siraman rohani” berdasarkan ajaran agama yang mereka anut.

Sebuah sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan kepada *BI*, teladan gerakan anti korupsi harus datang dari orang-orang terdepan di negeri, misalnya Presiden, baik dalam ucapan maupun tindakan. “Mereka harus menjadi teladan bagi perilaku hidup sederhana dan bersih.

Supaya tidak terkesan tebang pilih, katanya, perlu ditarik garis yang tegas antara tindak korupsi di masa lalu, dan gerakan pembersihan korupsi ke depan. Katanya, mesti dilakukan *zero option* atau semuanya dimulai dari titik nol. Sebaik apa pun sistem yang dibuat, katanya, akan sia-sia di tangan para pelaku yang tidak bersih dan tidak jujur.

Coba simak pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mulai menabuh gendang “perang” melawan korupsi sampai detik ini. “Saya akan terus berjuang melawan korupsi dan mendengarkan koreksi dari rakyat untuk memberantas korupsi.” Pernyataan ini diikrarkan SBY, panggilan akrab Presiden Susilo, 27 November, hanya sebulan setelah dilantik sebagai Presiden, Oktober 2004.

Lantas dua tahun kemudian, 2 Agustus 2006, SBY kembali mengikrarkan: “Pemberantasan korupsi harus dilakukan sekarang juga dan jangan ditunda. Jangan ada pengecualian.” Ikrar SBY yang terbaru: “Saya berjanji akan membantu pimpinan BUMN yang dituduh korupsi padahal tidak korupsi atau yang merasa diadili oleh pers. Aparat penegak hukum diminta cermat dan tidak gegabah menyidik seseorang yang diduga korupsi.”

Tentu pernyataan SBY yang ini tidak bermaksud menjawab “serangan pers dan publik” atas langkah dua menterinya, Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaluddin yang membantu melicinkan aliran dana Hutomo Mandala sebesar USD 10 juta dari Putra dari Banque Nationale de Paris (PNB) ke rekening Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM. ■ **MS, SH**



Jaksa dan polisi sering terlibat konflik kewenangan.

Dua Gajah Berebut Hutan

Benarkah jaksa dan polisi masih berebut lahan penyidikan korupsi? Bagaimana perkembangan kewenangannya?

Publik masih ingat kasus PLN yang melibatkan Dirut PLN Eddie Widiono, September tahun lalu. Kapolri Jenderal Sutanto didesak untuk memerintahkan anak buahnya segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Borang senilai Rp 122 miliar itu. Namun, berkas-berkas yang disodorkan kepolisian kepada Kejaksaan Agung ditolak karena dianggap belum lengkap.

Belum lagi soal status cekal Eddie yang sudah habis sementara Mabes Polri tidak memperpanjangnya dan kejaksaan terkesan tidak mengantisipasi dengan membiarkan habis masa cekal itu.

Kasus Eddie akhirnya memang tidak berlanjut. Peristiwa ini sempat menimbulkan sangkaan kedua lembaga itu asyik dengan egonya masing-masing. Menimbulkan dugaan kalau kinerja kejaksaan dan kepolisian tidak profesional. Apalagi sampai ada kesan rebutan ‘lahan’.

Sebelumnya, ada kontroversi ‘rebutan’ kewenangan penyidikan kasus korupsi tiga mantan direktur Bank Indonesia. Lalu ‘perseteruan’ kedua korps penegak hukum terdepan itu sesuai bebasnya Eng San, yang berujung pada ditangkapnya lima jaksa atas tuduhan pemalsuan BAP. Konon kabarnya, hal itu juga berkaitan dengan dituntut bebasnya Iwik - terdakwa tunggal kasus pembunuhan Udin wartawan Bernas - oleh Jaksa Penuntut Umum di Bantul.

Begitu pula reaksi tajam kalangan

kejaksaan atas penangkapan lima jaksa oleh polisi (sebagai buntut kasus Eng San), beberapa waktu lalu, juga semakin menegaskan belum padunya dua lembaga penegak hukum tersebut.

Hal ini disangkal oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Hendarman Supandji kepada *Berita Indonesia*, sesungguhnya istilah itu tidak ada.

Kewenangan Baru

Namun demikian, tampaknya akan ada aturan main baru untuk jaksa, yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang baru, yang nantinya akan mempertajam kesan rebutan lahan itu. Salah satu pasal menarik dicermati, yakni jaksa diberi kewenangan menghentikan penuntutan.

Mengutip Profesor Andi Hamzah, Ketua Tim Penyusun Rancangan KUHP, perkara yang dapat dihentikan penuntutannya antara lain perkara kecil atau ringan, pelakunya berumur 70 tahun ke atas, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, serta untuk yang kerugiannya sudah diganti.

Dalam pasal 99 RUU KUHP, jaksa juga diberi kewenangan melakukan penyidikan. Pasal ini jelas menambah semakin kentel rasa sentimen di kalangan penegak hukum. Pasal itu sekaligus mengaburkan prinsip pemisahan unsur *criminal justice system* yang selama ini dianut; fungsi hakim mengadili, jaksa sebagai penuntut dan Polri sebagai penyidik. ■ **RH**

Revisi KUHAP

Memelototi Kerja Jaksa dan Polisi



foto: mediaindonesia.com

Wacana pembentukan badan baru, hakim komisaris, untuk mengawasi polisi dan jaksa.

Revisi KUHAP menelurkan insitusi baru, yakni hakim komisaris. Solusi atau masalah baru?

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berusia lebih dari 25 tahun itu dianggap tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Masyarakat yang awam terhadap proses beracara menjadi sasaran empuk kegiatan pungli para anggota penegak hukum yang tak bertanggung jawab.

Wacana perubahan KUHAP ini segera direpon Departemen Hukum dan HAM. Tim penyusun draf yang dipimpin pakar hukum Trisakti, Andi Hamzah. Draft RUU KUHAP akan diserahkan ke DPR pada Agustus 2007.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menyatakan salah satu alasan pembuatan RUU KUHAP adalah munculnya kejahatan non-konvensional. Ada tujuh poin penting dalam RUU KUHAP, yaitu aturan penahanan, adanya hakim komisaris, penambahan alat bukti, penggunaan asas oportunitas, perubahan upaya hukum, serta hubungan antara penyidik dengan jaksa.

Salah satu poin paling menarik dalam revisi hukum acara pidana tersebut adalah Hakim Komisaris. Tugasnya, memelototi kerja polisi dan jaksa. Hakim komisaris benar-benar institusi baru dalam hukum acara pidana nasional, sebab Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengaturnya sama sekali. Dalam revisi KUHAP, institusi ini mendapat porsi yang besar, diatur dalam Pasal 72-78 (draft ketiga). Melihat porsi pengaturannya, kuat dugaan hakim komisaris akan menjadi bagian penting dalam serangkaian hukum acara pidana.

Seorang hakim komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas. Ia juga menentukan perlu tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang ditahan secara tidak sah.

Pada sisi lain, hakim komisaris juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa didampingi penasehat hukum.

Menurut Andi Hamzah, wewenang hakim komisaris itu serupa dengan *Giudice per le indagini Preliminari* di Italia dan *Juge de Liberte de la Detention* (hakim yang membebaskan tahanan) di Perancis.

Sementara menurut Hamid, hakim komisaris merupakan substitusi dari

konsep praperadilan yang selama ini tidak efektif. Konsep praperadilan dalam KUHAP dinilai kurang efektif karena pasif menunggu gugatan dari para pihak. Lembaga itu juga tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pengadilan negeri.

Dianggap Gegabah

Hakim komisaris diperkenalkan sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan dan perilaku aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang selama ini tidak ada kontrol.

Hakim komisaris akan dijabat seorang hakim di tiap pengadilan negeri melalui seleksi oleh pengadilan tinggi dan diangkat presiden untuk masa jabatan dua tahun.

Dengan adanya hakim komisaris, jaksa tidak lagi berwenang menahan seorang tersangka. Wewenang jaksa pun dibatasi hanya menyetujui penahanan.

Namun demikian, beberapa perubahan dalam RUU KUHAP dipandang terlalu berprasangka baik kepada para penegak hukum. Sebab, tercantum semua putusan bebas, baik di tingkat pertama maupun banding, tidak dapat diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, sekali bebas di tingkat pengadilan pertama, terdakwa tidak bisa lagi diperkarakan dalam kasus yang sama.

Dalam soal aturan peninjauan kembali (PK), alasan adanya kekeliruan hukum oleh hakim dihapus sebagai alasan PK.

Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Denny Kailimang mengingatkan soal pengawasan bagi penegak hukum. Dengan aturan putusan bebas di tingkat pertama tak bisa banding, hal itu lebih memudahkan penegak hukum yang nakal dalam menelakung proses hukum.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki berpendapat senada. "Ini akan semakin menyuburkan mafia peradilan yang ada di pengadilan negeri. Mereka akan memperjuangkan untuk membebaskan saja di tingkat pengadilan negeri. Dari sisi terdakwa, pengaturan baru ini justru akan membuat ongkos semakin murah dan distribusi uang dalam permainan perkara hanya tersentral di tingkat pertama saja," ujarnya.

Teten mengingatkan, tim perumus RUU KUHAP terlalu gegabah, padahal di sisi lain aparat penegak hukum di Indonesia masih belum bisa dipercaya. ■ RH

Virus Korupsi di Akar Hukum



Slamet Efendi Yusuf

foto-foto: berindo wilson



Rokhmin Dahuri

Hitam-putihnya undang-undang atau hukum ada di tangan para anggota DPR. Mereka pun bisa merumuskan UU berdasarkan pesanan.

Masih ingat heboh tentang RUU Perpajakan, RUU Tenaga Kerja dan RUU Migas? Para anggota Komisi DPR terkait meloloskan RUU-RUU tersebut menjadi UU berdasarkan pesanan sponsor (departemen). Tentu dengan imbalan sejumlah uang. Jelas ini bentuk nyata dari komersialisasi wewenang legislasi para anggota Dewan.

Akh...itu kisah usang di era Orde Baru. Namun masih terulang dan terus terulang di era reformasi. Komersialisasi wewenang para anggota Dewan bisa ditemukan di banyak sektor. Di DPR juga ada posisi "basah", seperti Panitia (komisi) Anggaran dan Komisi-Komisi yang bermitra dengan Departemen "basah." Di saat-saat mendekati pembahasan anggaran, Panitia Anggaran pasti kewalahan menerima order dari departemen dan daerah yang meminta anggaran mereka tidak dipangkas. Di sinilah terjadi "transaksi" supaya anggaran mereka dinaikkan.

Belakangan ini, mereka yang tadinya duduk di Komisi III (sekarang Komisi IV) DPR dan menerima kucuran dana "haram" Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mendapat sorotan publik. Awalnya, Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendi Yusuf, tadinya anggota Komisi III (1999-2004), mengaku menerima uang tunai Rp 20 juta dari Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Megawati.

"Saya memang menerima dana itu, tetapi tidak terkait dengan tugas-tugas kedewanan, apalagi pembuatan UU Kelautan," kata Slamet kepada SH. ICW meminta Presiden menertibkan dana non-bujeter di berbagai instansi pemerintah agar tidak digunakan untuk kepentingan

di luar fungsi lembaga yang bersangkutan.

Seperti pepatah orang Inggris, "*no free lunch*," (tidak ada makan siang gratis), boleh jadi saat itu Rokhmin—kini sedang menjalani pengadilan Tipikor karena dakuwaan korupsi—punya niat terselubung memberikan dana itu kepada Slamet untuk meloloskan RUU Kelautan di DPR. Slamet hanya mengaku uang itu sudah disumbangkan untuk pembangunan masjid di kampungnya di Purwokerto, Jawa Tengah.

Dana non-bujeter yang dikumpulkan Rokhmin mengucur ke mana-mana. Rokhmin, dalam pemeriksaan di pengadilan Tipikor tentang dana DKP yang mencelakakannya, juga mengalir ke anggota parlemen senior PDIP, Sabam Sirait dan dua tokoh kunci partai yang beroposisi itu, Taufik Kiemas dan istrinya Megawati. PDIP mengundang rapat khusus untuk membahas perkara tersebut.

Menurut Sekjen PDIP Pramono Anung, Sabam menyangkal keras pernah meminta atau menerima uang pemberian Rokhmin. Megawati ketika itu menjadi Presiden, tidak tahu-menahu mengenai uang pemberian Rokhmin, apalagi kalau dibilang dalam bentuk batik senilai Rp 10 juta dan buku senilai Rp 4,8 juta. Pramono menilai pengusutan dana DKP atas diri Rokhmin lebih kental nuansa politik ketimbang penegakan hukum.

Kasus ini akhirnya kandas di tengah jalan. Pimpinan DPR mengambil posisi pasif dengan sepakat untuk tidak mengadakan persoalan ini ke Badan Kehormatan DPR karena belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran dari sisi kode etik. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan DPR di Jakarta (24/4). Ditanya soal adanya sejumlah anggota DPR yang mengakui menerima

uang tunjangan hari raya (THR), bantuan untuk pesantren, sampai uang untuk pembuatan naskah pidato dari DKP, Zaenal Ma'arif, Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa pengakuan itu belum cukup.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menilai keputusan itu menunjukkan pimpinan DPR tak memiliki kemauan untuk mengikis adanya aliran dana ke DPR. Alasan anggota DPR tak tahu dari mana sumber uang, menurut Danang, tak masuk akal dan "lugu". Untuk tujuan apapun, uang di atas Rp 10 juta yang diterima harus dilaporkan ke KPK.

Terima Dana Sudah Biasa

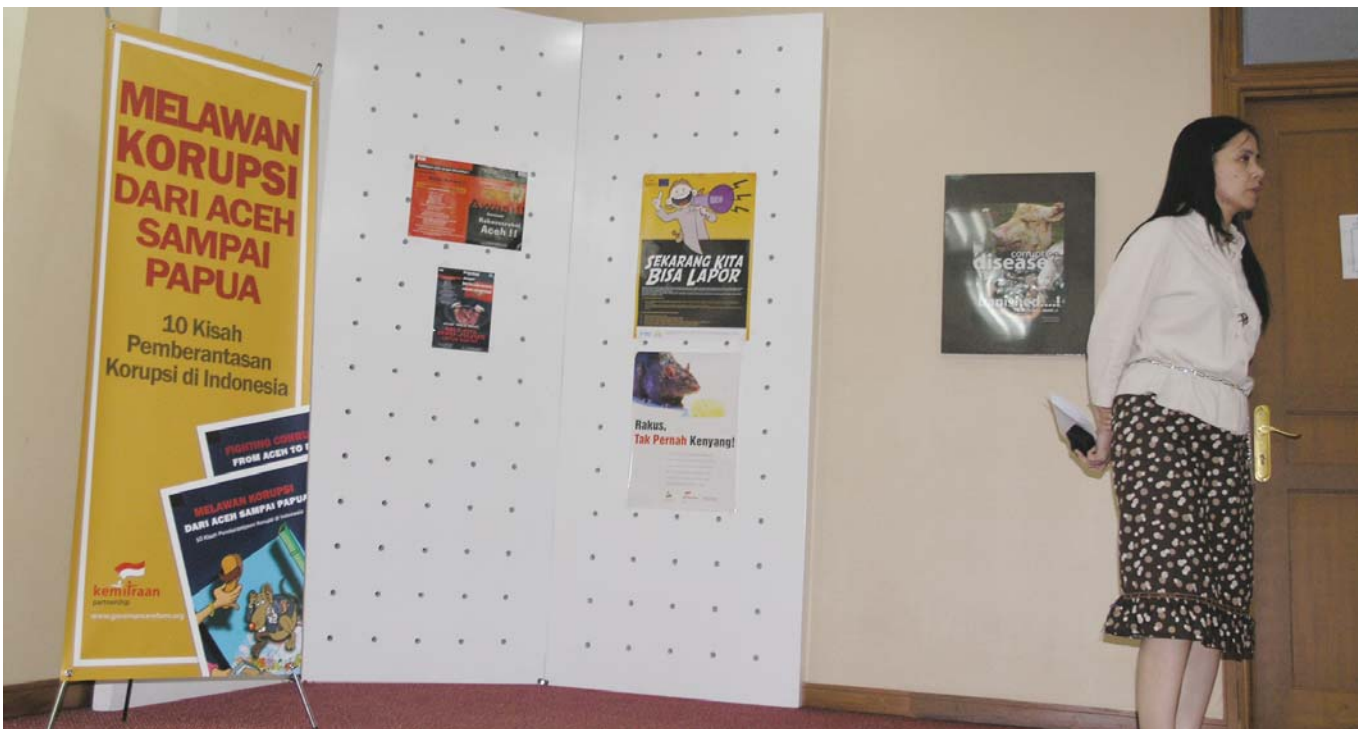
Ketua dan tiga wakil ketua DPR selalu menerima dana dalam setiap tahapan proses pembahasan perundang-undangan. Tahapan tersebut mencakup pembahasan di badan legislasi, badan musyawarah, panitia khusus dan panitia kerja DPR. "Setiap tahapan mereka menerima dana tunai Rp 5 juta. Ini yang harus dihapus," kata anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Nursanita Nasution.

Nursanita mengutarakan selama ini anggaran pembahasan satu RUU hanya dialokasikan Rp 600 juta. Dana itu digunakan sejak usulan sebuah RUU dibahas di badan legislasi, panitia khusus, panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi. Setiap tahap pembahasan para pimpinan dan anggota menerima masing-masing Rp 5 juta, kecuali di panitia kerja, hanya Rp 2 juta. Sedangkan dana yang disediakan pemerintah, menurut anggota fraksi PKS itu, biasanya Rp 3 miliar. Dana dari pemerintah, kata Nursanita, biasanya digunakan untuk membiayai pembahasan di luar gedung DPR.

Dana yang dialokasikan tahun ini sebanyak Rp 275 miliar untuk merampung 53 RUU menjadi UU. Dana tersebut akan dibelanjakan untuk menyelesaikan Program Legislasi Nasional 2006. DPR, tahun ini, punya target untuk menyelesaikan 33 RUU yang diprakarsainya. Sedangkan pemerintah memprakarsai 20 RUU.

Agung Laksono mengatakan DPR, tahun ini, meningkatkan anggaran satu RUU inisiatif Dewan menjadi Rp 2,4 miliar. Sedangkan tahun 2006, dialokasikan Rp 668 juta per RUU. Nadrah Izhari, anggota BURT, mengatakan dengan penambahan anggaran tersebut para anggota Dewan mampu meningkatkan mutu legislasi mereka.

Sebab selama ini, DPR, ketika membahas sebuah RUU, hanya membuat kajian sekadarnya, tidak mendalam. Jadi tidak heran jika banyak UU yang sudah disahkan DPR batal di tangan Mahkamah Konstitusi. ■ SH



Perlawanan terhadap korupsi melalui berbagai media seperti spanduk, leaflet dan poster.

foto: berindo wilson

Kolusi di Antara Aparat Hukum

Publik memandang polisi, jaksa dan hakim, sama saja. Hampir tak ada yang luput dari permainan uang. Sulit menemukan aparat penegak hukum yang bersih.

Suatu hari, para petinggi Mabes Polri, panik. Seorang wanita mengancam lewat telepon akan meledakkan jantung keamanan republik tersebut. Rupanya wanita itu, Sri Winarsih, Dirut PT Sentral Sejahtera, ingin menarik perhatian karena merasa kesal, pengaduannya ke Mabes Polri dan KPK tidak pernah digubris. Pasalnya, Sri “digulung” oleh aparat Bea Cukai, sehingga menderita kerugian tak tanggung-tanggung, Rp 9 miliar. Lantas dia melapor ke polisi. Eh...malah dia diperas harus membayar Rp 700 juta.

Meskipun berdiri sebanyak 365 lembaga pengawasan pelayanan publik, dan 500 pengaduan yang masuk Komisi Ombudsman Nasional dalam sebulan tentang buruknya pelayanan publik, terutama polisi, tidak mengalami perbaikan yang berarti. Kinerja pelayanan publik polisi, termasuk paling buruk, hanya mencatat 27%.

Lembaga pemantau kinerja kepolisian, Police Watch, mengatakan bahwa dalam hal pemeriksaan kasus korupsi, polisi juga sangat rentan terlibat praktik mafia peradilan. “Polisi juga membangun kolusi

dengan pengacara, jaksa dan hakim untuk meloloskan seorang tersangka tindak pidana korupsi,” kata Ari Sudrajat kepada *Berita Indonesia*. Misalnya, polisi membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang sumir atau yang meringankan, bahkan membebaskan tersangka korupsi. Polisi juga bisa menghilangkan barang bukti atau mengalihkan pemeriksaan pada hal-hal yang sebenarnya tidak relevan.

Menurut Ari dari Police Watch, polisi menerima suap dan melakukan pungutan liar karena selama rekrutmen, pendidikan dan kenaikan pangkat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, ketentuan tidak tertulis, dan sudah jadi rahasia umum, seorang polisi bawahan wajib setor ke atasannya.

Jaksa pun tidak lebih baik dari polisi. Suatu waktu, Ahmad Djunaidi, mantan Direktur Utama PT Jamsostek, mengemukakan di ruang pemeriksaan pengadilan. Dia melampiaskan kekesalannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Rupanya sang jaksa sudah menerima uang suap Rp 600 juta darinya, sebagai imbalan keringanan tuntutan. Sang jaksa berlagak pilon, mengajukan tuntutan yang cukup berat

untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Djunaidi selama memimpin Jamsostek.

Djunaidi berteriak sekeras-kerasnya sembari melempar sebelah sepatunya ke arah jaksa. Belakangan, dua jaksa mengaku di pengadilan bahwa mereka menerima uang suap dari Djunaidi. Mereka pun akhirnya dijabarkan ke dalam penjara.

Namun pihak Kejaksaan, menjawab pertanyaan BI, menyatakan secara tertulis bahwa penanganan perkara di Kejaksaan, khususnya perkara korupsi, bukanlah arena “perdagangan jual beli” sehingga tidak ada istilah jual beli perkara. Penanganan perkara korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional serta transparan dan akuntabel. Sederet pertanyaan tertulis yang dikirim BI ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supanji.

Namun Hendarman membenarkan pamelo bahwa untuk menyapu lantai harus menggunakan sapu yang bersih. Karenanya, aparat penegak hukum harus melakukan pembenahan terus menerus dengan meningkatkan integritas SDM agar kepercayaan masyarakat bisa semakin tinggi terhadap aparat penegak hukum.

Pihak Kejaksaan meningkatkan kemampuan profesional aparat jaksa di dalam menangani perkara korupsi, melaksanakan pendidikan dan latihan secara



Todung Mulya Lubis

foto: berindo wilson

berkesinambungan. Setiap tahun, Kejaksaan mendidik dan melatih 60 jaksa spesialis korupsi dan tindak pidana khusus untuk mengimbangi modus operandi tindak korupsi yang semakin canggih.

Hendarman menyangkal istilah “rebutan perkara” antara Kejaksaan dan Kepolisian. Kedua aparat penegak hukum itu berjalan beriringan, terkoordinasi dan mempunyai visi-misi yang sama di dalam memberantas korupsi sesuai koridor ketentuan hukum, sehingga penegakan hukum tidak dilakukan dengan melanggar hukum. Hendarman juga menyangkal adanya tumpang penanganan perkara korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor.

“Pokoknya jika ada permasalahan dalam penanganan perkara korupsi di antara aparat penegak hukum, dilakukan dengan kata kunci koordinasi,” jawab Hendarman.

Survei TII

Survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) membuktikan pelayanan publik di pengadilan dianggap paling buruk, karena aparatnya meminta uang. Untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, aparat yang berwenang meminta uang pengganti foto kopi sampai Rp 200.000. Seseorang yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan karena kebijakan kantornya sangat keras, dia selalu minta kuitansi. Ada yang mau dan ada yang tidak mau kasih.

Hasil survei TII yang dirilis (27/2) menunjukkan polisi, tentara dan pengadilan merupakan lembaga yang paling korup. Memang hasil survei tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan, tetapi

tidak terlalu menggembirakan. Layanan pengadilan dianggap paling buruk. Komitmen untuk memberantas korupsi tinggi, tapi tak ditunjang realisasi. Namun kalangan pengusaha masih bersikap mendua dalam memandang tindak pidana penyuapan.

Peradilan meraih prestasi sebagai institusi paling aktif meminta suap kepada pengusaha. Survei yang dirilis ke publik itu, dilakukan September hingga Desember 2006, memilih responden pengusaha domestik dan asing.

Setelah pengadilan di peringkat paling atas menyusul Bea Cukai, Imigrasi dan DPRD. Para oknum di lembaga-lembaga tersebut dipandang memiliki inisiatif yang tinggi meminta suap. Sejumlah responden mengaku sering diminta uang pelicin dalam berinteraksi dengan institusi publik. (Gambaran prosentasenya dapat dilihat pada tabel).

Menjelaskan jenis suap yang terjadi di pengadilan, peneliti TII Frenky Simanjuntak, menyebutkan termasuk pengurusan perkara, pelayanan umum, dan pengadaan barang. Dia menambahkan, praktek suap di lembaga pengadilan dinilai secara umum berdasarkan persepsi pengusaha atas pengalamannya.

Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis, mengakui hasil temuan bahwa Peradilan memiliki inisiatif tertinggi dalam meminta suap ialah suatu hal yang menarik, walau secara pribadi dirinya tidak percaya seseorang bisa bertepuk sebelah tangan. “*It takes two to Tango*” ujarnya mengutip sebuah ungkapan terkenal. Menurutnya, praktek suap terjadi karena ada yang menawarkan, yakni para calo dan pengacara hitam.

Sumber *hukumonline* meragukan nilai presentase 100 persen tersebut, karena biasanya permintaan datang dari kedua belah pihak. “Bohong bila dikatakan inisiatif semua datang dari pengadilan” tandas pria yang berprofesi sebagai advokat itu. Sekedar gambaran, kalau perkara yang tipis, maka kebanyakan pengusahanya yang meminta. Dan hakim

biasanya menunggu didekati. Hakim tidak mau minta, karena menunggu tawaran yang terbaik. Tetapi, bila menurut hakim perkaranya kuat, maka hakimnya biasanya yang minta, lewat panitera.

Menurut Jubir MA, Djoko Sarwoko, hasil survei TII itu mungkin benar, mungkin tidak. Namun dia mengakui masih ada hakim yang bandel. Tetapi usaha memperbaiki sistem peradilan tampaknya masih mengalami banyak hambatan.

Deputi Pembinaan KPK Waluyo mengomentari hasil survei tersebut, mengatakan telah ada reformasi birokrasi yang dimulai di lembaga peradilan, tapi prosesnya lambat dan tidak jelas. Pada tanggal 22 Desember tahun 2005 Presiden datang ke MA untuk mencanangkan reformasi birokrasi, tetapi hasilnya belum banyak.

Ketua BPK Anwar Nasution menilai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, hingga saat ini belum mampu memicu efek jera di kalangan penyelenggara negara. Penegak hukum yang juga korup menjadi faktor yang sangat kuat mempengaruhi lambannya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Penegak hukum...sekali-sekali gantung dulu orang (koruptor-red) itu. Lihat Korea, dua presidennya, jenderal bintang empat masuk penjara,” kata Anwar kepada Maruwas dari *Berita Indonesia*.

Memperlihatkan mimik kecewa, Anwar bertanya, “apakah penegak hukum kita mengerti aturan?” Dia menunjuk MA yang jadi simbol penegakan hukum di negeri ini justru mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan melanggar UU. “Dia pungut itu duit dengan melanggar peraturan. Dia pakai sendiri dan dibagi-bagi sendiri,” kata Anwar menunjuk uang perkara yang dipungut MA, tetapi tidak disetor ke kas negara.

Menurut Ketua BPK tersebut, MA tidak berwenang mengelola sendiri uang perkara tanpa menyetornya ke kas negara. Kata Anwar DPR lah yang menentukan dari mana pendapatan negara. Di luar itu berarti melanggar hukum. ■ **MH, SH**

Perbandingan Interaksi Korup Tahun 2004 dan 2006

Institusi	Interaksi Korup 2004	Interaksi Korup 2006
1. Polisi	70%	55%
2. Militer	55%	53%
3. Peradilan	53%	51%
4. Badan Pertanahan	-	48%
5. DPRD	38%	43%
6. Bea Cukai	67%	44%

Sumber: TII diolah

Penegakan Hukum Tebang Pilih



ilustrasi: dendy

Penegakan hukum masih dilakukan dengan tebang pilih. Pencairan uang milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebesar 10 juta dollar AS melalui rekening pemerintah, yang diduga melibatkan nama Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menkum dan HAM Hamid Awaludin adalah buktinya. Demikian pula kasus dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Litbang Media Group Maret 2007 melakukan jajak pendapat umum untuk mengetahui opini 479 responden asal enam kota Makasar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan, tentang pemberantasan korupsi.

Media Group menanyakan pendapat responden, apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa pemberantasan korupsi sekarang ini cenderung tebang pilih. Artinya, beberapa orang diseret ke pengadilan, sementara beberapa lainnya bisa lepas dari jeratan hukum karena mendapat perlindungan politik dari pihak tertentu.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden 75% setuju pemberantasan korupsi tebang pilih. Lalu, 20 persen menjawab tidak setuju, dan lima persen sisanya menyatakan tidak tahu.

Ketika pertanyaan yang lebih spesifik diajukan lagi, apakah setuju dengan pernyataan, KPK yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi, juga cenderung tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya.

Hasilnya, sebanyak 71 persen responden menyatakan setuju, 22 persen tidak setuju, dan tujuh persen menyatakan tidak tahu.

Selain oleh survei, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Hukum Indonesia (GPHI), sudah meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu anggota GPHI, Hasanuddin Yusuf malah menegaskan KPK sebaiknya dibubarkan saja, bila keberadaannya menimbulkan resistensi dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Indikasi yang terdapat saat ini, banyak pelaku korupsi yang menjadi pesakitan KPK berasal dari mereka yang tidak punya posisi politik yang kuat, atau tidak memiliki relasi yang kuat dengan kekuasaan," cetus Hasanuddin, bersama GPIH berkunjung ke kantor *Media Indonesia*, Selasa (20/2).

Hasanuddin menilai, pejabat yang masih memiliki kekuasaan tidak tersentuh oleh KPK. Bila kecenderungan tebang pilih terus terjadi, kondisi tersebut

rawan dan dapat memunculkan konflik horizontal.

Sejumlah tokoh yang kini menjadi pesakitan karena diduga korupsi, atau sudah divonis korupsi, kental dengan posisi politik yang pernah atau sedang dijabatnya.

Sebut misalnya mantan pejabat dan menteri era Presiden Megawati Soekarno-poetri Theo F. Toemion (mantan Kepala BKPM), Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), Said Agil Husin Al-Munawar (mantan Menteri Agama), Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur), dan Widjanarko Puspoyo (mantan Dirut Bulog). Demikian pula dengan nasib kader Partai Golkar seperti Ali Mazi (Gubernur Sulawesi Tenggara) dan Syauckani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, menjawab pertanyaan *Berita Indonesia* mengatakan, prinsipnya partai itu mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan penegakan hukum yang konsisten.

"Tapi, harusnya Presiden konsisten dengan janjinya, dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum siapapun yang salah harus diproses. Di lingkungan Istana, dan jajaran birokrasi, sekarang harusnya ditindak kalau memang ada indikasi KKN, jangan malah dibiarkan saja apalagi yang sudah diperiksa KPK terus tanpa proses," kata Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan, dulu Presiden pernah berjanji akan bersih-bersih di lingkungannya dulu sebelum membersihkan di luar. "Ini yang banyak masyarakat bingung, kok tidak menyeluruh, dan merata sebagaimana janjinya."

Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo mengatakan, penanganan kasus korupsi terhadap sejumlah kader partainya sebagai tindakan tebang pilih dalam penegakan hukum. Banyak kader PDI-P, baik yang ada di DPRD maupun sebagai kepala daerah, harus menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang juga dilakukan anggota dari partai politik lainnya.

"PDI Perjuangan menilai rezim ini melakukan tebang pilih. Kita akan mem-bela karena masalah ini bukan menjadi persoalan hukum semata," kata Pramono.

Presiden RI periode 1999-2001, Abdurrahman Wahid, turut menegaskan belum ada kemajuan berarti dalam penegakan hukum di Indonesia. Kecuali telah terjadi tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Gus Dur mengatakan, keberadaan hukum tidak tegak di Indonesia. "Kalau



foto: berindo wilson

Perundang-undangan tentang KPK masih memerlukan perubahan.

ada penindakan, itu hanya tebang pilih,” tandasnya.

Ia menuding Mahkamah Agung (MA) terlibat dalam hal ini. “Padahal koruptor masih banyak berkeliaran di jalan-jalan. Apa ini tidak tebang pilih, ketua MA saja koruptor,” kata Gus Dur dengan gaya khasnya.

Gus Dur menyebutkan penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi yang tebang pilih terjadi sangat menonjol akhir-akhir ini, dan lebih banyak dilakukan terhadap pejabat atau mantan pejabat yang pernah dekat dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut contoh nama Rokhmin Dahuri, Said Agil Husin Al Munawar dan Wijdanarko Puspoyo.

“Yang lain dibiarkan saja enak-enakan. Yang lain itu adalah pelaksana hukum di negeri kita. Pelaksana hukum adalah Mahkamah Agung, ke bawah, pengadilan-pengadilan dan sebagainya. Hukum sama sekali tidak terlaksana. Hukum bisa diperjualbelikan,” ungkap Gus Dur.

Kasus dana nonbujeter yang terkumpul di Departemen Kelautan dan Perikanan era Menteri Rokhmin Dahuri hingga Freddy Numberi, jumlahnya tak kurang Rp 30 miliar.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dana sebesar itu dikumpulkan secara tidak sah dan penggunaannya melanggar undang-undang. Modusnya, dipungut dari Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), dan proyek pembinaan sarana DKP.

Sejumlah nama dan institusi sudah disebut-sebut sebagai penerima dana nonbujeter DKP ini, namun belum satu-pun diantaranya yang sudah disidik oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang diduga terlibat penerima dana korupsi. Hal ini semakin membuktikan kuatnya

aksi tebang pilih penegakan korupsi di negeri ini hingga detik ini.

Pada tahun 2003 terkumpul dana Rp 5.527.535.320 mengalir jauh ke sejumlah nama dan lembaga seperti Ketua Komisi Perikanan DPR Awal Kusumah, Pondok Pesantren Darul Falah, IPB Bogor, Muslimah NU, KNPI Banten, Kementerian Kebudayaan, HMI, ICMI, KAHMI, hingga Presiden Megawati Soekarnoputri dan suami Taufiek Kiemas.

Kemudian selama tahun 2004 terkumpul dana Rp 7 miliar mengalir ke kocek Saifullah Yusuf, Slamet Effendi Yusuf, Anthoni Amir, Sarwono Kusumatmadja, Ketut Nurjana, anggota DPR Komisi III, PPP, Golkar, Komunitas Koperasi Masyarakat Pinggiran, majalah Tokoh, IPB, Bpk Aman, Partai Sarekat Islam, HMI, LDNU, Gowa Mataram, KAMI, dan BEM IPB. Bahkan, hanya dua hari setelah pergantian Menteri dari Rokhmin ke Freddy sudah keluar uang Rp 200 juta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Menteri.

Selama era Menteri Freddy pungutan dana nonbujeter DKP ini masih berlanjut, penerimanya antara lain Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD), Kongres Muslimat NU di Batam, Konvoi Mudik Lebaran PDI Perjuangan, sampai ke biaya pengadaan peralatan rumah dinas Menteri, *open house* Natal dan Tahun Baru 2005, serta biaya ongkos jahit pakaian Menteri.

Menanggapi sinyalemen Gus Dur, telah terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidique mengandaikan, kalau ada 1.000 kasus, sementara tenaga penegak hukum cuma bisa mengerjakan seratus selama setahun, berarti memang harus tebang pilih.

“Masalahnya bukan pada ada tidaknya tebang pilih, tapi cara memilihnya bagaimana. Itu yang menjadi soal. Memilihnya

mulai dari yang mana. Jangan memilih dari yang mudah-mudah saja. Tapi justru yang strategis. Bagaimana cara memilihnya, dan apa kriterianya, ya itu yang harus disesuaikan dengan keinginan publik. Yang tidak betul adalah bila memilihnya sesuai selera kekuasaan. Memilihnya jangan karena selera, tetapi karena obyektifitas, misalnya yang tingkat kerugiannya paling tinggi,” ungkap Jimly.

Hal senada disampaikan Hendarman Soepandji, Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Menjawab pertanyaan *Berita Indonesia* usai menghadiri acara peluncuran Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Kamis (19/4), Hendarman mengatakan pihaknya tidak melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi.

“Tebang pilih itu, kalau ada lima tersangka, yang disidik hanya tiga, itu baru tebang pilih,” tukas Hendarman, yang masih menjabat Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Janji SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menegaskan, pemerintah sama sekali tidak akan pilih kasih dalam memberantas korupsi yang sering disebut dengan istilah “tebang pilih”.

Apalagi terhadap kasus-kasus korupsi berskala besar yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat, Presiden memastikan pemerintah tidak akan bersikap pilih kasih.

Karena itu, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan agar jangan salah bertindak.

Untuk memperkuat komitmen memberantas korupsi, dan dalam rangka meningkatkan citra bangsa dan negara kepada dunia internasional, kata Presiden, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Pemerintah juga terus meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah terjadi, serta bersinergi dengan KPK, sebagai badan independen yang berada di luar pemerintah.

Sambil memerangi tindak pidana korupsi pemerintah juga terus melakukan tindakan pencegahan, terutama membenahi birokrasi dan memperbaiki gaji aparaturnya. Perbaikan sistem birokrasi dilakukan dengan lebih berorientasi pada prestasi dan kinerja.

Presiden mengatakan, reformasi ini sejalan dengan reformasi sistem pengelolaan keuangan negara. ■ HT, SH

WAWANCARA

Junino Jahya

Banyak Kendala Membelit KPK

foto-foto: berindo wilson

Gagalnya pembentukan pemerintahan yang bersih dari korupsi, disebabkan banyaknya potongan teka-teki (*puzzle*) penegakan hukum yang hilang. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat sekaligus menyambung mata rantai yang putus, ternyata belum benar-benar cocok. Penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian yang tetap berperan penting di samping KPK, justru menjadi salah satu potongan teka-teki tersebut. Potongan-potongan lainnya adalah sistem perundang-undangan dan komitmen. Berikut ini kutipan wawancara wartawan Berita Indonesia, Maruwasas, dengan Junino Jahya, Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Setelah tahun berdiri, ternyata KPK belum memberikan dampak langsung terhadap menurunnya kasus-kasus korupsi. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi?

Pertama, kendala internal. Dari segi sumber daya yang terbatas. Itu sebetulnya bisa ditutupi kalau aparat penegak hukum yang lain bisa membantu. Kenyataannya, kepolisian dan kejaksaan menghadapi

kesulitan hingga saat ini. Terlepas dari integritas anggotanya, beban mereka juga sangat banyak dalam penyelesaian kasus-kasus pidana umum. Sendainya kepolisian dan kejaksaan di daerah meningkatkan proporsi pemberantasan korupsinya, itu akan sangat membantu.

Kedua, kendala eksternal. Adanya *corruptor sideback* (serangan balik). Jadi kita direpotkan dengan adanya *judicial*

review, adanya pendapat-pendapat di media yang menyerang. Ini menambah beban psikologis dan psikis bagi kita, karena kita harus melayani orang yang menuntut lewat perdata atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketiga, dari sisi UU. Misalnya, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pejabat memang wajib melaporkan kekayaannya tetapi tidak ada sanksi hukumnya. Kalau dia tidak melaporkan atau ada keanehan di dalamnya, tidak ada sanksi hukumnya. Di samping itu, UU pembuktian terbalik misalnya belum ada. Demikian juga dengan UU perlindungan saksi sudah ada tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada, bahkan lembaga perlindungan khusus yang diatur dalam UU itu, juga belum ada. Padahal kita sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Bagaimana masyarakat mau berperan serta kalau tidak dilindungi.

Dari sisi sumber daya manusia, kendala paling signifikan seperti apa?

Pertama, kita menghadapi kendala

sumber daya manusia karena keterbatasan tempat. Kalau kita mau merekrut tenaga 100 orang, misalnya, mau kita taruh dimana? Tempat kita terbatas. Kedua, di UU tentang KPK mengamanatkan bahwa penyidik hanya bisa dari kepolisian dan kejaksaan. Sementara kepolisian dan kejaksaan sendiri punya keterbatasan, tentunya orang-orang terbaik akan mereka manfaatkan sendiri. Kalau dibuka peluang non polisi dan jaksa menjadi penyidik, prediksi kita, akan membuat KPK lebih berdaya.

Tetapi bukankah penyidik membutuhkan keahlian khusus?

Tidak juga. KPK tidak boleh mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Pekara (SP3). Berarti, kalau sudah berada dalam tahap penyidikan harus sampai pada tahap penuntutan. Strategi yang kita lakukan, penyidikannya yang kita intensifkan. Ternyata, penyidik-penyidik kita mampu. Buktinya, semua (dugaan kasus korupsi-red) yang sudah masuk proses penyidikan, tidak ada yang tidak masuk ke tahap penuntutan. Berarti para penyidik kita sudah mampu menjadi penyidik. Akan tetapi, karena penyidik kita terbatas (hanya menggunakan polisi dan jaksa-red), kasus yang bisa kita sidik juga terbatas.

Dari sisi perundang-undangan, kendala apa yang mengangjal tugas KPK?

Selain sumber daya penyidik, KPK juga terkendala dengan UU tentang Kerahasiaan Bank. Dalam UU tersebut tidak dicantumkan bahwa KPK bisa menembus kerahasiaan bank, walupun diatur bahwa perbankan harus bekerja sama dengan KPK. UU perpajakan juga demikian. Data-data perpajakan sangat bermanfaat buat kita, karena berhubungan langsung dengan LHKPN. Juga ada aturan yang mengamanatkan bahwa KPK bisa menyita, tetapi tidak bisa menggeledah. Artinya, kalau menggeledah harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri (PN). Selama ini memang tidak ada kendala yang berarti untuk mendapatkan izin dari PN, cuma agak unik karena bisa menyita tetapi tidak bisa menggeledah.

Apakah KPK sudah mengajukan pentingnya revisi UU KPK?

Secara formal, kita tentunya tidak bisa, karena itu domain eksekutif dan legislatif. Tetapi, secara informal kita sudah mengajukannya berkali-kali, baik kepada Presiden maupun Komisi III DPR. Dalam setiap kali pertemuan, semisal Rapat Dengar Pendapat (RDP), kita sampaikan itu, tapi sampai saat ini belum terwujud. Bahkan dari awal KPK berdiri pun, begitu

menemukan kendala-kendala, sudah kita sampaikan. Hanya saja, kita tidak menunggu itu dalam bekerja.

Apakah KPK menyadari bahwa di mata masyarakat KPK itu sangat hebat. Dan itu berbahaya jika kelak KPK tidak mampu mewujudkan harapan itu?

Oh ya. Harapan masyarakat terlalu besar mengakibatkan mereka melihat apa yang dilakukan KPK sangat kecil. Tapi, di jaman sebelum KPK, ada *nggak* gubernur masuk penjara, bupati masuk penjara, mantan menteri dan mantan hakim atau mantan panitera masuk penjara?

Bagaimana tanggapan KPK pada putusan hakim yang ringan. Contohnya mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna A.F yang divonis kurang dari tiga tahun penjara?

Tapi yang seperti ini hanya kasus Suwarna A.F saja. Kasus-kasus lain, umumnya, justru para terdakwa tidak mau naik banding. Karena kalau naik banding, hukumannya justru ditambah oleh Pengadilan Tinggi, dan ditambah lagi oleh Mahkamah Agung. Banyak di antara terdakwa yang kita bawa ke pengadilan, menyerah ketika putusan pengadilan negeri dijatuhkan.

Bagaimana pandangan KPK terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)?

Kendalanya juga ada. Majelis Tipikor cumadua, dan adanya hanya di Jakarta Pusat. Bayangkan ketika kita menangani kasus Bupati Dompu dan Gubernur Aceh, kita harus membawa saksi dan dokumen dari sana. Kita tidak bermaksud agar Pengadilan Tipikor ada di sana, tetapi misalnya majelisnya bisa ditambah. Bayangkan dua majelis, masing-masing lima hakim, menangani sekian puluh perkara. Tahun lalu, KPK mengajukan 27 kasus. Mana ada Pengadilan Negeri yang mampu menyelesaikan kasus korupsi sebanyak itu. Jadi kita bisa sidang sampai malam. Dalam satu hari, satu majelis bisa sampai tiga kali sidang. Itu luar biasa, tetapi katanya justru mau dihapus.

Sebagai lembaga yang paling diharapkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, apakah penyidik-penyidik KPK sendiri bersih dari korupsi?

Namanya manusia, saya tidak bisa mengatakan begitu (bersih dari korupsi-red). Kita menjaga dan mencegah supaya itu tidak terjadi. Kita *kan nggak tau* isi hati orang. Untuk mencegahnya, kita buat aturan, batasan, kode etik, dan aturan pegawai. Bahwa dari situ masih ada yang



lolos, itu manusiawi sekali.

Dalam mempekerjakan penyidik Polri dan Kejaksaan di KPK, bagaimana prosedurnya?

KPK meminta kepada Polri dan Kejaksaan dengan kriteria tertentu, lalu diuji. Kita membutuhkan penyidik dengan kriteria lebih. Jadi dalam tes tersebut, tidak semua lolos. Misalnya, beberapa waktu lalu ada 20 jaksa yang direkomendasikan Kejaksaan, yang lolos hanya 4 orang.

Terbangunnya mafia peradilan membuat pemberantasan korupsi semakin sulit. Sudah sejauh mana langkah KPK memberantas korupsi di lingkungan penegak hukum?

Kita akan berjalan terus. Sampai saat ini, sudah beberapa kasus gratifikasi (suap di kalangan penegak hukum-red) yang berhasil dibongkar KPK. Tetapi harus diakui, membuktikan tindak pidana gratifikasi itu sangat sulit. Bagaimana kalau hal itu terjadi di kamar hotel, kita tidak tahu. Kita tidak bisa membuktikan, kecuali tertangkap tangan. Di sinilah peran serta masyarakat. Terbongkarnya penyuapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh pengacara Abdullah Puteh, misalnya, semata-mata karena laporan masyarakat—sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang melapor. Tapi laporannya sangat akurat dan langsung kita tindak lanjuti, *Alhamdulillah* berhasil.

Apa resep jitu yang akan digunakan KPK dalam memberantas mafia peradilan ini?

Kita terlebih dahulu mempelajari pola-pola kerja mereka (para penegak hukum-red). Lalu kita menunggu momentum untuk menangkap mereka. Di sinilah perlunya peran masyarakat. ■ **MH, SH**



Tindak pidana gratifikasi membutuhkan sistem pembuktian terbalik.

foto: berindo wilson

Perlu Pembuktian Terbalik

Kendala utama dalam pemberantasan korupsi di mana pun, minimnya bukti-bukti yang dimiliki penyidik maupun penuntut untuk mendakwa seseorang menjadi tersangka. Banyak negara menyiasatinya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian terbalik yang digunakan banyak negara, terbukti sangat efektif membantu penegak hukum membongkar kasus-kasus korupsi. Selebihnya penerapan sistem pembuktian terbalik juga sangat berperan untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara. Namun Indonesia, menurut versi PERC, negara terkorup kedua di dunia, justru tidak menggunakan sistem tersebut hukum pidana, khususnya dalam UU Pemberantasan Korupsi.

Padahal penerapan sistem pembuktian terbalik justru merupakan salah satu aspek penting reformasi hukum yang diperjuangkan kelompok pro-reformasi sejak tahun 1998. Hampir satu dasawarsa gaung reformasi hukum berlalu, produk-produk hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan pasca reformasi, tetap menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Kegagalan Indonesia dalam membangun prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagian besar karena tiadanya sistem pembuktian terbalik. Padahal sistem pembuktian terbalik sangat relevan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 poin 2 UU No. 28 Tahun 1999. Di situ dinyatakan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Walaupun pengaturan itu sudah ada, namun jika penegak hukum tidak dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara tentang peningkatan kekayaan yang dianggap tidak wajar,

maka pendaftaran kekayaan pejabat tetap tidak bermanfaat mencegah tindak pidana korupsi. Tidak mengherankan jika perilaku korupsi di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, walaupun setiap tahun KPK melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Misalnya, dalam LHKPN tahun 2006, KPK mengumumkan laporan harta kekayaan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra yang meningkat sangat signifikan. Namun dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, KPK justru tidak diberi wewenang untuk meminta pertanggungjawaban Mensesneg tentang bagaimana harta kekayaannya meningkat begitu mengejutkan.

Tiada sistem pembuktian terbalik dalam UU Pemberantasan Korupsi, menurut Direktur Gratifikasi KPK, Lambok H. Hutauruk, membuat penegak hukum-khususnya KPK, kesulitan membongkar kasus-kasus suap yang terjadi di jajaran birokrat pemerintah dan penegak hukum.

Hutauruk mengungkapkan hal itu di depan ratusan perwira TNI di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Rabu (18/4), ketika menjawab pertanyaan seorang perwira perempuan yang mengusulkan adanya sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara. Pada acara Sosialisasi Gratifikasi dan Gerakan Antikorupsi tersebut, Hutauruk juga berharap diterapkannya sistem pembuktian terbalik.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur satu pasal pun tentang pembuktian terbalik kecuali pada Pasal 12 ayat 1a. Pasal tersebut berbunyi "*yang nilainya Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*"

Sementara Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Juninal Jahya, kepada *Berita Indonesia* (19/4) menegaskan perlunya sistem pembuktian terbalik dimasukkan dalam perundang-undangan tentang korupsi. Menurutnya, sistem pembuktian terbalik akan sangat membantu penegak hukum dalam mengungkap dugaan kasus korupsi.

Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Police Wach Eri Sudrajad. Dia mengakui, salah satu faktor yang memicu kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena tidak digunakannya sistem pembuktian terbalik. "Kalau penyelenggara negara memiliki kewajiban membuktikan sendiri dari mana sumber kekayaannya, maka penegak hukum akan dengan mudah mengetahui apakah kekayaannya berasal dari korupsi atau tidak," kata Eri kepada *Berita Indonesia*. ■ **MH, SH**

Reformasi Proses Hukum

Perilaku yang cenderung korup memicu kegagalan polisi dan jaksa dalam mengemban amanat pemberantasan korupsi.

Polisi dan Jaksa diakui sebagai pemeriksa dan penyidik oleh UU Anti Korupsi. Tetapi untuk menembus kegagalan polisi dan jaksa, masih diperlukan kehadiran lembaga *superbody* penegak hukum yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di dalam menyidik kasus-kasus korupsi yang tumbuh ibarat jamur di musim hujan.

Kemungkinan kegagalan tersebut lebih ditekankan pada aspek moralitas dan integritas, bukan pada aspek kemampuan profesional polisi dan jaksa. Hal ini jelas tergambar pada beberapa pasal UU tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi (No. 30/2002). Misalnya, Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Enam kemungkinan yang membolehkan KPK mengambil alih penyidikan dan penuntutan, seperti yang diatur dalam pasal 9. Keenam alasan tersebut, (1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. (2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. (4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. (5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. (6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Heri Sudrajat mengingatkan kehadiran KPK harus menjadi cambuk bagi kepolisian untuk mengembangkan profesionalitas, moralitas, dan integritas sebagai penegak hukum. Kata Heri, ini harus jadi momentum bagi aparat kepolisian untuk membenahi diri, sehingga mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai penegak hukum yang punya kemampuan dan integritas seperti dimiliki KPK.

“Sebab hanya dengan cara itu polisi

mampu mempertahankan posisi strategisnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Heri kepada Maruwas dari *Berita Indonesia* (19/4).

Heri meminta perhatian polisi, meskipun kehadiran KPK tidak mereduksi kewenangannya di dalam menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, lembaga tersebut harus merebut kembali kepercayaan masyarakat dengan mencetak prestasi spektakuler, seperti mengungkap kasus-kasus korupsi yang dikendaki masyarakat.

Menurut Heri, lembaganya mengamati bahwa memburuknya citra polisi di mata publik berkaitan erat dengan problem kerangka hukum di Indonesia, bukan dari UU, tetapi pelaksanaan di lapangan. Khususnya, polisi dan jaksa punya parameter masing-masing tentang sebuah perkara korupsi.

Misalnya, ketika kepolisian menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan sudah selesai, kejaksaan justru mengembalikan dan menyuruh polisi menyempurnakan berita acara pemeriksaan (BAP). Proses ini tidak hanya sekali, tetapi bisa berkali-kali. Proses seperti ini, menurut IPW, menghambat pengungkapan banyak perkara korupsi.

Di tengah jalan, dalam proses bolak balik antara polisi dan jaksa, muncul berbagai masalah. Menurut pengamatan IPW, ini memberi waktu dan peluang yang besar bagi semua pihak, baik aparat kepolisian, aparat kejaksaan dan pelaku untuk bermain mata atau *kongkalikong*.

“Pelaku memiliki kesempatan mendorong kepolisian untuk menggunakan pasal-pasal tertentu, yang bertujuan membuat sumir atau yang tidak relevan. Akhirnya terbit Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3). Atau perkaranya sengaja diendapkan dan dipetieskan,” kata Heri.

Heri memberi indikasi bahwa hal seperti itu menjatuhkan citra polisi di mata publik. Karenanya, dia menyayangkan tiadanya langkah-langkah revolusioner yang diambil oleh pimpinan Polri untuk memperbaikinya. Kata Heri: “Tidak jarang pimpinan Polri bagian dari permasalahan.”

Dia memberi contoh, usai dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutanto, mengung-



kapkan adanya 12 perwira tinggi Polri yang memiliki rekening miliaran rupiah. Banyak kalangan menduga uang itu diperoleh dari praktik penyucian uang alias *money laundering*. Tetapi sampai kini, kata Heri, janji Sutanto untuk menuntaskan hal itu menguap di tengah jalan.

“Upaya polisi membangun citra baru sebagai Polri yang independen dan profesional, jelas tidak tampak dalam kasus ini,” kata Heri. Tetapi dia menghargai langkah-langkah Sutanto dalam hal

m di Kepolisian



ilustrasi: dendy

pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Pemeriksaan dan penuntutan terhadap tiga perwira tinggi Polri yang terkait kasus pembobolan BNI, diharapkan menjadi pembelajaran bagi oknum-oknum kepolisian lainnya.

Pembersihan di Semua Lini

Menurut Heri kepercayaan publik menipis. Publik cenderung menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri. Survei yang dilakukan *Kompas*, hanya 27%

responden mengadukan masalah mereka ke polisi. Hasil survei ini mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap polisi.

Pendongkrakan citra polisi, kata Heri, harus dilakukan menyeluruh dan revolusioner, bukan sekadar menyelidiki dan menyidik tindak korupsi yang dilakukan perwira tinggi. Mengutip hasil penelitian PTIK angkatan ke 39-A, Heri mengatakan: "Kenyataannya, polisi melakukan korupsi di semua proses hukum." Heri memberikan buku berjudul: Polri dan

KKN, kepada BI.

Beberapa contoh tindak penyimpangan yang dilakukan aparat kepolisian yang dipaparkan di dalam buku tersebut:

Satuan Reserse-Kriminal: Perilaku KKN oknum kepolisian, berupa penyimpangan prosedur penangguhan penahanan, rekayasa dalam penanganan/penindakan *illegal logging*, kolusi dalam penyelenggaraan perjudian (toto gelap), penyimpangan prosedur pinjam pakai barang bukti, penyimpangan dalam penanganan kasus Narkoba, penyimpangan dalam penanganan kasus Depo BBM ilegal, penyimpangan proses penyidikan kasus pidana, dalam rangka pengelolaan kegiatan prostitusi, terjadinya sindikat tindak pidana bidang pertanahan, serta penyimpangan dalam penyelidikan dan penyidikan peredaran VCD bajakan.

Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam): Perilaku KKN oknum polisi, antara lain, praktik pungutan liar dalam penerbitan surat izin keramaian dan usaha hiburan, praktik intimidasi dan kolusi dalam penanganan tenaga kerja asing, kolusi antara pengelola perjudian dan pejabat Satuan Intelkam, penyalahgunaan wewenang dalam penanganan tindak pidana umum.

Satuan Samapta: Perilaku KKN oknum terjadi dalam penyimpangan pelaksanaan patroli polisi, penanganan *illegal logging*, perlakuan diskriminatif petugas terhadap tahanan dan keluarganya, pungutan liar (Pungli) atas laporan dan pengaduan masyarakat, Pungli dalam penyeberangan (kapal ferry) angkutan truk, penyimpangan dalam pengamanan proses ekspor dan impor.

Satuan Lalu Lintas: KKN terjadi dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyimpangan pada proses pinjam pakai barang-barang bukti dengan jaminan uang, penyimpangan pada proses tindak lanjut perkara kecelakaan Lantas dengan korban meninggal dunia, penyimpangan dalam prosedur pembuatan SIM dan STNK, penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Satuan Fungsi Pembinaan Personil: KKN berlangsung dalam penempatan personil Polri pada tingkat Polres, pengusulan pendidikan, pelaksanaan seleksi Bintara Polri, pengeluaran tambahan siswa Secapa Polri, penegakan hukum oleh pengembalian fungsi *Provoost*, penangguhan penahanan, dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Polri Soekanto.

Satuan Fungsi Pembinaan Sumber Daya: Perilaku KKN oknum polisi berlangsung dalam kegiatan pendistribusian BBM, proses sewa menyewa tanah milik Polri, sistem distribusi anggaran, dan proses penggunaan dan penghunian rumah dinas. ■ MH, SH

Dalam usia belia, 20 tahun, maut menjemput Cliff Muntu, praja tingkat II Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Manado, pada menit-menit lewat tengah malam 2 April 2007. Malam itu, Cliff bersama 12 praja junior lainnya, dipanggil mendadak oleh para praja senior (tingkat III), anggota kelompok Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka). Ke 12 praja tersebut harus menghadap anggota Pataka—pembawa panji-panji IPDN—di Barak DKI Jakarta, pukul 22.30 WIB.

Dari 12 praja yang dipanggil, 4 orang, termasuk Cliff, datang lewat jam yang ditentukan. Soalnya, mereka kelelahan lantaran baru saja selesai latihan *drum band*. Namun panggilan para “algojo” itu tidak boleh diabaikan sedikit pun. Datang melewati jam yang sudah ditentukan sama artinya menyepelkan “kegiatan pembinaan” yang dikeramatkan di kampus pencetak pelayan publik tersebut. “Sebab di situ diberikan doktrin dan pembentukan fisik,” kata Nur Kholim, pengacara para terdakwa, kepada *Tempo* (22/4).

Prosesi penyiksaan dimulai dengan penutupan mata Cliff dan ketiga rekannya, kemudian perut mereka dipukul dan ditendang. Pada keheningan malam, para algojo itu melakukan upacara penyiksaan di pojok barak tersebut. Cliff yang menyandang jabatan “polisi kampus” ambruk, namun para algojo itu masih menendang dan menginjak perutnya. Cliff pingsan, tidak bergerak, detik-detik kemudian menghembuskan nafas terakhir.

Para algojanya panik, memanggil ambulans klinik. Tetapi karena sedang digunakan, ambulans itu baru datang pukul 2.00 dinihari. Jenazah Cliff dibawa ke RS Al-Islam, Sumedang, Jawa Barat. Dini hari itu, kampus IPDN geger. Kekerasan kembali menelan jiwa praja seperti yang terjadi pada Wahyu Hidayat, 9 September 2003.

Menurut hasil otopsi yang dilakukan oleh Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS Hasan Sadikin, Bandung, Noorman Heriyadi, Cliff mengalami perdarahan di jantung, limpa, ginjal, otak dan daerah alat vital.

Koran *Tempo* (8/4) melaporkan, polisi sudah menahan tujuh tersangka penganiaya Cliff, yaitu M. Amrullah, A. Bustanil, Fendi Tobuo, Jaka Anugrah Putra, Frans Albert Yoku, Hikmat Faisal dan Ahmad Harahap. Mereka juga dipecat dari IPDN. Selain itu, Depdagri memberhentikan Dekan IPDN, Prof. Lexy Dirot yang diduga memerintahkan penyuntikan formalin pada mayat Cliff.

Ketika Wahyu tewas tahun 2003, kampus itu masih bernama STPDN. Kematian Wahyu memaksa Departemen Dalam Negeri melebur STPDN dengan Institut

Praharah di IPDN Pa

Kematian Wahyu Hidayat, praja junior STPDN, tidak memberi pelajaran, hampir sama, kematian Cliff Muntu akibat penganiayaan berat, sehingga membekukan IPDN J

Ilmu Pemerintahan (IIP) Pasar Minggu, Jakarta. Namanya berubah menjadi IPDN. Rupanya penggantian nama tidak mengubah watak kekerasan warisan STPDN yang pembentukannya digagas tahun 1989, sebelum gedungnya di Jatiningor selesai dibangun, 1992. Sebanyak 500 praja STPDN dititipkan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang dan Malang. Tahun 1992, mereka dipindahkan ke kampus STPDN Jatiningor, Sumedang, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Dosen senior IPDN Inu Kencana, seperti dikutip *Republika* (12/4), menyingkapkan, peleburan itu tidak banyak membawa perubahan, malahan menciptakan suasana yang lebih buruk. Inu yang sempat diskors petinggi IPDN karena bicara di pers soal kebobrokan kampusnya, mengatakan bahwa kekerasan dan penyalahgunaan obat (Narkoba) meningkat, dan hubungan seks bebas semakin marak. Fakta-fakta ini, kata Inu, selalu ditutupi.

Menurut Inu, data kasus kematian praja akibat kekerasan yang sempat muncul di pers hanya 27% dari total kekerasan yang menelan korban. Mantan Kepala Bidang Pengasuhan IPDN angkatan pertama itu mengungkapkan, selama tahun 1993-2007, tercatat 35 mahasiswa STPDN/IPDN yang tewas karena kekerasan.

Berita utama halaman satu *Republika*, mengutip tuduhan Inu di depan DPR (11/4), bahwa para petinggi IPDN telah menghilangkan data tiga praja yang diduga meninggal karena disiksa. Mereka, praja madya Fahrudin (Jateng, 1997), praja madya Gatot (Jatim, 1994), dan praja madya Edy (1999).

Tajuk *Media Indonesia* (12/4), bermacam kekerasan di IPDN dan menyarankan kampus itu ditutup saja. Dalam nada sangat keras, MI menulis, seribu kali rektornya diganti, sejuta kali rektornya dinonaktifkan, tidak akan mengubah kultur kekerasan bahkan pembunuhan yang telah tumbuh subur di IPDN. Sejuta kalipun nama institut itu diubah tidak akan mengubahnya menjadi institut yang beradab. Sebab lembaga itu dari asalnya sudah salah cetak biru. Ia cacat bahkan sebelum lahir.

Kisahnyanya berawal dari gagasan bekas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Pur) Rudini yang diangkat Pak Harto menjadi Menteri Dalam Negeri. Sang



jenderal, tulis *MI*, menilai jajaran aparat pamong praja (pemerintah) tidak memiliki disiplin, bahkan tidak memiliki watak kepemimpinan. Untuk menghasilkan pamong praja yang berdisiplin tinggi dan berkepemimpinan kuat, Rudini mendirikan lembaga pendidikan bergaya militer. Mereka jelas bukan tentara untuk bertempur, tetapi juga bukan sipil untuk melayani rakyat.

Dengan nada sinis, *MI* menutup tajuknya yang ditempatkan di halaman depan; zaman sudah berubah, dari supremasi militer ke supremasi sipil. Konsep praja sudah berubah dari memerintah menjadi melayani. Dari disiplin militer menjadi disiplin sosial. Namun lembaga yang menghasilkan pamong praja itu, pada dasarnya, tetap tidak berubah dari gagasan kelahirannya oleh Jenderal Rudini: disiplin militer di atas segalanya. *MI* melesekan nama IPDN sebagai akronim dari Institut Pembunuhan Dalam Negeri.

Karenanya, menurut *MI*, untuk menutup IPDN tidak diperlukan secuil pun keberanian. Yang diperlukan hanya secuil kejujuran untuk mengakui bahwa institut itu telah menjadi sekolah yang menghasilkan para pembunuh.

Dalam berita utama halaman depan *MI* (17/4) mengutip surat edaran Menteri Dalam Negeri (No.892.22/803/SJ) yang

Cliff Kematian Cliff

belajaran bagi sekolah tinggi ilmu pemerintahan itu. Kisah yang menimbulkan kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jatinangor selama satu tahun.



foto: repro tempo

meminta para gubernur, bupati dan wali kota tidak lagi mengirimkan siswa utusan daerah mereka untuk menjadi praja IPDN. Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden agar tahun ini tidak dilakukan seleksi calon praja IPDN. Apakah ini awal dari pembubaran IPDN?

Kompas (17/4) mengutip penegasan Ryaas Rasyid, mantan Rektor IIP yang dipercayakan memimpin Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN, bahwa evaluasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut tidak diarahkan pada opsi pembubaran. Dalam proses evaluasi itu, menurut Ryaas, seluruh civitas akademika IPDN diimbau bersikap terbuka dan jujur.

Kata Ryaas kepada koran sangat berpengaruh dan beredar luas ini, yang jelas tim yang dipimpinnya tidak ditugasi untuk membubarkan IPDN. Tim evaluasi mulai mengumpulkan fakta, melakukan tukar pikiran dengan pihak-pihak IPDN. Tim yang beranggotakan 9 orang itu, dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok pendidikan, pengajaran dan pelatihan; kelompok manajemen; dan kelompok mahasiswa.

“Jika civitas akademika IPDN, terutama mahasiswa, tidak jujur dan tidak terbuka, tim bisa menemui jalan buntu. Tim harus menguak tuntas hingga ke akar per-

masalahan tentang bagaimana sistem itu dilakukan,” kata Ryaas kepada *Kompas*.

Namun kepada *MI* (12/4), Ryaas mengatakan semua pimpinan, pendidik dan pengawas IPDN harus dipindahkan dari situ agar sistem baru bisa diterapkan. “Kalau mereka tidak dikeluarkan sistem baru tidak akan berjalan,” kata Ryaas. Mantan rektor IIP yang kini anggota DPR, menyatakan setidaknya-tidaknya 100 orang yang terdiri dari pimpinan, pendidik, dan pengawas IPDN harus diganti.

Pada edisi sebelumnya (9/4), *Kompas* menempatkan kasus kematian Cliff sebagai berita utama di halaman depan, memberinya judul: *Kasus IPDN Tidak Bisa Ditoleransi*, dengan anak judul: *Cliff Muntu Korban Kegiatan Organisasi Tersembunyi*.

Koran ini mengutip penjelasan Presiden yang mengedepankan keprihatinan dan penyesalannya atas terjadinya kembali kekerasan di IPDN Jatinangor. “Atas kejadian itu tidak ada toleransi lagi,” kata Presiden Susilo.

Kompas juga mengutip saran Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud agar IPDN ditutup saja. Alasannya, selain menyalahi ketentuan pendidikan nasional, juga telah menimbulkan keresahan luar biasa bagi orang tua mahasiswa. “Banyak orang tua terpaksa menarik anaknya dari sekolah itu karena tidak tahan disiksa, banyak yang cacat fisik. Jadi saya mendukung supaya ditutup saja. Tidak ada gunanya,” kata Aksa seperti dikutip *Kompas*.

Sedangkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta lembaga pendidikan tersebut dirombak total. Jika dengan perombakan tidak juga berhasil, maka sebaiknya dibubarkan saja.

Tinjau Tempat Angker

Sejarah kelam STPDN bertahun-tahun, terungkap tuntas sejak kematian Wahyu, praja asal Bandung, yang tewas akibat disiksa para seniorinya dari kontingen yang sama. Satu dari penyiksa Wahyu, Sandra Rahman, baru ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Sumedang di Bandung. Padahal hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tahun 2003, menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara pada Sandra yang menjabat ajudan Sekretaris Daerah Jabar. Begitu digelandang ke rumah tahanan, jabatan Sandra dicabut. Sudah 10 praja terpidana kasus tewasnya Hida-

yat, saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

H. Syarif Hidayatullah, orang tua mendiang Wahyu Hidayat, seperti dikutip *Republika*, mendesak pemerintah mengubah sistem di jajaran IPDN. “Agar kekerasan tidak terus terulang, maka sistem di IPDN harus diubah total,” kata Syarif seperti dikutip *Suara Pembaruan*.

Syarif mengecam kebohongan publik yang dilakukan pengadilan saat proses hukum berjalan terhadap para terdakwa kasus penganiayaan Wahyu. Jaksa Penuntut Umum Muhasan SH, menuntut tiga terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. Namun hakim memvonis mereka hanya antara 8 sampai 10 bulan penjara. Ketiga terdakwa tidak dipenjara, melainkan dapat menghirup udara bebas dengan alasan hanya berstatus tahanan kota.

Pihak IPDN ketika itu menyatakan akan memecat tiga terdakwa, ternyata melakukan kebohongan publik, sebab mereka tidak dipecat. Sandra baru dijabarkan ke dalam penjara setelah heboh kasus kematian Cliff. “Bagaimana hukum mau ditegakkan jika menghilangkan nyawa hanya dihukum 8-10 bulan penjara. Mereka pun tidak ditahan, karena alasan hanya dikenakan tahanan kota,” kata Syarif.

Wahyu bukanlah korban pertama. Jauh sebelumnya, nasib serupa juga menimpa Aliyan Jerani (1993), Wirawan Nurman (1999) dan Eri Rahman (2000). Tabir yang selama ini membungkus praktik premanis pun terungkap. Begitu terbuka, pemerintah waktu itu mengambil beberapa langkah. Selain memberhentikan Sutrisno sebagai Ketua STPDN, pemerintah juga membentuk tim independen dan menggelar psikotes untuk seluruh praja STPDN.

Menurut SP, Sutrisno diberhentikan sebagai pelaksana harian, diganti I Nyoman Sumaryadi. Dia mendapat tugas membersihkan sekolah itu dari citra kekerasan. Langkah awal yang dia lakukan menggabung STPDN dan IIP. Nyoman yang tadinya menjadi Ketua IPDN kemudian ditunjuk menjadi Rektor, mempunyai misi mengakhiri kekerasan di kampus tersebut.

Rupanya kultur kekerasan yang terbentuk di kampus ini sudah sedemikian kuat. Nyoman bahkan larut dalam sistem tersebut sampai Cliff jatuh jadi korban. Nyoman, semula berusaha menutupi sebab kematian Cliff. Namun dua hari kemudian muncul pengakuan lima nindya praja yang sempat memukul Cliff sebelum meninggal. Pengakuan itu disampaikan di dalam pemeriksaan di Markas Polisi Resort Sumedang.

Namun Nyoman masih berupaya meyakinkan publik bahwa pembinaan di kam-



BI menaruh curiga, jangan-jangan disadari atau tidak, IPDN telah mengadopsi fasisme sebagai ideologi yang membentuk kesadaran kolektif praja. Tampaknya perlu ada studi komprehensif terkait melembaganya budaya kekerasan di IPDN, baik dari tinjauan historis, sosiologis maupun psikologis. Hasil studi itu bisa dijadikan rujukan bagaimana memperlakukan IPDN yang bernaung di bawah Depdagri.

Tetapi BI menyimpulkan, sesungguhnya kultur kekerasan yang meruyak di IPDN hanyalah pelembagaan dari nilai kekerasan kolektif yang mengakar di masyarakat. Harus diakui, masyarakat negeri ini sangat dekat dengan kekerasan. Bahkan kekerasan kerap kali mendapatkan pembenaran kolektif. Barbarisme dan vandalisme menyelinap di dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk pelampiasan sakit hati dan ketidakpuasan terhadap keadaan yang dihadapi.

Koran bisnis ini dalam edisi yang sama mengutip sejumlah nara-sumber DPR yang meminta pemerintah membubarkan IPDN. Ketua DPR Agung Laksono menyarankan agar pendidikan bagi calon birokrat pemerintahan tidak perlu dilakukan terpusat seperti sekarang. Pendidikan semacam itu sebaiknya dibuka di sejumlah wilayah, termasuk di universitas umum. "Sebaiknya IPDN dibubarkan untuk menghindari terulangnya kesalahan sistem pembinaan," kata Agung seperti dikutip BI.

Juga Ketua DPD Ginanjar Kartsasmita sepakat dengan Agung. Tetapi dia menyarankan praja yang masih ada diberi kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka, meskipun tidak di IPDN. Kata Ginanjar seperti dikutip BI, penutupan IPDN secara resmi bisa dilakukan setelah itu. Praja yang masih ada sekarang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lain.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS di DPR Mahfuz Siddiq mengatakan partainya secara resmi menyarankan lebih baik IPDN dibubarkan dan diganti Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). APDN lebih memfasilitasi otonomi daerah lewat kurikulum dan metode pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Namun banyak pula yang berpendapat untuk membunuh tikus, "rumah IPDN" tidak harus dibakar. ■ SH

pus IPDN tidak menggunakan kekerasan. Dan dia keberatan jika IPDN mendapat stempel merah dari masyarakat. Dia tetap membela diri bahwa IPDN di bawah kepemimpinannya telah membawa perubahan sistem menjadi lebih baik. Kematian Cliff dianggapnya hanyalah ulah oknum, bukan sebuah sistem.

Pelaksana Harian Rektor IPDN yang baru saja diangkat, Johannes Kaloh, mengatakan hukuman fisik di lembaganya akan dihapus bertahap. Menurut *Republika* (15/4), ketika melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat kontroversi di kampus IPDN, Johannes sempat menjenguk seorang praja yang dirawat di poliklinik kampus. Johannes menanyakan apakah dia sakit karena mengalami tindak kekerasan, tetapi dijawab, tidak.

Johanes meninjau poliklinik, lokasi kuburan dan sel yang ada di Pos Pengendali Pengamanan Kesaktrian. Berdasarkan data yang terpampang di papan, terdapat 14 praja yang dirawat di poliklinik dan 4 praja dirawat di RS Cibabat, RS Al Islam, RS AMC dan RS Bintaro. Mereka sebagian besar menderita penyakit hepatitis, typhoid, demam, dan gastro enteritis.

Pelaksana harian rektor IPDN ini berjanji segera melakukan pemeriksaan kesehatan semua praja, meliputi pemeriksaan urine, darah dan rontgen. Pemeriksaan kesehatan diprioritaskan pada praja tingkat satu, dua dan tiga. Dari pemeriksaan itu akan terungkap berapa persen praja yang mengalami penyiksaan, dan berapa persen yang menderita penyakit tertentu.

Johanes juga mendatangi sejumlah makam yang ada di lingkungan IPDN.

Makam tersebut diisukan sebagai kuburan praja yang jadi korban kekerasan. Namun Kasubag Bina Kerohanian Islam IPDN, Ahmad Muzakir membantah. Di situ tertera nama Dala Ulung, Hj. Khadijah, M. Djalil bin Ismail dan Drs Tadjudin Manangkari. Tulis *Republika*, Johannes juga mendatangi sel PPKK yang disebut sering digunakan sebagai tempat penahanan praja yang melakukan pelanggaran disiplin. Sel berukuran sekitar 3x4 meter yang dibangun tahun 1998 itu memiliki sebuah pintu, terbuat dari jeruji besi. Di dalam sel terdapat dua kasur busa.

Meskipun kekerasan di IPDN dikedek berbagai pihak, Johannes masih berjanji mengurangi bentuk hukuman fisik terhadap para praja yang melanggar disiplin, secara bertahap. Dia akan mengubah pola pengasuhan dan hukuman, lebih bersifat edukatif, misalnya melakukan penelitian dan membuat paper. "Pokoknya semua tindak kekerasan akan dihapuskan," kata Johannes kepada *Republika*.

Johanes menilai kegiatan wahana bina praja yang selama ini mengandung tindak kekerasan pada para praja, drum band, Pataka dan polisi praja. Seluruh kegiatan bina praja dibekukan selama berlangsungnya evaluasi.

Kematian Cliff mengundang pemberitaan pers dan perhatian publik yang sangat luas. Tajuk harian ekonomi, *Bisnis Indonesia* (13/4), memberi indikasi bahwa kekerasan di IPDN tak pernah benar-benar hilang. Koran ini bertanya: "Kenapa kampus yang mencetak pamong praja itu menerapkan instrumen kekerasan di dalam melakukan pembinaan?"

Pelanggaran di IPDN 2000-2004

Kasus Penganiayaan Berat	35
Kasus Penganiayaan Ringan	9.000
Kasus Narkoba	125
Kasus Perkelahian	75
Kasus Pencurian	1.500
Kasus Pelecehan Seksual	150
Kasus Seks Bebas	660

Sumber: Tempo

Inu Kencana Syafiie

Membuka Kebusukan IPDN



Penyakit di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat rupanya kambuh lagi. Di sana telah lama berlangsung aksi kekerasan secara sistematis yang ironisnya ditutupi oleh orang dalam.

Fisik setiap mahasiswa IPDN dalam penampilannya di muka umum selalu terlihat gagah dan sehat. Masa depan akan berkarir menjadi pejabat pemerintahan dalam negeri terpancar dari senyuman manis mereka, terlebih apabila sedang pulang kampung ke daerah asal pengirimnya.

Namun siapa nyana, tanpa sebab dan alasan yang jelas, hampir saban tahun ada saja diantara mereka yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Jagat nasional kembali tersentak manakala mengetahui

aksi brutalisme yang dicoba untuk ditutupi kembali menelan korban, praja Cliff Muntu.

Misteri kematian Cliff Muntu semakin terkuak setelah seorang lektor IPDN bernama Inu Kencana Syafiie dengan berani mengungkapkan kenyataan sebenarnya.

Sesungguhnya hal yang sama sudah pernah dilakukan oleh Inu pada tahun 2003 lalu, terkait dengan kematian Wahyu Hidayat. Saat itu ia menyuarakan kesaksian, yang didorong nurani seorang guru pamong untuk mengubah pola pendidikan IPDN supaya lebih

humanis, dengan mengungkap kekerasan-kekerasan yang terjadi di kampus pencetak calon pamong praja itu.

Karena masih tak bergaung, kesaksian itu kemudian dituangkannya menjadi produk akademis, dalam disertasi ilmiah untuk meraih gelar doktor yang diberinya judul, "Pengawasan Kinerja STPDN terhadap Masyarakat Kabupaten Sumedang".

Inu menulis, selama tahun 1990-2005 sudah 35 orang praja yang tewas akibat aksi kekerasan. Di kampus juga terdapat fenomena seks bebas, aborsi di lingkungan asrama, hingga penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Data kasus kekerasan, arogansi praja, dan penyiksaan yang rutin dilakukan oleh setiap senior kepada juniornya, itu terdokumentasikan secara apik dalam foto-foto, sampai ke rekaman kamera televisi.

Tetapi semua pihak kecuali Inu tetap saja diam membisu, hingga kasus yang sama terulang kembali dan meneteskan air mata duka bagi keluarga korban.

Ada persamaan risiko yang diterima pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat 15 Juni 1952, ini di kedua peristiwa yang hanya berselang tiga tahun. Pada tahun 2003 suami dari Indah Prasetyati ini menerima ancaman pembunuhan lewat pesan singkat SMS, sampai-sampai Mabes Polri turun tangan untuk mengusut siapa pengancamnya.

Kali ini tahun 2007 ancamannya lebih hebat lagi. Selain diintimidasi lewat SMS, yang salah satu bunyinya menyebutkan, "Guruku sayang, kenapa kau tega memfitnah kami?", Inu juga diberi sanksi larangan mengajar sementara dari pihak Rektorat dan dari Depdagri. Inu kemudian diperiksa oleh tim investigasi Depdagri. Bahkan, pada 5 April, dari ruang kuliah ia sempat diusir oleh temannya sesama pengajar saat hendak

Biodata:

Nama : Inu Kencana Syafiie
Lahir : Payakumbuh, 14 Juni 1952
Agama : Islam
Jabatan : Lektor Kepala IPDN
Isteri : Indah Prasetyati
Anak : -Raka Manggala
-Nagara Belagama
-Periskha Bunda

Pendidikan:

- Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (1972-tidak tamat)
- Akademi Ilmu Administrasi dan Akuntansi Jayapura (1975-tidak tamat)
- Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Jayapura (1976-1979)
- Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1985-1987)
- Program Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (lulus 1990)
- Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (sampai sekarang)
- Disertasi berjudul: Pengawasan Kinerja STPDN terhadap Masyarakat Kabupaten Sumedang.

Buku:

- Filsafat Kehidupan, Filsafat Pemerintahan, serta Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an.

mengajarkan mata kuliah Ilmu Pemerintahan.

Inu ayah tiga orang anak Raka Manggala, Nagara Belagama, dan Periskha Bunda tetap tak gentar dan terus bersikukuh membeberkan ke publik berbagai perilaku menyimpang di kampus IPDN. Ia terbuka saja dan blak-blakan meladeni permintaan wawancara dari setiap wartawan.

Dengan tak kenal rasa takut, Inu memanfaatkan dukungan media untuk menentang arus kampus yang mayoritas sudah tak bersuara. Ia juga bersedia menjembangi kumpulan para politisi di DPR untuk bersuara membuka tabir gelap yang lama tertutupi di IPDN.

Berakhirkah kekerasan di IPDN setelah Inu bersuara? Belum tentu, kecuali bila lembaga pendidikan beraroma kekerasan ini ditutup selamanya. ■ HT



foto: repro media indonesia

Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi isteri Kanjeng Ratu Hemas dan putri-putrinya menerima ribuan warga Yogya dalam acara *Pesowanan Ageng* di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Suara dari Yogya

Tidak bersedianya Sultan Hamengku Buwono X menjadi gubernur lagi punya dua makna. Yakni perlu adanya UU Keistimewaan Yogyakarta dan tekadnya untuk berkiprah di kancah nasional.

Tidak ada yang menduga akan ada pernyataan itu. Yakni soal ketidaksediaan Sri Sultan Hamengku Buwono X menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah berakhir masa jabatannya pada Oktober 2008 nanti. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam orasi budaya pada peringatan *Wiyosan Dalem* (Hari Ulang Tahun Sri Sultan Hamengku Buwono X) ke-61.

“Setelah saya pertimbangan secara mendalam dengan laku spiritual, saya menyatakan tidak bersedia lagi menjabat sebagai gubernur. Selanjutnya saya titipkan masyarakat DIY kepada gubernur yang akan datang,” ujarnya pada acara yang diselenggarakan di Pagelaran Keraton Kesultanan Yogyakarta, 7 April 2007 lalu seperti diberitakan *Kompas* (8/4).

Tak pelak, pernyataan *Ngarso Dalem* (sebutan untuk Sultan) itu membuat warga masyarakat Yogya tersentak.

Karena sebagai daerah istimewa, masyarakat di bekas Kerajaan Mataram itu, mengenal pakem bahwa Sultan tetap menjadi gubernur karena di situlah letak keistimewaan DIY. Apalagi pengakuan tentang keistimewaan DIY secara tegas dinyatakan dalam pasal 18 UUD 45 beserta amandemennya.

Ketua DPRD DIY H. Djuwanto mengaku sangat terkejut dengan pernyataan Sri Sultan yang mendadak itu. Dia menyatakan DPRD akan melihat reaksi masyarakat dulu untuk kemudian menentukan langkah. “Kita harus tetap menghargai keputusan Sultan, apa lagi UU Keistimewaan DIY yang menjadi dasar pemilihan kepala daerah di DIY memang belum final,” ujarnya.

Mengacu pada UU Pemilu, Sri Sultan yang sudah dua periode menjadi gubernur memang tidak mungkin mencalonkan diri lagi. “Tetapi itu kan yang terjadi di provinsi lain, sedang DIY yang punya keistimewaan, punya tata cara

lain. Namun, sayangnya, ini belum dinaungi hukum,” kata Djuwanto.

Pernyataan Sultan itu memunculkan persoalan mendasar dalam pilkada di DIY. Hal itu merupakan perkara mendesak yang harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk sistem pemilihan suara jika pemerintah pusat punya aturan main baru. “Depdagri harus menyosialisasikan aturan Pilkada Gubernur DIY secepatnya. Jika pemerintah pusat punya aturan baru dalam pemilihan Gubernur DIY dalam RUU Keistimewaan,” kata Ketua KPU DIY Suparman Marzuki.

Belakangan, soal ketidaksediaan itu kembali diungkapkan Sultan pada acara *pesowanan ageng* (pertemuan akbar) yang digelar di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Rabu (18/4). Di hadapan puluhan ribu warga masyarakat yang memenuhi bangsal keraton, Sultan yang didampingi permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan putri-putrinya berharap mereka ikhlas menerima apa yang telah diputuskannya itu.

Ada dua esensi penting dari pernyataan sikap yang diungkapkan Sultan Yogya. Per-

tama, terkait dengan persoalan keistimewaan Yogyakarta yang memerlukan adanya payung hukum berupa UU. Karena bagi masyarakat, keistimewaan itu bukan hanya sekadar status tapi juga menyangkut sebuah aturan yang memberi peluang dalam rangka membentuk pemerintahan (daerah istimewa), organisasi dan manajemen yang lebih sesuai dalam menghadapi tantangan ke depan. Apalagi RUU Keistimewaan DIY itu telah disampaikan ke pemerintah pusat. “Demi masa depan Yogyakarta, jangan ada yang gelisah. Tapi mari kita kawal RUU Keistimewaan,” ujar Sultan mantap.

Kedua, adalah tekadnya untuk terjun di kancah nasional. Sultan menyatakan kegundahannya atas perjalanan reformasi selama ini. Karena di era reformasi seharusnya kehidupan masyarakat lebih makmur. Namun yang terjadi kini justru kemiskinan meningkat dan lapangan kerja semakin sempit.

Dengan tidak menjadi gubernur, Sultan berharap lebih bisa berbuat demi perbaikan bangsa. “Harapan saya, masyarakat Yogya mengikhlaskan saya untuk bisa berbuat demi bangsa yang kita cintai. Kalau ada yang menyatakan pernyataan saya ini dengan agenda 2009 (pemilihan presiden-red), silakan saja,” tandasnya.

Rektor UGM Sofian Effendi menilai keinginan Sultan berkiprah di kancah nasional wajar dan bahkan sudah saatnya. Apakah itu nanti menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ini karena Sultan memiliki modal sosial yang sangat besar. Namun untuk maju ke kancah politik nasional, akan sangat tergantung pada siapa yang akan menjadi pasangannya. Juga kendaraan politik apa yang akan digunakan.

Meski menjadi Penasihat Partai Golkar, menurut Sofian, Sultan akan sulit untuk maju sebagai calon presiden bersama partai berlambang pohon beringin itu. Namun bisa saja Sultan mendampingi calon presiden dari Partai Golkar dengan menjadi calon wapres. ■ SP

Isu Reshuffle di Kebun Durian

Kalau pun ada reshuffle, SBY menyatakan akan membicarakannya dengan parpol dan berkonsultasi dengan Wapres. Kalangan pengamat menilai hal itu sebagai bukti SBY 'disandera' parpol.

Menikmati buah durian seraya bicara soal reshuffle. Itulah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Minggu (15/4) lalu di areal perkebunan durian Warso Farm di Desa Cihideung, kecamatan Cijeruk, Bogor.

Sambil duduk di kursi bambu di halaman terbuka, SBY berdialog dengan puluhan wartawan yang sehari-hari meliput di Istana Kepresidenan. Suasana begitu santai dan jauh dari protokoler kenegaraan. SBY membuka pembicaraan dengan mengutarakan soal isu reshuffle yang belakangan ini semakin mengemuka. Sementara para wartawan, yang duduk di rerumputan dan sebagian berdiri, serius mendengarkan, mencatat dan merekam apa yang dikemukakan SBY.

Isu perombakan kabinet belakangan ini kembali menjadi wacana, menyusul pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengisyaratkan tentang perombakan kabinet. "Reshuffle demi kinerja saja, bukan alasan politik," kata Jusuf Kalla.

Presiden SBY mengatakan, bahwa susunan baru kabinet diumumkan awal Mei.

Sebelumnya, sejumlah parpol mendesak dilakukan reshuffle. PKB misalnya, menilai ada 10 menteri yang perlu diganti karena kiprahnya kurang dirasakan masyarakat. Demikian pula Partai Golkar dan PAN mendesak para menteri bidang ekonomi diganti karena tak mampu menggerakkan sektor riil.

Presiden SBY sendiri mengaku banyak menerima nama calon yang disodorkan parpol.

"Saya gunakan bahasa terang, (telah) masuk usul 10 atau 11 nama untuk mengganti menteri-menteri yang ada. Usul itu dari pihak partai politik dan pihak lain," ujarnya. Namun dia tidak menjelaskan dari parpol mana yang mengusulkan itu. SBY juga menolak memberikan nama calon menteri maupun menteri yang bakal diganti.

Isu yang berkembang menyebutkan sejumlah nama dari Partai Golkar seperti Muladi, Andi Matallata, Theo L Sambuaga, Burhanuddin Napitupulu dicalonkan sebagai menteri. Namun salah seorang Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, membantah jika partainya merekomendasikan nama-nama itu kepada Presiden.

Tak saja menerima sodoran sejumlah nama, SBY juga menerima surat dan SMS serta *curriculum vitae* (CV) dari parpol atau pihak-pihak tertentu yang sepertinya harus ada pergantian menteri kabinet yang konsepnya menjadi giliran atau gantian. "Itu tidak kena," kata SBY. "Jadi kalau pun ada reshuffle, itu karena ada kebutuhannya. Itu hasil evaluasi dan upaya kita untuk meningkatkan sinergi, kinerja, efektivitas dan *teamwork* kabinet," paparnya.

Penjelasan SBY menyiratkan tidak akan ada perombakan atau bongkar pasang kabinet secara besar-besaran. Karena hal itu dianggap tidak sejalan dengan kesinambungan kabinet. "Karena itu dengan segala hormat saya, saya kurang sependapat. Tidak begitu konsep memelihara keberlanjutan pemerintahan" jelasnya seperti ditulis *Kompas* (16/4).

Kalau pun nantinya akan



foto: presidensby.info

Presiden SBY bicara soal reshuffle di Kebun Durian.

dilakukan perombakan kabinet, Presiden SBY menyatakan akan melakukan pembicaraan lebih dahulu dengan parpol, terutama jika menteri yang akan diganti berasal dari salah satu parpol. "Dengan wapres saya juga akan membicarakannya meskipun nantinya tetap saya yang akan menentukan," jelasnya.

Sikap Presiden SBY ini dinilai kalangan pengamat politik sebagai tidak mencerminkan ketegasan. Bahkan ada yang menilai sikap itu menunjukkan SBY 'disandera' parpol.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan sebaiknya presiden segera memberi kepastian soal perombakan itu. Presiden akan rugi jika tidak segera memastikan perombakan, karena para menteri akan gamang dan tidak efektif saat bekerja. Kinerja KIB bisa semakin buruk. "Lakukan segera, lebih cepat lebih baik," tegasnya.

Pada 5 Desember 2005 lalu SBY telah me-reshuffle kabinetnya dengan mengubah

posisi enam menteri. Tiga diantaranya diganti dengan wajah baru. Yakni Menko Ekuin Budiono, Menakertrans Erman Suparno (PKB) dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta (PG).

Pengamat politik Ikrar Nusabakti berpendapat, berjalannya kabinet tidak semata hanya tergantung pada kemampuan menteri, tapi juga pada presiden.

Kabinet yang lambat juga bisa disebabkan arahan pemimpinnya yang tidak jelas dan kurang berani mengambil keputusan.

Adalah tidak salah jika presiden kembali menggunakan hak prerogatifnya dengan melakukan reshuffle untuk meningkatkan kinerja kabinet.

Namun Ikrar mengingatkan agar Presiden tidak sampai terjebak oleh kepentingan partai. Sebab banyak partai mendukung rencana perombakan tapi tidak satu pun mau kehilangan wakilnya. ■ SP

Al-Zaytun-Ditjen PLS Lakukan

Diikuti Pegawai UPT Ditjen PLS Se-Indonesia

Kerjasama yang sinergis antara Al-Zaytun dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), semakin erat untuk mencerdaskan bangsa.

Syaykh Abdussalam Panji Gumilang pimpinan Kampus Al-Zaytun, sebagai pelopor pendidikan sistem satu pipa, ingin sekali mendarmabaktikan seluruh aset dan sumberdaya manusia yang dimiliki dipersembahkan kepada bangsa dan negara, serta masyarakat luas secara keseluruhan.

Demikian pula Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas, Ace Suryadi, yang dikenal berhasil dalam mengangkat citra pendidikan nonformal di jagad pendidikan nasional, ingin pula melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keduanya sepakat untuk membangun kerjasama yang sinergis dalam berbagai hal.

Salah satunya, Al-Zaytun sebagai pusat pendidikan terpadu, terletak di Kampung Sandrem, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 12-18 Maret 2007 lalu dipercaya melaksanakan pelatihan sertifikasi ICDL (International Computer Driving License), kepada 39 pegawai negeri sipil (PNS) yang

berdinas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah, Pendidikan Luar Sekolah.

Peserta berasal dari 17 daerah di seluruh Indonesia. Acaranya disebut "Pelatihan Sertifikasi ICDL Bagi Para Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia".

Dengan mengikuti pelatihan, peserta diharapkan memiliki sertifikat untuk melatih orang lain supaya dapat menguasai (literasi) penggunaan komputer.

Materi pelatihan ICDL terdiri tujuh modul, yaitu: Module 1 Concepts of Information Technology (IT); Module 2 Using the Computer and Managing Files; Module 3 Word Processing; Module 4 Spreadsheets; Module 5 Database; Module 6 Presentation; dan Module 7 Information and Communication.

Peserta terdiri 28 laki-laki dan 11 perempuan. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Enam orang lulusan setingkat SLTA, 27 orang lulusan setingkat sarjana atau S-1, dan enam orang lulusan



Syaykh AS Panji Gumilang (kanan) dan Dirjen PLS



foto: berindo amron

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud menyaksikan presentasi ICDL Test Centre, di Al-Zaytun Global Information and Communication Technology (AGICT).

setingkat master atau S-2.

Mereka mewakili sejumlah UPT Daerah, seperti Sanggar Kegiatan Bersama (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM), Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah (BPPPLS), serta Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Pengembangan Kegiatan Belajar (BTKPPKB).

Untuk setiap modul, materi pelatihan diberikan oleh dua orang instruktur, dibantu empat orang asisten, sehingga total terdapat 14 orang instruktur dan 28 orang asisten.

n Pelatihan Sertifikasi ICDL



Depdiknas, Ace Suryadi bertukar naskah kerjasama membangun pendidikan nonformal.

foto: dok

Di akhir pelatihan, pada tanggal 17-18 Maret diadakan ujian dan 38 orang dinyatakan lulus menyelesaikan pelatihan dengan hasil baik. Sedangkan seorang peserta, berasal dari BPKB Daerah Instimewa Yogyakarta yakni Nugroho Tyas, dinyatakan belum menyelesaikan seluruh modul.

Rekapitulasi hasil ujian menunjukkan, nilai rata-rata Module 1 adalah 90,32, Module 2 91,66, Module 3 92,58, Module 4 93,92, Module 5 92,66, Module 6 89,87, dan Module 7 93,13.

Tentang ICDL

Para instruktur dan asisten pelatihan, sehari-hari bekerja sebagai pengajar di ICDL Al-Zaytun Global Information and

Communication Technology (ICDL-AGICT).

ICDL-AGICT didirikan tahun 2002. Pada 3 Januari 2003 ICDL-AGICT berhasil mendapatkan akreditasi dari kantor pusat ICDL, di London, Inggris sebagai *test centre* yang pertama untuk seluruh kawasan Indonesia.

Pada bulan Desember 2006 *ICDL Licensee in Indonesia*, atau ICDL AGICT, sebagai perpanjangan tangan kantor pusat ICDL di Indonesia, berhasil membangun kesepakatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas, untuk memberikan pelatihan-pelatihan penguasaan komputer, kepada unit-unit pelaksana teknis daerah pendidikan

nonformal.

Dengan akreditasi yang dimiliki itulah, ICDL-AGICT berhak merekrut peserta, melakukan pelatihan menggunakan silabus dan kurikulum dari ICDL, serta melaksanakan serangkaian tes kepada peserta pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi ICDL.

Termasuk, pada bulan Maret 2007 tadi, Al-Zaytun melakukan pelatihan sertifikasi ICDL bagi para pegawai unit pelaksana teknis pendidikan luar sekolah se Indonesia.

Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Ace Suryadi mengatakan, pilihan atas ICDL sebagai lembaga akreditasi/sertifikasi literasi komputer di lingkungan Ditjen PLS, Depdiknas, didasarkan pada pertimbangan, ICDL merupakan lembaga independen yang telah diakui secara luas oleh banyak negara dan berbagai organisasi internasional seperti UNESCO, UNDP, dan Uni Eropa.

ICDL diakui sebagai *benchmark* internasional untuk keterampilan komputer, sama persis halnya dengan TOEFL untuk pelatihan bahasa Inggris.

Kata Ace, literasi komputer merupakan salah satu strategi dalam menghadapi tantangan globalisasi, dengan menyiapkan program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kebijakan literasi komputer dimaksudkan untuk mendorong masyarakat mengenal, memahami, dan mampu menggunakan komputer atau TIK baik itu untuk keperluan yang berkaitan dengan pekerjaan, maupun pembelajaran dan aktivitas lainnya.

Caranya, mengembangkan semua lembaga UPT/Daerah Pendidikan Nonformal menjadi lembaga ICDL *Test Center*, selanjutnya meningkat menjadi ICDL *Training Center*.

Kehadiran ICDL di Indonesia diwakili oleh MYR Agung Sidayu, dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), duduk sebagai *Chairman of the ICDL Licensee in Indonesia*. Sedangkan Chris Evdemon duduk sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) ICDL Asia Pasific.

Menurut Chris, ICDL adalah standar global yang memberikan sertifikasi untuk mengukur kompetensi pengguna

komputer, dan dapat juga meningkatkan produktivitas kerja.

"ICDL adalah salah satu implementasi kebijakan literasi komputer. ICDL adalah kualifikasi/sertifikasi yang berstandar internasional untuk kompetensi kemampuan komputer," ujar Chris, ketika datang ke Indonesia, menyaksikan Mendiknas Bambang Sudibyo menyerahkan sertifikat *Approved Test Center* (ATC) ICDL, kepada 71 UPT/ Daerah Pendidikan Nonformal, di Jakarta, pada 11 Desember 2006.

Sebelumnya, secara simbolis Mendiknas menerima sertifikat itu dari Joh Chapman, pimpinan tertinggi ICDL seluruh dunia.

Mendiknas mengatakan, sistem sertifikasi ICDL mendorong minat masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan TIK.

"Pemerintah bertekad untuk mewujudkan *computer/digital literacy* pada masyarakat," kata Bambang Sudibyo.

Bambang yang sudah beberapa kali mengunjungi kampus Al-Zaytun, pertamakali saat meresmikan pengoperasian Universitas Al-Zaytun (UAZ) Indonesia pada Agustus 2005, juga mengatakan, program literasi komputer akan disinergikan dengan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, atau pendidikan formal seperti pendidikan kejuruan dan umum.

Karena itu, menurut Bambang, perlu dilakukan kampanye, advokasi, dan promosi literasi komputer pada sasaran yang lebih luas.

"Kalangan pendidikan pesantren, pendidikan formal maupun lembaga pendidikan pelatihan pada umumnya, baik negeri maupun swasta harus menjadi bagian dari program literasi komputer," kata Bambang.

Dirjen PLS Ace Suryadi menambahkan, ke depan, lembaga-lembaga penerima sertifikat ATC ICDL akan dikembangkan menjadi *training center*. "Kami akan menerapkan sistem, mekanisme, dan sarana yang memenuhi standar ICDL untuk penjaminan dan pengendalian mutu," ucapnya. ■ **CRS, HT**

Daftar Peserta Pelatihan ICDL Bagi Para Pegawai UPTD PLS

No	Nama	Lembaga
1	May Sudarta	PKB Provinsi Bengkulu
2	Prasulystia Damaianti	SKB Jakarta Timur
3	Zuhrialsyah Sahibur Mamat	KB Kota Bandarlampung
4	Hery Supriyadi	SKB Kota Bandarlampung
5	Ari Nugroho	SKB Purwokerto
6	Farida Dwi T	SKB Purwokerto
7	Birowo Dwi Chondro	BPPLSP Regional III
8	Jamaludin Suhali	BPPLSP Regional 3
9	Said Zein	BTKPPKB Prov Kalsel
10	Taufiqur Rohman	BTKPPKB Prov Kalsel
11	Sularto	BP3LS DKI Jakarta
12	Edi Pramono	SKB Jakarta Selatan
13	Harum Mawar Ibnatul Wathan	SKB Jakarta Selatan
14	Herry Hermawan	BP3LS DKI Jakarta
15	Eko Jatmiko	SKB Jakarta Timur
16	Aldisar Qomara	SKB Kota Pangkalpinang
17	Rokhman	UPDT SKB Kab. Cirebon
18	Nurjanah	UPT - SKB Pangkalpinang
19	Indrayani	BP-PLSP Reg. II Jayagiri
20	Liesna Dyah P	BP-PLSP Reg. II
21	Dedi Supratman	UPTD SKB CIREBON
22	Dedi Kurnia	UPTD SKB CIREBON
23	Turcipto	SKB CIREBON
24	Amirullah	BPPLSP Regional V
25	Dwi Sarulyanto	BPPLSP Regional V
26	Musnedi	BPPLSP REG IV
27	Udik Pudjianto	BPPLSP REG IV
28	Jeni Adel Mata	UPDT PKB NTT
29	Roni Umbu Muda	UPDT PKB NTT
30	Berni	UPTD SKB BARSEL
31	Hibertiana Karuniani	UPTD SKB BARSEL
32	Mulyanta	BPKB Povinsi DIY
33	Nugroho Tyas Utomo	BPKB Povinsi DIY
34	Djarto	BPKBM NTB
35	Haryanto	BPKBM NTB
36	Henry Maksum	SKB Kab Pontianak
37	Veronika Derliana	SKB Kab Pontianak
38	Yetty Widya K Santi	BPPLSP Regional IV Surabaya
39	Erfan Agus Munif	BPPLSP Regional IV Surabaya

Keterangan singkatan:

- **SKB**= Sanggar Kegiatan Bersama
- **BPKBM** = Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat
- **BPPLSP** = Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
- **BPPPLS** = Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah
- **BTKPPKB** = Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Pengembangan Kegiatan Belajar



foto: berindo amron

Ruang pelatihan Al-Zaytun Global Information and Communication Technology (AGICT).

Al-Zaytun Kampus Global

Kampus Al-Zaytun sejak didirikan didesain sebagai pusat pengembangan teknologi informasi. Sejak awal kampus Al-Zaytun telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan berorientasi teknologi informasi. Apalagi setelah berdirinya Fakultas Teknologi Informasi Universitas Al-Zaytun Indonesia pada bulan Agustus 2005, kampus Al-Zaytun berubah wajah menjadi kampus global yang mengedepankan pengembangan teknologi informasi.

Kampus dalam era globalisasi dimaknai dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology - ICT*). Teknologi inilah yang telah membuat kehidupan kampus berada dalam sebuah tatanan lintas batas, baik batas ruang, jarak maupun waktu.

Dari sudut pandang teknologi informasi, nyaris tiada lagi batas negara, bahkan tiada lagi batas agama. Semua tertata menjadi sebuah masyarakat pendidikan yang terikat pada informasi dan komunikasi tanpa batas.

Sungguh, era ini adalah era informasi,

yang terjadi sebagai akibat perkembangan teknologi komputer yang menjadi inti dari teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Komputer bukan lagi sekadar alat bantu dalam pengolahan data menjadi informasi saja. Melainkan, telah dan akan terus berintegrasi dengan teknologi komunikasi modern, menjadi sebuah alat komunikasi canggih yang memungkinkan interaksi dan integrasi seluruh civitas akademika di berbagai belahan dunia.

ICT mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan yang terutama aspek pendidikan (ilmu pengetahuan dan

teknologi). Maka, sebagai pusat pendidikan ber-setting internasional, sejak awal didirikan Kampus Al-Zaytun telah menerapkan *computer-based education system* (CBES) dalam menjalankan dan menunjang fungsi dan kegiatan pendidikannya. Mulai dari administrasi pendidikan, materi pembelajaran, metode penyampaian hingga evaluasi pencapaian hasil-hasil pendidikannya.

Metode pembelajaran yang berbasis kompetensi menggunakan *e-learning* dirintis sejak dini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya yang ada. Disadari, materi pembelajaran menggunakan *e-book* menjadi pilihan utama para pendidik dalam menuangkan poin-poin kurikulum yang mampu menghemat penggunaan kertas (*paperless*) serta biaya cetak yang sangat tinggi, dan ini berarti efisiensi yang sangat signifikan untuk institusi sebesar Al-Zaytun.

Evaluasi pencapaian hasil pendidikan pun cukup disajikan dalam bentuk sistem informasi pendidikan berbasis komputer *on-line*, yang mampu memantau, mencatat, menyimpulkan dan memberi rekomendasi serta dukungan (*decision support*) kepada para pembuat keputusan (*decision maker*). Mereka cukup menghubungkan dirinya dengan akses ke komputer.



Ace Suryadi menyaksikan pelaksanaan kelas dewasa.

foto: dok

Pada 3 Januari 2003, Al-Zaytun Global Information and Communication Technology berhasil mendapatkan akreditasi ICDL sebagai *test centre* yang pertama di seluruh kawasan Indonesia. Akreditasi *test centre* ini diperoleh setelah melalui proses audit ketat berstandar internasional dari ICDL.

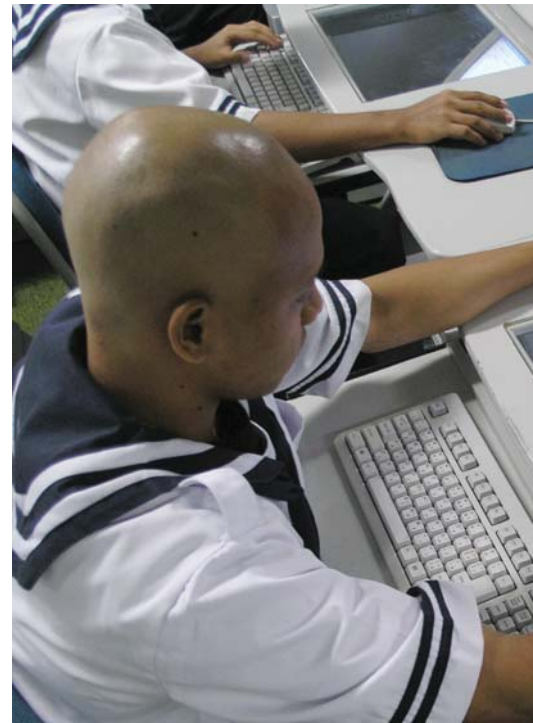
Bahkan, yang sudah dikembangkan oleh Universitas Al-Zaytun (UAZ) Indonesia bukan sekadar *information technology* (IT) saja. Melainkan *global information and communication technology* (GICT). Diperkirakan, pada era GICT ini, volume dan aliran data akan mengalir begitu besar, sehingga harus ditangani dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari administrasi nilai, administrasi mata kuliah, hingga administrasi jadwal kuliah.

Langkah Awal AGICT

Dalam rangka pengembangan ICT di Kampus Al-Zaytun, sekaligus untuk memberikan bekal kemampuan teknologi informasi standar bagi santri dan calon mahasiswa, pada awal tahun 2002 didirikanlah lembaga kursus yang diakui keberadaannya oleh dunia internasional, yang diberi nama AGICT (*Al-Zaytun Global Information and Communication Technology*).

Lembaga kursus AGICT ini bekerja sama dengan ICDL (*International Computer Driving License*) yang berkedudukan di Inggris.

Kemudian, pada 3 Januari 2003, AGICT berhasil mendapatkan akreditasi ICDL sebagai *test centre* yang pertama di seluruh kawasan Indonesia. Akreditasi *test centre* ini diperoleh setelah melalui proses audit ketat berstandar internasional dari ICDL. Dengan akreditasi yang telah dimiliki, AGICT sebagai pelaksana program pendidikan komputer di Al-Zaytun, berhak merekrut peserta, melakukan pelatihan menggunakan silabus dan kurikulum dari ICDL serta melaksanakan serangkaian tes kepada



Meja komputer yang digunakan pun didesain dan diprojek untuk memperhatikan kriteria ergonomik.

peserta didiknya untuk mendapatkan sertifikat ICDL.

Pada saat pertama kali dimulai, program AGICT didukung dengan 154 komputer PC, 5 server, dan 32 UPS. Peserta kursus terbuka bagi semua santri kelas IV dan kelas V yang mendaftarkan diri. Khusus untuk angkatan pertama, jumlah pesertanya langsung membludak mencapai 1.158 orang terdiri dari 454 nisa dan 704 rijal, dibagi dalam beberapa kelompok. Seluruh pembiayaan kursus ditanggung masing-masing santri.

Sementara instrukturinya berjumlah 16 orang dibantu 52 orang asisten, semuanya berpengalaman di bidang teknologi informasi dan komputer dan bersertifikat ICDL. Setiap sesi dibimbing oleh dua instruktur dan 13 asisten. Setiap kelompok mengikuti pelajaran komputer tiga kali dalam sepekan selama sembilan bulan untuk 3 level yakni *Basic*, *Intermediate*, dan *Advance*. Setiap pertemuan berlangsung selama 90 menit.

Peserta kursus memperoleh berbagai fasilitas seperti laboratorium komputer yang terhubung dengan LAN dan spesifikasi komputer terbaik dengan aplikasi terkini untuk setiap orang, ruangan kelas eksklusif ber-AC dilengkapi dengan *sound system* serta *projector*, *skills card* untuk melaksanakan tes ICDL dan mendapat sertifikat ICDL yang bertaraf



foto: berindo amron

produksi khusus oleh unit Meubeleur Al-Zaytun dengan

internasional.

Materi yang diberikan adalah sesuai dengan kurikulum internasional ICDL yang meliputi: a) Konsep Dasar Teknologi Informasi, b) Penggunaan Komputer dan Manajemen File, c) Word Processing, d) Spreadsheet (pengolahan tabel), e) Database, f) Presentasi, dan g) Informasi dan Komunikasi.

Karena Program AGICT awalnya merupakan program pendidikan di Kampus Al-Zaytun, maka penanggung jawabnya dijabat oleh Ketua Dewan Guru Al-Zaytun. Sedangkan Penanggung Jawab Pelaksana diamanatkan kepada Ust. Aan Kurniawan. Dalam struktur AGICT, terdapat pula beberapa departemen yang membantu tugas Penanggung Jawab Pelaksana, antara lain: Departemen Administrasi, Departemen Kurikulum, Departemen Operasional, Departemen HRD, Departemen Marketing dan PR, serta Departemen Technical Support.

Program pendidikan komputer AGICT dilaksanakan di Laboratorium Komputer AGICT yang bertempat di ruang *basement* selatan gedung Utsman Ibnu Affan. Ruang berukuran 36 x 12 m ini menampung 150 unit komputer untuk siswa dan 2 unit komputer untuk instruktur. Untuk menunjang proses pembelajaran, laboratorium dilengkapi dengan perangkat *sound system*, tiga proyektor dan empat AC berkekuatan 6 pk.

Menurut Ust. Ir. Aan Kurniawan,

setiap komputer dirancang dengan spesifikasi terbaik untuk ukuran saat ini dengan menggunakan prosesor terbaru keluaran Intel, lengkap dengan fasilitas multimedianya seperti *sound card*, *CD-ROM drive* dan *headset plus microphone*. Seluruhnya terhubung dengan jaringan LAN (*Local Area Network Ethernet*) berkecepatan 100 Mbps (*Fast Ethernet*) dan menggunakan sembilan *switch* produk CISCO (1 unit Catalyst 3550-SMI dan 8 unit Catalyst 2950) yang dipesan langsung dari Malaysia.

Semua data dan kontrol dipusatkan pada *server farm* yang terdiri dari lima *server* dengan spesifikasi Intel Xeon Dual Processor 2 GHz dengan kapasitas total lebih dari 800 GB. Koneksi server ke jaringan menggunakan teknologi Gigabit Ethernet (1 Gbps). Sistem operasi yang digunakan untuk komputer *client* adalah Windows 2000 Profesional, sedangkan untuk komputer *server* Windows 2000 Advanced Server. Kemampuan server dan jaringan yang ada dipersiapkan untuk memberikan layanan multimedia dalam proses pembelajaran komputer.

Keseluruhan proses instalasi, baik jaringan (instalasi kabel, setting konfigurasi *switch*) maupun server (instalasi Operating System dan setting konfigurasi domain), dilakukan sendiri oleh tenaga-tenaga intern Al-Zaytun tanpa bantuan konsultan luar.

Meja komputer yang digunakan pun didesain dan diproduksi khusus oleh unit Meubeleur Al-Zaytun dengan memperhatikan kriteria ergonomik. Berbeda dengan kebanyakan tempat-tempat kursus lainnya, meja hasil desain Al-Zaytun ini menempatkan posisi monitor komputer di bawah permukaan meja dengan beberapa keuntungan. Pertama, sudut pandang ke monitor yang dibuat sama dengan sudut pandang saat membaca buku. Desain seperti ini membuat pemakai merasa nyaman menggunakan komputer dalam jangka waktu lama.

Kedua, jarak pandang mata ke layar monitor selalu terjaga karena posisinya yang berada di bawah dan dihalangi oleh kaca pada permukaan meja. Biasanya, kata Ust. Ir. Aan Kurniawan, tatkala kita menggunakan komputer dalam jangka waktu cukup lama, tanpa terasa posisi mata semakin lama semakin mendekati monitor, apalagi jika pekerjaan itu menuntut hal-hal detail, seperti membuat rancang bangun, programming, atau desain grafis. Jika tidak dicegah, hal itu bisa merusak mata. Radiasi monitor diserap oleh kaca sehingga tidak akan mengganggu kesehatan mata.

Di samping itu, melalui Program AGICT akan tercakup empat aspek pengembangan teknologi informasi yakni *Infrastructure*, *E-Learning*, *Web Development* dan *Information System*. Sehingga di masa mendatang, seluruh civitas akademika Kampus Al-Zaytun akan mampu memahami dan menggunakan komputer secara lebih berkompeten. Kompetensi ICT itu tentunya sepadan dengan visi Al-Zaytun yang hendak membangun sebuah komunitas kampus *global science and technology society*. Dengan demikian, akan tercipta sinergi, efektivitas, efisiensi manajemen serta efisiensi sumber daya dan waktu.

Program pendidikan komputer AGICT merupakan langkah awal untuk mencapai komunitas kampus *global science and technology society* itu. Para santri peserta program AGICT akan menjadi pelaku perubahan (*reformer*) yang akan menata Kampus Al-Zaytun menuju masyarakat sains dan teknologi.

Menjadi Fakultas TI

Program pendidikan komputer AGICT, yang telah meluluskan 2.713 orang siswa, sebagai cikal bakal menuju kampus *global* berspiralkan *science and technology society*, akhirnya memperoleh momentum pada bulan Agustus 2005 dengan berdirinya Fakultas Teknologi Informasi Universitas Al-Zaytun Indonesia.

Ketika didirikan, Fakultas Teknologi Informasi UAZ Indonesia memiliki 294 unit komputer, tersebar di seluruh lingkungan Kampus Al-Zaytun, semua terakses *online* kepada internet. Untuk akses pada internet ini digunakan antena parabola VSAT (*Very Small Aperture Terminal*), dengan kapasitas *bandwith* 512 KBPS (*Kilo Bit Per Second*). Sedangkan infrastruktur jaringan antar komputer digunakan teknologi *fiber optic*. Kemudian komputer juga dilengkapi dengan 11 pusat penyimpanan data (*server*).

Tak mengherankan apabila, walau baru saja berdiri, Fakultas TI UAZ Indonesia sudah merintis berbagai kerjasama dengan beberapa lembaga sertifikasi dan institusi pendidikan luar negeri, seperti dengan ECS (*Educational Counseling Service*). Kerja sama tersebut, antara lain, melanjutkan program sertifikasi ICDL (*International Computer Driving Licence*), dan program akademik Teknologi Informasi dari NCC (*National Computing Centre*) Education, yang berkantor pusat di London. Program ini dilaksanakan secara online kepada kantor pusat masing-masing. ■ CRS, HT

Pertumbuhan Ekonomi 2007

Harapan Semakin Tipis

Pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 300 triliun dari Rp 989 triliun investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3%. Namun, pemerintah diperkirakan tidak dapat menyediakan dana tersebut karena membengkaknya sisi pengeluaran APBN.

Memasuki Triwulan ke-II Tahun 2007, perekonomian nasional akan mulai memperlihatkan signal-signal keberhasilan atau kegagalan perekonomian, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% tahun 2007. Bagi banyak pengamat, sejak awal sudah menyatakan pandangannya bahwa target itu terlalu optimis. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mendekati 6%.

Pemerintah sendiri masih tetap optimis akan dapat mencapai target yang ditetapkan. Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi hanya 6%. Bank Dunia yang memberi perkiraan paling akurat untuk pertumbuhan ekonomi tahun lalu, belum memberikan perkiraannya untuk tahun 2007.

Memanfaatkan Stabilitas Ekonomi Makro

Dari sisi kelemahan, perekonomian 2007 harus diakui tidak mendapat dorongan yang kuat dari perekonomian tahun sebelumnya. Sebagai proses berkelanjutan, kinerja perekonomian tahun berjalan sangat dipengaruhi kinerja perekonomian tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,5% pada tahun 2006, terasa tidak memiliki daya dorong apa-apa untuk menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2007.

Untuk itulah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa dalam mencapai per-

tumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, dibutuhkan investasi sebesar Rp 989 triliun. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan para pelaku ekonomi menyediakan investasi sebesar itu?

Seandainya, perekonomian 2006 mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%, maka tidaklah terlalu sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3%. Melorotnya pertumbuhan ekonomi 2006, dari target semula sebesar 6,2% hingga terjun bebas hingga 5,5%, harus dipahami sebagai pertanda dari gagalnya perekonomian membentuk akumulasi investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang melalui pembentukan modal tetap.

Inefisiensi Kinerja APBN

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, pemerintah diharapkan mampu menyediakan investasi sebesar Rp 300 triliun dari Rp 988 triliun yang dibutuhkan. Dana ini diharapkan menjadi sebagai Optimisme-optimisme yang dirancang pemerintah pada RAPBN tahun 2007 dengan pertumbuhan ekonomi 6,3%, tampaknya juga akan sirna.

Jika dibandingkan dengan tahun 2006, persoalan yang dihadapi perekonomian tahun 2007 semakin berat. Perlemahan kinerja investasi pemerintah dapat dilihat dari kinerja APBN, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang belum jauh beranjak dari tahun 2006 maupun 2005. Dari sisi penerimaan, perolehan pajak akan tetap terkoreksi sebagai akibat lang-



foto: berindo wilson

Berkurangnya nilai subsidi migas tahun ini, satu-satunya yang menolong tabungan keuangan pemerintah.

sung dari melemahnya aktivitas dunia usaha sepanjang tahun 2006. Dalam hal ini harus dimaklumi, perolehan pajak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, baik tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Dengan berkurangnya perolehan pajak akan berakibat langsung pada kapasitas pemerintah dalam berinvestasi. Hal ini akan memperkecil daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Satu-satunya yang menolong keuangan pemerintah tahun ini adalah tabungan pemerintah dari berkurangnya nilai subsidi migas. Penerimaan pemerintah mengalami kenaikan akibat penurunan harga minyak mentah dunia, sementara harga jual BBM dalam negeri tidak mengalami penurunan.

Dari sisi pengeluaran, penyerapan anggaran tahun 2007 masih menjadi momok, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2006. Pengeluaran pemerintah yang secara umum dibelanjakan untuk infrastruktur, menjadi tidak dapat diharapkan sebagai insentif dalam merangsang investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kedadaan ini semakin diperparah dengan rencana Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Dana Alokasi Umum (DAU) nongaji PNS ke daerah-daerah yang belum menyampaikan APBD 2007. Menurut Sri Mulyani, hingga Rabu, (11/4), dari 483 kabupaten dan kota di Indonesia, baru 242 kabupaten dan kota atau 50% yang menyerahkan APBD 2007.

Berdasarkan perhitungan, sekitar 90% dari total DAU daerah 2007 yang berjumlah Rp 164,787 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji PNS. Dengan demikian, 10% atau Rp 16,4 triliun berpotensi sebagai investasi. Jika ancaman ini benar-benar dilaksanakan Departemen Keuangan kepada 242 daerah kabupaten dan kota yang belum menyerahkan APBD-nya, maka sekitar Rp 8 triliun dana yang berpotensi sebagai investasi di daerah akan hilang.

Tekanan lain yang akan memperbesar sisi pengeluaran pemerintah tanpa memberi *feedback* ekonomi adalah pembayaran bunga dan pokok utang yang membesar ke Jepang, yang dipicu penguatan nilai tukar yen terhadap dolar AS belakangan ini. Demikian juga rencana pengeluaran pemerintah sebesar Rp 900 miliar untuk perbaikan infrastruktur di Jawa Timur akibat lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo. ■ **MH**

Buah Simalakama *Bubble Economy*

Aliran besar dana asing yang memasuki investasi portofolio Indonesia, berpotensi memicu turbulensi. Fatalnya lagi, dana-dana yang tergolong *hot money* ini biasanya akan keluar secara besar-besaran jika investasi di Indonesia tidak lagi dipandang menguntungkan. Jika hal ini terjadi, perekonomian secara umum akan mengalami kejutan (*shock*) dan tidak jarang menjadi pemicu krisis.

Dana asing yang terus mengalir ke investasi portofolio Indonesia, telah memicu perbedaan pendapat di antara pelaku ekonomi dan para pengamat. Pada satu sisi, aliran dana asing ini dapat dipahami sebagai wujud kepercayaan investor asing yang memandang perekonomian Indonesia memiliki prospek yang semakin baik. Namun di sisi lain, hal itu sangat berpotensi menjadi ancaman untuk menghancurkan perekonomian Indonesia, bila mana dana asing itu keluar dari investasi portofolio secara serempak.

Menguasai Setengah Saham di BEJ

Kalangan pelaku ekonomi menilai aliran investasi portofolio asing, masih dalam batas-batas yang wajar. Jika dilihat dari IHSG yang terus melambung menuju angka 2.000, kebanyakan dipengaruhi naiknya harga saham perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam seperti perusahaan-perusahaan tambang, migas dan perkebunan. Sementara aliran investasi asing ke Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan obligasi, karena masing-masing jenis investasi itu masih menguntungkan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Namun demikian, kalangan ekonom tidak sepakat terhadap pandangan para pelaku bisnis tersebut. Menurut mereka, aliran dana ke investasi portofolio sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Selain tidak didukung dengan perkembangan yang setara di sisi fundamental ekonomi, kinerja perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEJ juga tidak merefleksikan debut ISGH.

Hal yang mengkhawatirkan, jika investor-investor asing itu merasa investasi portofolio di Indonesia tidak menguntungkan lagi, tentu akan membawa keluar investasinya menuju negara-negara yang lebih menguntungkan. Pada saat itulah aliran keluar (*pull out*) investasi asing menimbulkan guncangan yang besar, bahkan tidak sedikit yang diperkirakan memicu krisis keuangan yang cukup dahsyat.

Hingga saat ini, investasi asing yang ditempatkan di SBI hampir mencapai 10% dari total dana SBI yang pertengahan April 2007 mencapai Rp 253 triliun. Dana asing ini juga menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan, dari Rp 18 triliun pada Desember 2006 menjadi Rp 22,22 triliun pada April 2007. Sementara dana asing yang ditempatkan di Surat Utang Negara (SUN), mencapai Rp 67 triliun pada Maret 2007. Dana ini juga meningkat signifikan dari posisi Desember 2006 yang masih sebesar Rp 55 triliun.

Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah posisi dana asing yang diinvestasikan pada saham-saham di BEJ. Hingga Maret 2007, dari total kepemilikan saham di BEJ yang sebesar Rp 745,16 triliun, proporsi dana asing mencapai Rp 510,74 triliun atau lebih dari separuh. Posisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, ka-



Kinerja perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEJ juga tidak merefleksikan debut ISGH.

rena bila investasi di BEJ tidak menarik lagi dan mendorong investasi itu keluar, akan mengakibatkan BEJ runtuk.

Buah Simalakama

Analisa ekonomi seperti ini memang tidak berlebihan. Krisis ekonomi yang menghantam Asia pada pertengahan 1997, juga ditengarai hal serupa. Di Indonesia, krisis moneter (krismon) dipicu *capital outflow*, yakni keluarnya dana investasi dari seluruh investasi portofolio, karena para investor memandang sangat berbahaya jika terus mempertahankan investasinya di negara yang sedang mengalami kegoncangan ekonomi.

Kekhawatiran pengulangan krisis seperti inilah yang membayangi banyak ekonom, hingga meminta BI lebih berhati-hati memenej kebijakan moneter. BI sendiri sudah menunjukkan arah kebijakan moneter yang kaku. Hal ini terlihat jelas dari penetapan Suku Bunga Acuan BI (*BI rate*) yang dipertahankan pada kisaran 9%.

Jika berpijak pada tingkat laju inflasi, yang menjadi dasar penetapan suku bunga, maka *BI Rate* sebesar 9% sudah sangat terlalu tinggi. Laju inflasi

yang saat ini berada pada kisaran 6,5%, sebenarnya menjadi momentum menurunkan *BI Rate* hingga 8% sampai 7,5%. Akan tetapi jika BI menyesuaikan tingkat suku bunganya pada laju inflasi, dikhawatirkan akan mendorong pelarian modal (*capital outflow*) yang berpotensi memicu distabilitas moneter. Dalam hal ini BI seperti berhadapan dengan buah simalakama.

Sektor Riil Tetap Stagnan

Walau di satu sisi kebijakan BI diarahkan menjaga stabilitas moneter dengan tingkat suku bunga tinggi, namun di sisi lain telah mengorbankan kinerja sektor riil. *BI Rate* yang menjadi acuan bagi penetapan suku bunga kredit dan biaya dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan, membuat suku bunga kredit perbankan yang juga tinggi.

Kondisi moneter seperti ini menjadi komponen kemahalan dalam menggerakkan dunia usaha. Dengan tingkat suku bunga kredit yang tinggi, para pelaku usaha akan berpikir dua kali untuk memanfaatkan dana perbankan, baik untuk modal kerja maupun biaya peningkatan kapasitas usahanya. ■MH

Pembentukan Pasar Tunggal dalam Piagam ASEAN



foto: berindo wilson

Kawasan ASEAN sangat diharapkan berbagai negara agar menjadi satu blok perdagangan.

Perwujudan pasar tunggal ASEAN sudah sejak lama diupayakan, namun hingga kini belum menunjukkan arah yang lebih positif. Perumusan Piagam ASEAN yang tengah berlangsung, diharapkan semakin mendekatkan ASEAN pada perwujudan pasar tunggal tersebut.

Jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan serupa di berbagai belahan dunia, kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan yang relatif tertinggal dalam berbagai hal. Keteringgalan ini memang sangat wajar, mengingat lemahnya perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN dalam 10 tahun terakhir, setelah dihajar krisis ekonomi pada pertengahan 1997.

Hingga kini, perekonomian negara-negara anggota ASEAN, belum benar-benar pulih. Tidak mengherankan jika momentum-momentum perdagangan bebas dalam satu dasawarsa terakhir tidak dapat dimanfaatkan negara-negara ASEAN secara maksimal. Semua sumber daya yang dimiliki masing-masing negara, difokuskan untuk pemulihan ekonomi,

sehingga agenda-agenda bersama, khususnya pembangunan pasar tunggal ASEAN, nyaris tidak tersentuh.

Padahal, kesempatan kawasan ini untuk maju dan menjadi sebuah kawasan yang diperhitungkan secara ekonomi maupun politik, sangat kuat. Dari sisi potensi pasar misalnya, ASEAN yang memiliki penduduk sekitar 580 juta orang berikut pertumbuhan ekonomi 4,1% pada empat tahun terakhir. Bahkan tahun 2050, kawasan ASEAN diperkirakan menjadi eksportir terbesar dunia.

Sepertinya sangat wajar jika ASEAN menjadi incaran banyak negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, China, dan India, sekiranya akan memperebutkan kawasan ini agar menjadi mitra ekonomi. Sayangnya, ASEAN sendiri belum memi-

liki struktur perdagangan yang terintegrasi, sehingga berbagai peluang ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal.

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Langkah-langkah pengintegrasian ekonomi ASEAN sebenarnya sudah menapaki jalan yang cukup panjang. ASEAN Free Trade Area (AFTA) sudah didirikan anggota ASEAN sejak 1992 di Singapura. AFTA dimaksudkan sebagai kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta lebih penduduknya.

ASEAN sebagai basis produksi dunia, sebelumnya direncanakan akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), namun dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema-skema perdagangan bebas ASEAN dituangkan dalam *Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA), berupa penurunan tarif hingga menjadi 0-5%.

Kemajuan AFTA yang cukup signifikan adalah dicapainya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Harapan Terwujudnya Pasar Tunggal ASEAN

Walaupun AFTA sendiri sudah cukup maju, namun kawasan ASEAN sendiri belum menjadi sebuah pasar tunggal yang terintegrasi. Negara-negara ataupun kawasan-kawasan lain, masih harus mengadakan perjanjian bilateral dengan masing-masing negara

ASEAN, karena dalam kenyataannya masing-masing negara ASEAN memiliki peraturan sendiri-sendiri.

Berbeda dengan Uni Eropa (UE) yang sudah terintegrasi menjadi satu blok perdagangan, dimana seluruh anggota UE memiliki peraturan perdagangan yang sama. Sebuah negara atau satu kawasan yang melakukan hubungan perdagangan dengan UE, mendapat perlakuan yang sama di seluruh anggota UE. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis.

Kawasan ASEAN juga sangat diharapkan berbagai negara agar menjadi satu blok perdagangan, sebagaimana halnya UE. Dalam pertemuan ke-16 antara Menlu ASEAN dan Menlu UE di Nuremberg, Kamis (15/3), harapan ini juga mengemuka. Bagi UE, mengikat kerja sama antarblok dengan ASEAN akan jauh lebih menguntungkan daripada mengikat kerjasama dengan masing-masing negara di kawasan ASEAN.

Harapan ini semakin diperegas Valerie Daldrup, salah satu direktur bagian di Federasi Industri Jerman. Ia mengungkapkan, peraturan-peraturan yang berbeda di antara negara-negara ASEAN menyulitkan dan membingungkan pelaku bisnis UE, khususnya Jerman, untuk masuk ke kawasan itu. Akan tetapi, jika ASEAN benar-benar telah menjadi satu blok perdagangan, UE tidak perlu lagi berhadapan dengan aneka ragam aturan yang diciptakan tiap-tiap negara ASEAN.

Ke depan ASEAN diharapkan semakin mendekat pada perwujudan pasar tunggal, seiring dengan perumusan draf awal Piagam ASEAN yang tengah berlangsung saat ini dan diharapkan rampung pada Juli 2007 mendatang, bertepatan dengan pertemuan menteri ASEAN (AMM). Piagam ASEAN yang nantinya berperan sebagai sebuah konstitusi bagi masyarakat ASEAN, akan kembali dibahas para pemimpinnya pada pertemuan puncak ASEAN di Cebu, Filipina, 19-20 November 2007 mendatang. ■ MH

DPRD Kabupaten Malinau Prioritaskan Desa-Desa Terpencil



Perahu Ketinting, satu-satunya sarana transportasi yang dapat digunakan ke Desa Sungai Tubu di hulu Sungai Mentarang, Kab. Malinau

DPRD Malinau mengusulkan penggabungan sejumlah desa untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Warga setuju, jika kebijakan itu benar-benar meningkatkan taraf hidup mereka.

Ada yang patut dicatat dari sepak-terjang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Jika anggota DPRD di banyak daerah justru lebih sering melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke luar daerah bahkan ke LN, para wakil rakyat di bumi Intimung ini justru lebih suka mengunjungi masyarakat/konstituennya di pedesaan.

Ini misalnya dibuktikan oleh kunjungan Komisi Anggota DPRD Malinau ke Desa Long Pada, Sungai Tubu, Kecamatan Mentarang akhir Maret lalu. Mereka tetap bersemangat melakukan kunjungan walau hampir semua desa yang terletak di hulu Sungai Mentarang hanya mampu dikunjungi melalui transportasi air. Itu pun, hanya dapat dijangkau dengan perahu kecil yang oleh penduduk setempat disebut "ketinting". Selain arus sungai yang deras, curam dan berbatu-batu, medannya pun

sangat berbahaya.

"Kita sangat prihatin. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas dan kehidupan penduduknya pun pada umumnya masih bergantung dari alam hutan sekitar," kata Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Drs Jhonny Laing Impang MSi, belum lama ini.

Menurut Jhonny yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malinau itu, kunjungan tersebut sebagai kelanjutan dari "Safari Natal 2006" lalu. Semua desa dikunjungi di wilayah rencana pemekaran Kecamatan Mentarang, menjadi Kecamatan Mentarang Hulu, Desa Sungai Tubu, Desa Long Pada, Long Titi, Long Nyau, Long Ranau, dan Desa Rian Tubu. Perjalanan cukup melelahkan karena dari satu desa ke desa lain hanya terdapat jalan setapak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki melintasi hutan, bahkan ada desa yang ditempuh berjalan kaki selama satu hari.

Menyikapi kenyataan masih banyaknya anak-anak tidak

sekolah dan pelayanan kesehatan yang belum memadai, DPRD Malinau akan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Mereka mengusulkan untuk merelokasi warga, dengan menggabung beberapa desa dalam satu lokasi. Sebab dengan cara ini, Pemkab Malinau akan lebih mudah memberi pelayanan kesehatan, dan pendidikan, serta pelayanan sosial.

"Bukan berarti, karena hidup masyarakat di sana tidak layak. Ini hanya usul, soal setuju atau tidaknya nanti akan dikembalikan kepada masyarakat desa itu sendiri," kata Jhonny.

Lantas, apa tanggapan Bupati Malinau DR. Drs. Marthin Billa, MM terhadap kondisi masyarakatnya itu? Menurutnya, Pemkab Malinau, lewat Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, yang disingkat menjadi "Gerbang Dema" diharapkan mampu menjadikan seluruh desa di Malinau menjadi desa mandiri sejati pada tahun 2011 mendatang.

"Diharapkan, melalui tiga pilar utama pembangunan, yakni: Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan (Pertanian, dalam arti luas) dapat membawa perubahan bagi 106 desa dalam 12 kecamatan di Kabupaten Malinau, termasuk dua kecamatan perwakilan, Kecamatan Kayan Hilir di Long Sule dan Kecamatan Mentarang di Long Pada," ungkap Marthin Billa dalam buku "Gerbang Dema" sebagai pola pendekatan pembangunan Malinau yang ditulisnya.

Menurut putera asli Dayak ini, pengertian desa mandiri adalah; desa yang dapat berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi masyarakat untuk membangun, baik dari aspek



Bupati Kab. Malinau, DR. Drs. Marthin Billa, MM

ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana yang tetap menghasilkan prinsip keadilan serta menjaga kelestarian lingkungannya.

Arti "Gerbang Dema", papar Marthin Billa, adalah suatu gerakan pembangunan yang terpadu, sinergis dan partisipatif dengan memfungsikan segala sumberdaya yang ada pada semua tingkatan pemerintahan. Sementara tujuannya, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau yang berkeadilan. Sedangkan Filosofinya: Gerbang Dema adalah pintu masuk utama. "Dema," dalam bahasa daerah Malinau artinya, terang benderang (cerah). Jadi, "Gerbang Dema" adalah; pintu utama masuk, sebagai jalan masyarakat Kabupaten Malinau menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan.

Memang, Marthin Billa mengakui, dari 50.623 jiwa penduduk Kabupaten Malinau, (data penduduk tahun 2005) terdapat 32.429 jiwa penduduk miskin, atau sebesar 64,06 persen. Dengan demikian, Kabupaten Malinau tergolong kabupaten miskin dan tertinggal. Namun, bupati yang anak pendeta, Gembala Sidang Gereja Kingmi di hulu Sungai Kayan, Bulungan ini, tetap optimis. Melalui "Gerbang Dema" sebagai pola pendekatan pembangunan, tahun 2011 masyarakat Malinau, diharapkan akan hidup sejahtera, atau setidaknya sejajar dengan daerah-daerah lain. ■ SLP/SBR



Gubernur Jabar Dani Setiawan, memberikan imunisasi saat Pekan Imunisasi Nasional.

Geliat Jawa Barat

Merajut Asa Menuju Provinsi Termaju

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja keras untuk mewujudkan visi: “Dengan Iman dan Taqwa, Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”.

Visi ini terus diinterpretasikan dan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, berupa rencana tahunan, kurun 5 tahun maupun dalam dokumen Poldas 2003-2007, Pro-peda Jawa Barat 2003-2007, Renstra Jabar 2003-2008 serta Arah Kebijakan Umum APBD Jawa Barat dan Strategi maupun Prioritas APBD.

Dalam kerangka visi inilah Pemprov Jabar periode 2003-2008 menetapkan lima misinya meliputi: peningkatan

kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jabar, pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh, pemantapan kinerja pemerintah daerah, peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama dan budaya daerah.

Visi ini pulalah yang mendorong Pemprov Jabar untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat di segala bidang kehidupan. Di bidang pendidikan, capaian kinerjanya di-

awali dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Jabar, sebagai indikator kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun, dimana pada tahun 2006 telah mencapai 77,34 %, atau mengalami peningkatan sebesar 0,15 % apabila dibandingkan dengan tahun 2005 sebelumnya yang baru mencapai 77,19 %. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2006 mencapai 61,97 %, atau mengalami kenaikan sebesar 0,23 % dibandingkan dengan tahun 2005 yang baru 61,74 %. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs pada tahun 2006 mencapai 79,38 %, atau mengalami kenaikan sebesar 1,22 % dibandingkan tahun 2005 yang baru mencapai 78,16 %. Selanjutnya dalam rangka me-

ningkatkan partisipasi sekolah pada tahun 2006 telah dilakukan upaya-upaya, antara lain akselerasi penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun dengan memberikan bantuan beasiswa kepada 150.000 siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap melanjutkan sekolahnya atau belajar di SMP/MTs dan PKBM untuk Paket B dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75 milyar.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru PNS dan guru bantu sementara (GBS), terkait upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun, pada tahun 2006 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17,9 milyar untuk 2.721 guru PNS dan 1.600 guru bantu sementara SD/MI di daerah terpencil.

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Pemprov Jabar telah melakukan kesepakatan *role sharing* pendanaan rehabilitasi dan ruang kelas baru (RKB) SD/MI dan SMP/MTs antara pemerintah pusat yang berkontribusi 50%, Pemprov 30% serta Pemda Kabupaten/Kota berkontribusi 20%. Pendanaan tersebut untuk merehabilitasi 44.695 ruang kelas SD/MI dan 1.102 ruang kelas SMP/MTs dengan target pada tahun 2008 dapat diselesaikan. Kesepakatan *role sharing* di alokasikan sebesar Rp. 172.007 milyar dari APBD Jabar tahun 2006 untuk merehabilitasi SD/MI sebanyak 2.223 ruang kelas dan SMP/MTs sebanyak 350 ruang kelas serta RKB SMP/MTs sebanyak 1.124 ruang kelas.

Terus Meningkat

Baru-baru ini, Pemprov Jabar mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat dengan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara dan Citra Pelayan Prima Tahun 2006 dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Penghargaan itu diberikan kepada Pemkot Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pa-

ngan Jabar.

Perkembangan perekonomian Jabar pada tahun 2006 mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2005. Hal ini dapat dilihat melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tumbuh dari 5,31% pada tahun 2005 menjadi 6,02% pada tahun 2006, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,5% dan berada di atas LPE rata-rata nasional sebesar 5,48%.

Sedangkan Ekspor Jawa Barat juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi regional. Sampai dengan triwulan III nilai ekspor non migas sebesar 12.658 juta dolar Amerika, jauh lebih besar daripada impor yang hingga triwulan III mencapai 884 juta dolar Amerika.

Struktur perekonomian Jabar tahun 2006 didominasi oleh sektor industri manu-

mentara perkembangan investasi, dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2006 mencapai Rp 21,9 triliun atau naik 19,58% dari tahun 2005 dengan jumlah proyek sebanyak 255 proyek yang menyerap tenaga kerja sebanyak 69.582 orang. Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa realisasi investasi di Jawa Barat menempati urutan teratas, bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan KUKM, jumlah koperasi di Jabar hingga tahun 2006 telah meningkat sebanyak 203 unit, menjadi 20.562 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 6,1 juta orang. Sementara itu jumlah UKM pada tahun 2006 adalah sebanyak 7,4 juta unit yang merupakan 99% dari jumlah unit usaha di Jawa Barat de-



Pemberian Penghargaan Keberhasilan Wajar Dikdas 9 Tahun Kepada Kab/Kota se-Jabar.

80,55% dari total kredit Jawa Barat yaitu sebesar Rp 57,77 triliun.

Terkait dengan percepatan terwujudnya pembangunan dan pengelolaan Bandara Internasional di Jabar, Badan Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Bandara Internasional Jabar telah melakukan berbagai kegiatan antara lain, penyusunan rencana pengembangan model investasi yang akan ditawarkan kepada investor dan model seleksi investor; penyusunan konsep kerjasama antara Pemprov Jabar dengan pihak ketiga. Pembicaraan dengan beberapa investor dari Brunai Darussalam, Malaysia dan Singapura; penyusunan rencana pembebasan lahan dan pengembangan konsep *one stop service*, mengkaji pentahapan pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan pembangunan bandara serta sosialisasi rencana pembangunan bandara kepada Pemerintah pusat.

Sedangkan pembangunan infrastruktur pengairan, khususnya kelanjutan pembangunan Waduk Jatigede, hingga pada tahun 2005 pendanaan bagi pembangunan waduk ini telah disetujui melalui pinjaman dari Pemerintah RRC dan sebelumnya, pada tahun 2006 direncanakan

akan dimulai pembangunan fisiknya. Namun demikian, pada tahun 2006 pembangunan fisik Waduk Jatigede belum dapat dimulai sehubungan belum ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Cina dan Pemerintah Indonesia. Diharapkan, penandatanganan kontrak bangunan fisik tersebut dapat terlaksana pada tahun 2007 ini, sehingga pembangunan fisik waduk dapat segera dimulai.

Pada tahun 2007 ini, beberapa ruas jalan tol juga dipersiapkan pembangunannya antara lain; Bogor Ring Road, Cisumjati, Ciakacir, Ciawi-Sukabumi dan Soroja. Sedangkan untuk pembangunan jaringan jalan non-tol, akan dibangun beberapa Fly Over (FO), seperti: Fo Gebang, FO Nagreg, dan jalan lingkar Nagreg. Begitu pula upaya merampungkan pembangunan jalan segmen Rancabuaya.

Berkat hasil kerja keras kita dalam pembangunan bidang infrastruktur, secara nasional Provinsi Jabar meraih penghargaan tertinggi pekerjaan umum bidang jasa konstruksi sub bidang pembinaan jasa konstruksi kategori provinsi tahun 2007, yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2006 di Istana Negara. ■ PC, AW, MLP



Dani Setiawan memberikan penghargaan kepada PNS.

faktur sebesar 40,9%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,2%, dan sektor pertanian sebesar 12,9%. Dari sisi penggunaan, konsumsi masyarakat masih mendominasi yaitu sebesar 63% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,9% dari total PDRB. Se-

ngan penyerapan tenaga kerja sebanyak 12,4 juta orang. Sementara untuk penyaluran kredit perbankan kepada UKM pada tahun 2006 telah mencapai Rp 46,53 triliun, dengan komposisi usaha mikro 51,45, usaha kecil 23,9%, dan usaha menengah sebesar 24,6%. Nilai tersebut merupakan

Tiga Kapolres di Jajaran Polwil Purwakarta Diganti

Tiga Kapolres di jajaran Kepolisian Wilayah (Polwil) Purwakarta secara serentak diganti. Polisi kini dituntut lebih profesional dan proaktif dalam mengantisipasi setiap gejolak dan kerawanan sosial.

Wilayah kerja Polwil Purwakarta sangat strategis khususnya dari aspek ekonomis dan politis. Wilayah ini merupakan kawasan penyangga ibukota negara dan wilayah Prov. Jawa Barat yang penuh dinamika politik dan pembangunan. Untuk itu, seluruh jajaran kepolisian di daerah ini harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan gejolak dan tantangan.

Kepala Polwil Purwakarta, Kombes Pol Drs. Pudjiyanto SH juga mengingatkan, sebagai daerah transit, Jawa Barat memiliki potensi besar di bidang investasi, perdagangan, pariwisata. Karena itu, penanganan lalu lintas harus dilakukan secara profesional, serta proaktif mengantisipasi kerawan-

an kriminal. Untuk itu polisi dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja secara sadar dan bertanggung jawab.

Penegasan ini disampaikan Pujianto saat melantik dan memimpin acara serah terima jabatan 3 kapolres di jajaran Polwil Purwakarta baru-baru ini. Mereka yang terkena mutasi kali ini adalah Kapolres Purwakarta dari AKBP Drs. Joko Hartanto Msi, kepada AKBP Drs. Sufyan Syarif, Kapolres Karawang dari AKBP Andap Budhi Reviyanto, Sik kepada AKBP Drs. Bambang Kristyono MH, serta Kapolres Subang dari AKBP Heri Subiansauri SH, MH Msi kepada pejabat baru AKBP Drs. Sugiono SH.

Menurut Kapolwil, paradigma kepolisian sekarang ini dititikberatkan pada pengayom-



Kapolwil Purwakarta, Kombes Pol. Drs. Pudjiyanto SH.

an, perlindungan, pelayanan kepada rakyat, penegakan hukum yang terintegrasikan dengan pencegahan tindak kriminal. Polisi juga harus mampu membangun kemitraan, karena polisi kini dituntut melakukan penggeseran kebijakan dari kepolisian klasik menjadi polisi modern.

Selanjutnya diingatkan bahwa kepolisian sekarang harus mampu mencegah tindakan kriminal. Ini bisa ditempuh melalui langkah profesional misalnya dengan membangun polisi rakyat (community po-

lice) yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok kepolisian. Namun ini harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, polisi dan rakyat bahu-membahu untuk mencegah tindak kriminal sedini mungkin.

Sejalan dengan itu, menurut Kapowil, polisi harus tetap taat pada garis komando dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya. Pada kesempatan itu, Kapolwil menyampaikan selamat bertugas dan berkarya bagi Kapolres di jajaran Polwil Purwakarta. ■ BND/SBR

Perayaan Maulid Nabi di Tenggarong

Perangi terus Kebatilan dan Kemaksiyatan

Keteladanan Nabi Muhammad SAW begitu berkesan di hati banyak orang termasuk bagi Saiful Aduar, S.Pd, anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Masyarakat Tenggarong baru-baru ini menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Al Isra, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong. Bagi Saiful Aduar, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan kecintaan kepada keteladanan Nabi. Karena itu, Aduar secara khusus mendatangkan Ustaz dari Pondok Pesantren Pemangkih Kalimantan Selatan.

Saiful Aduar, S.Pd dalam sambutannya berterus terang bahwa ia tak mungkin mengabaikan permintaan masyarakat yang telah mengundangnya menghadiri acara tersebut. Walau ia memiliki agenda yang cukup penting di Jakarta, tapi ia melihat acara ini jauh lebih penting. Karena selain peringatan peristiwa yang amat bersejarah khususnya bagi umat Islam, ia sekaligus ingin bertemu dengan para konstituennya.

Saiful Aduar menambahkan, bahwa ia juga merasa sangat termotivasi untuk tetap bersama rakyat guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi para konstituen yang telah memberinya kepercayaan untuk duduk di DPRD.

Sementara itu, saat menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, Ustaz H. Barnawie menyoroti tingkah laku dan gaya hidup umat muslim sekarang ini.

Barnawie melihat kecenderungan makin banyaknya umat yang mengidolakan gaya hidup artis dan budaya Barat. Ia mengingatkan, bahwa tanpa ketaatan menjalankan ajaran agama, bangsa dan negara kita cepat atau lambat akan makin terperosok dan mengalami kehancuran.

Budaya Barat yang selalu mengedepankan akal dan kebebasan pergaulan sering kali ditiru tanpa disaring oleh anggota masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Ini menurutnya akan merusak mental generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangunan bangsa di kemudian hari.

Guna menghindari akibat buruk tersebut, Ustaz H. Barnawie mengajak hadirin untuk kembali kepada ajaran nabi Muhammad SAW. Nabi penting diteladani karena berani menentang kebatilan dan kemaksiyatan, ujarnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Acara peringatan kali ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan antarlain dengan peresmian pembangunan Madrasah Diniyah. Madrasah ini diperuntukan bagi anak-anak masyarakat Embalut dan diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Kutai Kartanegara, Drs. H. Jamaluddin HD.

Pembangunan Madrasah Diniyah yang didukung

APBD Kukar tahun 2006 tersebut terletak di lingkungan Mesjid Al Isra Desa Embalut. Madrasah ini akan memiliki ruangan yang cukup memadai guna menampung seluruh siswa. Ustaz Jarkani yang merupakan pelopor pendirian Madrasah Diniyah, mengakui bahwa respons masyarakat di sekitar sekolah sangat positif akan pembangunan sekolah ini. "Semua ini tidak terlepas dari jasa bapak Saiful Aduar, S.Pd yang juga merupakan Anggota DPRD Kukar," katanya.

H. Jamaluddin HD dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sarana pendidikan ini merupakan langkah maju bagi Desa Embalut. Ia juga berpesan agar Madrasah Diniyah nantinya benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia melihat bahwa selama ini banyak madrasah bermunculan, tetapi akhirnya terhenti karena permasalahan internal di antara sesama pengurusnya.

Pembangunan madrasah akan menelan dana sekitar Rp.75 Juta. Selain Ustaz H. Barnawie, juga hadir Ustaz Ahmad Fauzi dari Pemangkih, dan A. Syarifuddin yang merupakan mahasiswa AlAhgaff University sebuah Perguruan Tinggi Islam di Negara Yaman. Selain Madrasah Diniyah, pada kesempatan itu juga diresmikan Sekolah Dasar Islam terpadu (SDIT) Al Ihsan di Kecamatan Muara Kaman serta peninjauan pembangunan kompleks Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong. ■ SEM, SBR

Misteri Ongen Dalam Kasus Munir

Ada bukti baru tentang “pembunuhan” aktivis HAM, Munir. Dua tersangka baru juga ditetapkan kepolisian, namun keterlibatan Pollycarpus masih terbuka.

Kasus Munir, kongkalikong di pelabuhan, kerugian PT Jamsostek akibat jatuhnya saham PGAS tahun 2006, kiprah bisnis Chairul Tanjung, serta perebutan petinggi perusahaan ternama, menjadi fokus liputan lima majalah terbitan ibu kota, pekan terakhir April.

Kasus terbunuhnya Munir diangkat Majalah *Tempo* (16-22/4) sebagai laporan sampul. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sampel toksin dari CCL Tequika di Seattle AS menyatakan, bahwa arsenik di tubuh aktivis pembela HAM itu adalah jenis S-3 yang bereaksi 30 menit hingga 1,5 jam setelah masuk tubuh manusia. Dengan hasil itu, keyakinan sebelumnya bahwa Munir diracun di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta–Singapura terpatahkan. Tapi ketika transit di Singapura.

Pernyataan seorang saksi dalam BAP sebelumnya, pada saat transit di Bandara Changi Singapura, Munir berdiri dengan dua pria, seorang berkaca mata dan satunya lagi berambut gondrong. Belakangan diketahui, kedua pria itu, Pollycarpus dan Ongen Latuihamalo, penyanyi asal Maluku. Menurut saksi tersebut, ketiganya hanya mengobrol, tidak makan atau minum. Dan setelah transit, yang berkaca mata tidak ikut penerbangan ke Amsterdam, tapi pria gondrong ikut.

Mantan Dirut Garuda Indra Setiawan dan mantan Pejabat Pendukung Operasional Penerbangan Garuda, Rohainil Aini, telah ditetapkan polisi sebagai tersangka baru. Namun demikian, tulis *Tempo*, polisi tampaknya tetap menganggap adanya keterlibatan Pollycarpus dalam pembunuhan Munir. Sedangkan mengenai perubahan lokasi pembunuhan, polisi kini memiliki bukti baru. Sayangnya, Ongen sebagai saksi kunci, tidak diketahui rimbanya.

Sedangkan *Gatra* (12-18/4) memfokuskan liputannya tentang kongkalikong di pelabuhan yang melibatkan ekspor-impor, broker, terutama pihak Bea Cukai. Menurut pengakuan sejumlah broker kepada *Gatra*, penjualan barang selundupan yang disita pihak Bea Cukai, hampir saban hari terjadi di pelabuhan. Barang ilegal dibikinkan dokumen *bodong*-nya agar bisa keluar dari pelabuhan, tentu setelah main mata dengan oknum Bea Cukai.

Barang-barang selundupan yang men-



colok, seperti mobil mewah dan motor gede, juga kerap ditukangi dokumennya agar bisa keluar dari pelabuhan seperti membuat dokumennya menjadi dokumen mebel, peralatan rumah tangga, bahkan sadajadah. Sementara untuk barang-barang impor elektronik, terutama ponsel, biasanya dilakukan dengan cara “agak halus” yakni menurunkan harganya di dokumen secara mencolok. Tujuannya, menekan pajak.

Akal-akalan lain, menurut *Gatra*, menekan pajak impor lewat main mata oknum Bea Cukai dan pengurus jasa kepabeanan guna merundingkan nilai bea masuk yang harus dibayar. Biasanya, bea resmi diturunkan sampai 12% dan dibagi rata di antara mereka. Dan akal-akalan yang lebih ekstrim, mengeluarkan barang impor tanpa dikenai pajak sama sekali. Caranya, importir sengaja dibiarkan tidak

membuat pemberitahuan impor barang. Biasanya, barang dikeluarkan malam hari. Selain itu, ada juga modus mengeluarkan barang yang masih disegel dengan menurunkannya di tengah jalan.

Obsesi pengusaha papan atas, Chairul Tanjung dalam kiprah bisnisnya menjadi laporan sampul Majalah *Investor* (12-26/4). Debut baru CT—panggilan akrabnya—di percaturan bisnis di tanah air, justru dimulai di tengah krisis moneter dan krisis ekonomi tahun 1998. Dan yang lebih menakutkan, bisnisnya mencuat dari sektor perbankan ketika bisnis perbankan sedang hancur-hancurnya. Lompatan bisnis CT bermula dari pengambilalihan Bank Mega, tahun 1996.

Di tangan CT, Bank Mega yang semula hanya bank kecil, disulap menjadi penopang Para Group—kelompok usaha miliknya. Tahun 2006, majalah *Forbes* menempatkan CT di urutan 18 pengusaha terkaya di Indonesia dengan perkiraan kekayaan mencapai US\$ 310 juta. Kini, CT disebut-sebut sebagai ‘*The Rising Star*’ dalam peta konglomerat di dalam negeri.

Visi Indonesia 2030 yang dilontarkan CT, disambut positif banyak orang, walau tak sedikit juga yang menilai terlalu muluk dan kurang realistis. Tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri melihat ide itu sebagai cita-cita yang baik, bahkan menyambutnya sebagai visi nasional.

Majalah *Trust* (16-22/4) mengangkat laporan sampul tentang kerugian PT Jamsostek akibat turunnya saham Perusahaan Gas Negara (PGAS) di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2006. Jamsostek membeli saham PGAS dalam jumlah cukup besar, sehingga merugi Rp 441,85 per saham, karena membeli dengan harga Rp 11.790,96 per saham dan menjualnya kembali Rp 11.349,11 per saham. Jamsostek memborong 43,0 juta saham dan menjual 11,07 juta saham. Menurut *Trust*, *cut loss* ala Jamsostek itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Jamsostek hanyalah salah satu bagian dari cerita tentang divestasi saham PGAS di akhir tahun 2006.

Sedangkan Majalah *SWA* (12-25/4) kembali menyoroti perebutan dan atau perpindahan orang-orang di jajaran petinggi perusahaan-perusahaan terkemuka. Menurut *SWA*, di jajaran petinggi (C-level) perusahaan-perusahaan terkemuka kini ada fenomena 4L: Lu Lagi, Lu Lagi. Artinya, orangnya itu-itu juga, yang berganti hanya perusahaan dan posisinya. Ketatnya persaingan bisnis, tuntutan bagi pertumbuhan perusahaan dan dinamika perubahan *lanskap* bisnis, membuat perusahaan harus mencari eksekutif puncak yang andal.

Tulis *SWA*, bukan hanya orang berpengalaman dan berwawasan luas, tetapi juga bertangan dingin. ■ MS, SH



Spider-Man Berubah Hitam

Spider-Man 3 menjadi film yang sangat dinanti oleh para penonton di seluruh dunia tahun ini. Siapa saja musuh-musuh Spider-Man? Apa yang terjadi pada Peter Parker dan Mary Jane?

Bila kita kembali ke tahun 2002 dan 2004, kenangan menonton film Spider-Man 1 dan Spider-Man 2 lewat bioskop masih berbekas. Saat itu, kita disuguhkan tontonan dengan rangkaian cerita yang mudah dicerna dan sederhana namun sarat dengan adegan laga hasil efek komputer.

Kita tentu masih ingat bagaimana kisah Peter Benjamin Parker seorang mahasiswa biasa yang sedang mencari jati diri. Peter mempunyai dua teman dekat, Mary Jane Watson yang diam-diam Peter cintai, dan Harry Osborn, anak seorang konglomerat. Dalam Spider-Man 1 diceritakan bahwa ayah Harry, Norman Osborn nekat



memasukkan serum percobaan ke dalam tubuhnya. Ia menjadi kuat namun setengah gila. Pada waktu lain, Peter Parker tersengat laba-laba eksperimen saat mengunjungi sebuah laboratorium. Sejak itu, tubuhnya berubah menjadi kuat dan



memiliki kemampuan hebat. Di akhir cerita, Peter Parker yang menjadi Spider-Man mengalahkan Green Goblin, ayah Harry yang sudah kerasukan. Dalam Spider-Man 2, Harry akhirnya mengetahui identitas rahasia Spider-Man dan ingin menuntut balas atas kematian ayahnya.

Tahun ini kelanjutan dari kisah Spider-Man akan kembali menghiasi layar lebar di seluruh dunia. Spider-Man 3 yang disutradarai oleh Sam Raimi ini akan beredar di seluruh Amerika Serikat tanggal 4 Mei 2007. Sementara di Indonesia bisa lebih cepat yaitu tanggal 2 Mei 2007. Film Spider-Man 3 sudah diputar perdana di Tokyo (16/4) dan respons positif pun mengalir usai penayangan film tersebut di kompleks Futuristic Roppongi Hills. Setelah *premiere* di Tokyo, film tersebut akan ditayangkan di London 23 April, kemudian Roma, Berlin, Madrid, Moskow, Stockholm, dan New York.

Dalam Spider-Man 3, Spider-Man harus menghadapi tiga musuh tangguh yaitu Harry Osborn, Flint Marko (Sandman) dan Eddie Brock (Venom). Bagi mereka yang mengharapkan banyak adegan berkelahi dengan dukungan *visual special effects*, pasti terpuaskan. Selain

Little Facts

1. Ada 3 aktor yang berpengaruh dalam Spider-Man namanya berinisial "T", Tobey Maguire (Peter Parker/Spider-Man), Topher Grace (Eddie Brock/Venom) dan Thomas Haden Church (Flint Marko/Sandman).
2. Film Spider-Man 2 meraih Piala Oscar untuk kategori Best Achievement in Visual Effects.
3. Karakter Gwen Stacy, Mary Jane, dan Peter Parker mengingatkan karakter superhero lain yaitu Lana Lang, Lois Lane, dan Clark Kent.
4. Sang pencipta Spider-Man, Stan Lee (84 tahun) menjadi legenda hidup tokoh komik. Meski usianya sudah uzur, Stan Lee masih sering tampil sebagai cameo, salah satunya dalam serial televisi *Heroes*, episode 16.
5. Hanya butuh 8 hari bagi Spider-Man 2 untuk memperoleh 200 juta dolar. Sedangkan Spider-Man pertama butuh 9 hari.

itu, Peter juga harus berusaha 'melawan' godaan Gwen Stacy yang akan menjadi saingan Mary Jane untuk mendapatkan cinta Peter. Dalam cerita awal, Peter akhirnya mengungkapkan cintanya dan melamar Mary Jane. Kabar bahagia ini lalu Peter sampaikan kepada Bibi May. Dalam perjalanan pulang, Harry Osborn menghadang Peter. Saat itu Harry sudah memakai pakaian Green Goblin bekas ciptaan ayahnya. Harry langsung menyerang Peter dengan menabrakkannya ke tembok gedung pencakar langit. Peter berusaha meyakinkan sahabatnya itu bahwa dia sama sekali tidak membunuh ayahnya. Namun Harry tidak percaya. Dengan segala upaya, Peter akhirnya bisa mengalahkan Harry.

Dalam cuplikan lain, Spider-Man berusaha menangkap Flint Marko yang kabur dari penjara. Menurut pihak berwenang, dia adalah pembunuh paman Peter, Ben Parker. Pertarungan antara Spider-Man



dengan Sandman menjadi tontonan yang sangat menarik. Marko sangat sulit ditangkap karena tubuhnya dapat berubah menjadi pasir.

Cerita kemudian bersambung tentang bagaimana Peter berusaha keras membuang *ymbiote* hitam aneh dari luar angkasa yang merasuki dirinya. Akibatnya, tubuh Spider-Man menjadi hitam semua. Mulanya Peter senang dengan 'kostum' barunya itu sebab Spider-Man menjadi lebih kuat. Namun, perlahan-lahan Peter akhirnya menyadari bahwa *ymbiote* itu merusak jiwa dan kehidupan pribadinya. Dengan usaha keras, Peter berhasil melepaskan *ymbiote* hitam itu di puncak menara sebuah gereja. Begitu terlepas, Eddie Brock yang kebetulan ada di bawah gereja, 'kejatuhan' *ymbiote* hitam itu dan merubahnya menjadi sosok baru Venom. Menonton pertarungan seru antara Spider-Man melawan Venom jangan sampai terlewatkan.

Masih banyak kejutan-kejutan lainnya dalam film ini. Film Spiderman 3 ini jelas lebih hebat dibandingkan dua film sebelumnya. Selain dikemas dengan spesial efek yang rumit juga digabung dengan aspek psikologi yang kompleks. Bahkan Spider-Man terlihat sering menengis dalam film ini. Rasanya lebih afol bila kita dan keluarga menontonnya langsung di bioskop. ■ MLP

MUSUH SPIDER-MAN

VENOM

Reputasi reporter beken Eddie Brocks yang bekerja untuk New York Globe, rival Daily Bugle hancur setelah salah satu ceritanya digagalkan oleh Spider-Man. Akibatnya Eddie dipecat dari pekerjaannya dan ditinggalkan oleh istrinya. Eddie kemudian menyalahkan Spider-Man. Dalam pertemuan di sebuah gereja, emosi dan amarah Eddie ternyata ber-



hasil membangunkan *ymbiote* yang tertinggal di sana setelah konflik terakhir dengan Spider-Man lalu menyatu dengan tubuh Eddie. Bersatu dalam kebencian terhadap Spider-Man, Venom memiliki semua kekuatan Spider-Man bahkan lebih kuat, kebal terhadap Spider Sense, bisa menyamar menjadi bentuk yang diinginkannya dan tahu identitas Spider-Man.

SANDMAN

William Baker terlahir sebagai penjahat. Sejak kecil hingga dewasa, ia biasa mencuri dan berbuat licik. Karena kenakalannya, ia dikeluarkan dari sekolah lalu bergabung dengan gangster lokal. Karena tidak ingin hal itu diketahui oleh ibunya, ia mengubah namanya menjadi Flint Marko. Marko pernah ditangkap dan masuk penjara, namun ia berhasil meloloskan diri. Demi menghindari kejaran polisi, ia pergi ke selatan dimana ia menemukan laboratorium percobaan militer yang sudah terbengkalai. Marko menetap di sana dan tidak menyadari bahwa tempat itu dijadikan tempat uji coba nuklir. Suatu pagi, pihak mili-



ter melakukan uji coba peledakan di tempat itu. Akibatnya Marko terkena radiasi tinggi yang merubah struktur genetiknya, memberinya kemampuan berubah menjadi pasir. Lahirlah The Sandman yang dapat merubah tubuh menjadi apa saja. Ia bisa mengontrol tubuhnya meski terpisah-pisah. Kepalan tangannya bisa menjadi palu godam yang besar dan kepalanya bisa berubah menjadi sekeras baja. Ia bisa menyamar menjadi tumpukan pasir bahkan bisa memasuki celah sesempit apapun. Meskipun jahat, Sandman memiliki sisi lembut dan sangat protektif terhadap keluarganya.

GREEN GOBLIN 2

Salah satu musuh paling lama Spider-Man, Norman Osborn mencoba sendiri formula yang diciptakannya untuk mendapat kekuatan super. Hasilnya dia menjadi sangat kuat tapi gila. Sebagai Green Goblin dia menimbulkan kekacauan dan membunuh Gwen Stacy sebelum akhirnya tewas oleh salah satu *glider* miliknya saat bertarung melawan Spider-Man. Anakanya Harry Osborn (sahabat akrab Peter) percaya kalau Spider-Man telah membunuh ayahnya. Kemudian Harry menemukan perlengkapan Green Goblin milik almarhum

ayahnya. Atas dasar benci dan tahu bagaimana memanfaatkannya, Harry menjadi Green Goblin 2 dan bersumpah akan menghancurkan Spider-Man dan seluruh orang terdekatnya. Sama seperti yang terjadi pada ayahnya, Harry menjelma menjadi seorang psikopat, yang terkadang waras kadang tidak.





HUT ke-55 pasukan Kopassus berpusat di Cijantung.

foto: dok

Kopassus Terus Berlatih dan Belajar

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD merayakan Hari Jadi ke-55 secara sederhana. Pasukan elit ini senantiasa diasah keandalannya dengan terus berlatih dan belajar.

Suasana khidmat dan kebersamaan menyelimi lapangan upacara di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Cijantung, Jakarta, Senin (16/4) lalu. Hari itu pasukan elit Korps Baret Merah dengan seragam loreng “darah mengalir” merayakan hari kelahirannya yang ke-55. Kesederhanaan terpancar pada upacara yang dipimpin Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Rasyid Qurnaen Aquari. Sejumlah petinggi TNI dan sesepuh Kopassus hadir dalam acara tersebut.

Selama kurun waktu usianya, pasukan yang kelahirannya digagas Brigjen Slamet Riyadi dan diwujudkan Kolonel A.E. Kawilarang dibantu Mayor R.B. Visser yang lebih dikenal dengan nama Mohamad Idjon Djanbi pada 16 April 1952, telah melaksanakan berbagai tugas khusus dalam menjaga integritas serta kedaulatan negara dan bangsa.

Diantaranya menumpas berbagai pemberontakan di tanah air seperti pemberontakan DI/TII di Jabar, PRRI/Permesta di Sumatera, perjuangan merebut Irian Barat (Trihora), Operasi Dwikora, penumpasan pemberontakan G.30.S/PKI, penumpasan PGRS/Paraku di Kalimantan,

Operasi Seroja, pembebasan pesawat Garuda “Woyla” yang dibajak di Bandara Don Muang, Bangkok, pembebasan “Tim Lorenz” yang disandera di Mapanduma, Papua dan memerangi aksi-aksi teror lainnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso menilai, pada perayaan HUT ke-55 Kopassus ini yang penting dilakukan adalah mawas diri, melakukan evaluasi agar Kopassus ke depan lebih solid dan lebih profesional, serta mempertinggi semangat kejuangannya. Sehingga Kopassus senantiasa mampu diandalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas negara dan bangsa.

KSAD menilai alat utama sistem senjata (Alutsista) bukan merupakan satu-satunya kekuatan. “Yang utama adalah manusianya, pemimpinnya, prajuritnya, dukungan rakyat, doktrinnya, kekuatan non fisiknya, moral, moril, disiplin yang tinggi, semangat, militansi serta yang terakhir adalah alutsistanya,” tegas Djoko Santoso. Dia memperjelas bahwa Alutsista itu akan dipenuhi oleh pemerintah dan negara secara bertahap.

Dengan kondisi saat ini, KSAD menilai pasukan elit ini mampu menjalankan tugasnya

dengan baik. Itu disebabkan prajurit-prajurit Kopassus mempunyai militansi yang tinggi. Kopassus dari tahun ke tahun melakukan latihan yang terkoordinir dan terencana serta terus belajar, sehingga semakin hari semakin meningkat kemampuan, disiplin dan daya juangnya.

Jenderal Djoko yang saat itu mengenakan seragam loreng lengkap dengan baret merah Kopassus menekankan perlunya pasukan elit ini meningkatkan kebersamaan dan keterpaduan dengan satuan elit lainnya, aparat pemda, kepolisian dan segenap komponen masyarakat dalam menyelesaikan setiap pelaksanaan tugas.

Kopassus juga dituntut senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah dalam meraih prestasi dan cita-cita memajukan korps dengan mengamalkan sentasi : “Tri buana Chandraca Setia Dharma”. Yang bermakna Kopassus sebagai pasukan elit yang memiliki jiwa patriotik dan mampu bergerak secara cepat di berbagai medan, senantiasa siap menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Terorisme

Berkaitan dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, Danjen Kopassus Mayjen TNI Rasyid QA berpendapat bahwa sepanjang

masih bisa diselesaikan pihak kepolisian, TNI dan terutama Kopassus, tidak perlu melibatkan diri dalam memberantasnya. “Kopassus itu baru turun apabila sudah mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurutnya, jika Panglima TNI memerintahkan Kopassus untuk menumpasnya, pihaknya akan menugaskan Satuan-81 Anti Teror, yang siap diterjunkan kapan pun dan dimana pun berada.

“Sepanjang masih bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian dan belum ada permintaan dari pihak kepolisian, *monggo silahkan*,” jelas Rasyid. Tapi, perlu diingat bahwa ini semua tentunya juga berkat adanya kerjasama antara aparat keamanan yang berada di daerah serta adanya bantuan informasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dia mengingatkan bahwa peran dari masyarakat itu sangat besar untuk memberantas terorisme di muka bumi Nusantara ini.

Menjawab pertanyaan wartawan *Berita Indonesia* soal kesejahteraan prajurit Kopassus, Rasyid menyatakan semua itu sudah diatur oleh pemerintah. “Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa bahwa uang atau gaji yang sudah diberikan kepada prajurit itu adalah cukup. Hanya tinggal bagaimana prajurit itu mengelola manajemen keuangannya,” ujarnya. Dirgahayu “Komando”. ■ **RON, SP**

Dharma Pertiwi Peduli Sosial

Gedung pertemuan Balai Sudirman, Jakarta Selasa (17/4) lalu semarak. Sekitar seribu isteri prajurit hadir di sana dalam rangka syukuran memperingati Hari Jadi ke-43 organisasi mereka, Dharma Pertiwi.

Sebenarnya HUT Dharma Pertiwi jatuh pada 14 April. Namun karena hari libur, acara peringatan dan syukuran itu baru diadakan pada 17 April 2007.

Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny Ratna Djoko Suyanto menyebutkan, peringatan HUT Dharma Pertiwi kali ini mengangkat tema “Dengan semangat kebersamaan serta kepedulian sosial, Dharma Pertiwi bertekad mewujudkan keluarga besar TNI yang harmonis, sejahtera dan terampil”. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan istri prajurit TNI, anak serta warga masyarakat sekitar.

Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto dan KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso serta sejumlah perwira tinggi lainnya hadir pada acara syukuran tersebut.

Djoko Suyanto dalam sambutannya menyebutkan tema

yang diambil itu sangat menyentuh semangat kebersamaan dengan kata kunci kepedulian sosial. Menurutnya, dua nilai itulah (kebersamaan dan kepedulian sosial) yang sekarang ini menjadi pusat perhatian organisasi Dharma Pertiwi serta unsur lainnya.

“Dengan didasari semangat kebersamaan, saya yakin Dharma Pertiwi akan melaksanakan kegiatannya dalam membantu teman-teman kita, sahabat dan juga warga masyarakat yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Panglima TNI berharap, ke depan kiprah Dharma Pertiwi dan organisasi di jajaran TNI lebih dititik beratkan pada upaya membangun kebersamaan, menunjukkan rasa kepedulian sosial pada masyarakat yang memang masih kurang beruntung.

Berkaitan dengan peringatan HUT Dharma Pertiwi sejumlah kegiatan sosial te-



foto: berindo wilson

Hari Jadi ke-43 Dharma Pertiwi di Balai Sudirman.

lah dilakukan sejak Februari lalu. Diantaranya membuka dapur umum serta menyiapkan kebutuhan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir berupa pakaian, selimut, mie instan, obat-obatan dan sebagainya.

Pengurus Dharma Pertiwi juga melakukan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Pondok Bambu. Memberikan penyuluhan

dan pendidikan keterampilan gratis kepada penghuninya. Agar sekembalinya ke masyarakat nanti mereka memiliki bekal ilmu dan keterampilan untuk menopang kehidupannya.

Selain itu juga diadakan gerak jalan santai yang diikuti sekitar 2.000 peserta dengan mengambil tempat *start* dan *finish* di depan gedung olahraga Ahmad Yani di Mabes TNI Cilangkap. ■ RON, SP

Sosialisasi Gratifikasi di Mabes TNI

Sekitar 500 perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Mabes TNI Cilangkap Rabu (18/4) terlihat begitu antusias mengikuti pemaparan dan penjelasan soal gratifikasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Acara yang digelar di Gedung Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap itu pun semakin hangat dengan dialog dan tanya jawab yang berkembang. Pasalnya, soal memberi dan menerima hadiah di Indonesia selama ini seakan sudah menjadi hal yang biasa.

Direktur Gratifikasi KPK Lambok H Hutauruk menyebutkan, tradisi memberi dan menerima hadiah yang selama ini terjadi di masyarakat sebenarnya sah-sah saja sebagai ucapan tanda terimakasih. Namun jika pemberian hadiah atau gratifikasi itu berkaitan dengan tugas atau jabatan, bisa dikategorikan sebagai suap. Ini secara tegas tercantum dalam UU No 20 Tahun 2001, pasal 12b ayat 1 yang berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Gratifikasi di sini mencakup pemberian dalam arti luas. Seperti pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Menurut Lambok, penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya ke KPK paling lambat 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan KPK serta melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.

Mereka yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat 1 itu bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi Rp 1 miliar.

Kasum TNI Letjen TNI Endang Suwarya menyatakan, kegiatan sosialisasi gratifikasi ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam menyukseskan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



foto: berindo wilson

Sosialisasi gratifikasi oleh KPK di Mabes TNI.

Kegiatan ini juga merupakan upaya pencegahan serta melakukan tindakan represif terhadap kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi.

Pimpinan TNI berharap dari hasil sosialisasi gratifikasi ini prajurit TNI akan menjadi pribadi yang bersih dalam memiliki atau mendapatkan suatu kekayaan. Serta tetap bersikap amanah, jujur dan disiplin. ■ RON, SP

Muladi

Mengembalikan Loyalitas Pemimpin

Kuat dugaan, para pemimpin mengalami kepribadian ganda, antara mengabdikan kepada partai yang menyediakan kendaraan politik baginya, atau kepada pemimpin struktural di atasnya.

Loyalitas ganda itulah yang hendak diperbaiki oleh Muladi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Mantan calon kuat Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2001-2006, tapi karena tak dipilih oleh Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya mengundurkan diri sebagai hakim agung, ini menyampaikan pemikirannya tersebut kepada pers usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).

“Demokrasi dengan sistem multipartai penuh dengan dinamika. Ada kepala daerah yang karena berasal dari partai tertentu lebih loyal kepada partai daripada presiden atau gubernur. Dalam pembangunan nasional harus satu kesatuan sistem. Loyalitas tidak sempit kepada partai,” ujar Muladi.

Pernyataan Muladi agar para pemimpin loyal ke pemerintah, bisa ditafsirkan secara beragam. Seperti, menganggapnya sulit untuk dicapai, mengingat kekuasaan politik saat ini berada di tangan partai.

Partai adalah tonggak baru demokrasi. Tak terhindarkan apabila partai politik sangat dominan mempengaruhi warna kepemimpinan di daerah. Seperti disebutkan Saldi Isra, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, loyalitas ganda sejumlah kepala daerah dalam sistem politik sekarang ini tidak terhindarkan.

Muladi sepertinya ingin sekali mengembalikan ‘roh’ Lemhannas sebagai lembaga pemikir, pengkaji, dan pemberi masukan kepada presiden.

Peran-peran tersebut pernah begitu kuat dimainkan Lemhannas pada masa era Orde Baru. Usai menerima tongkat kepemimpinan dari Ermaya Suradinata 30 Agustus 2005, Muladi dalam pernyataan pertama kepada pers berjanji akan menyusun konsep restrukturisasi Lemhannas.

Tujuannya, Lemhannas harus efektif dan efisien, agar fungsinya sebagai pemberi masukan kepada presiden menyangkut masalah-masalah strategis bisa berjalan baik. Ia juga ingin Lemhannas tetap

kritis, netral dan berwibawa.

Ermaya selaku mantan Gubernur Lemhannas pun, saat itu mengatakan kerja keras presiden harus dibantu, bukan hanya dengan *yes man*.

Kata Ermaya, para menteri harus menunjukkan loyalitasnya kepada bangsa dan negara, bukan semata kepada kekuasaan. Dia berharap Lemhannas tetap berada di atas semua partai dan golongan.

Bila Ermaya meminta loyalitas ditujukan kepada bangsa dan negara, Muladi justru meminta ditujukan kepada pemerintah.

Untuk menumbuhkan loyalitas pada sistem nasional, dan mengaplikasikan program pemerintah, Lemhannas menyiapkan kursus bagi seluruh gubernur dan ketua DPRD selama empat minggu, serta kepada bupati/walikota dan ketua DPRD selama delapan minggu.

Suka Kontroversial

Lahir di Solo 26 Mei 1943, Muladi menyelesaikan pendidikan S1 sarjana hukum di FH-Undip tahun 1968, dan S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH-Unpad tahun 1984 dengan predikat *cum laude*.

Semasa kuliah Muladi aktif di ormas mahasiswa ekstra universiter Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi Komandan Menwa, bahkan menjadi atlet olahraga beladiri judo dan karate.

Ia lalu menjalani profesi sebagai pegawai negeri, menjadi dosen pengajar di Undip Semarang, dan di berbagai universitas lain sebagai dosen terbag. Iapun diangkat menjadi Rektor (1986) dan Guru Besar FH-Undip, hingga akhirnya masuk dalam kabinet terakhir Pak Harto (1998). Sejak tahun 1997 ia duduk sebagai anggota MPR, dan anggota Komnas HAM.

Pada awal 2005 ia menanggalkan status sebagai abdi negara, mengajukan pensiun dini, lalu terjun ke kancah politik sebab ingin berbuat banyak bagi bangsa. Ia juga optimis dengan kepemimpinan Jusuf Kalla di Partai Golkar.

Muladi mengikuti pemilihan hakim agung di DPR dengan harapan tunggal,



akan terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung.

Iapun memperoleh suara tertinggi saat menjalani *fit and proper test* di DPR, di atas Bagir Manan.

Keduanya sesungguhnya dikenal dekat dengan kekuatan politik Orde Baru. Namun karena Muladi dinilai lebih dekat dengan kekuasaan Pak Harto, dan Habibie, Gus Dur lalu lebih memilih Bagir Manan akhirnya.

Sebagai pakar hukum pidana, Muladi dianggap mumpuni di bidangnya. Tetapi, karena posisi politiknya dianggap cukup kental, pernyataan Muladi seringkali dianggap subjektif oleh masyarakat.

Selaku Gubernur Lemhannas, misalnya, ia menyatakan setuju dilakukan amandemen kelima UUD 45. Perubahan yang sudah empat kali dilaksanakan menurutnya sudah merefleksikan sistem dan kehidupan politik serta kebijakan strategis negara yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, dan tegaknya hukum.

Tetapi, perubahan itu masih menyisakan beberapa keganjilan dan kejanggalan yang harus dipikir ulang.

Karena itu amandemen kelima menurutnya harus dilakukan hati-hati, serius, akurat dan waktunya pas. “Jadi yang paling tepat waktunya adalah oleh MPR yang akan datang,” kata Muladi, berbicara dalam Konvensi Nasional ke-10 Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL), di Jakarta.

Timing yang disebutkannya itu jelas-jelas bertabrakan dengan keinginan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejumlah politisi, bahkan Presiden sendiri yang ingin ngebet mengamandemen UUD 45. ■ HT



Widjanarko Puspoyo

foto-foto: repro tempo



Widjokongko Puspoyo

Keluarga Ikut Terseret

Kasus korupsi mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo ikut membelit keluarga dekatnya.

Bada yang menerpa Widjan, demikian sang mantan Dirut Bulog biasa disapa, belum berlalu. Dia bahkan harus siap dihadang perkara *anyar* selain soal korupsi pengadaan sapi impor yang lebih dulu diarahkan kepadanya.

Perkara-perkara *anyar* yang dihadapi Widjan yang kini mendekam di LP Cipinang itu, meliputi gratifikasi (penerimaan hadiah/*fee*) dalam pelaksanaan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam's Southern Food Corporation (VSFC) dan pengadaan 109 unit alat pengering dan penggiling gabah yang merugikan negara Rp 294,5 miliar. Kasus gratifikasi sendiri memberikan keuntungan kepada Widjan sebesar 1,5 juta dolar AS.

Perkara gratifikasi itu diketahui tidak sengaja saat penyidik Kejagung dan KPK menggeledah kantor Widjanarko dan rumah pribadinya. Di tempat-tempat tersebut ditemukan sejumlah dokumen

terkait pengadaan impor beras Vietnam.

Sementara itu, kasus alat pengering dan penggiling gabah ditemukan oleh BPK. Terungkap pengadaan tiga komponen utama pabrik mengalami penggelembungan harga.

Untuk mengurangi kerugian negara yang lebih besar, Kejagung melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset termasuk tanah dan bangunan di Solo, serta memblokir beberapa rekening pribadi Widjanarko.

Kasus dugaan korupsi impor beras dari Vietnam yang melibatkan Widjanarko Puspoyo ternyata ikut membelit adiknya, Widjokongko Puspoyo. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka Kamis (25/4). Widjokongko dinilai menerima dan mendistribusikan dana gratifikasi lewat PT Arden miliknya. Sebelumnya, Senin (9/4), isteri Widjanarko, Endang Ernawati, juga diperiksa di Gedung Bundar, Kejagung. Sebab, dana sebesar 109.470 dolar AS dikirim ke rekening

Endang dari PT ABI.

Aliran dana juga diterima anak-anak dan menantu Widjanarko. Anaknya Rinaldy Puspoyo menerima Rp 3,809 miliar. Puterinya, Winda dan menantunya Andre Juanda juga kebagian. Sedangkan ke rekening pribadi Widjan mengalir dana 30.000 dolar AS.

Dari pemeriksaan Rinaldy, diketahui dia pernah menandatangani akta pembelian rumah lebih dari Rp 9 miliar di Jalan Darmawangsa VIII No.75, Jakarta Selatan. Akta dan uang pembelian disediakan Winda. Tim penyidik, tengah menelusuri penggunaan uang pinjaman dari PT ABI terkait dengan pembelian rumah.

Demi kelancaran penyidikan, penyitaan aset dan pem-

blokir rekening keluarga Widjanarko dipandang perlu oleh Kejaksaan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak dipindahtangankan.

Kejaksaan juga meminta data kepada semua pihak, termasuk Bank Indonesia, berkaitan dengan aliran dana dari VSFC ke PT Tugu Dana Utama, yang mengalirkannya ke PT ABI.

Sementara itu, Kejagung mengirim lima penyidik ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Mereka ditugasi mengumpulkan alat bukti kasus impor beras.

Tim yang dipimpin jaksa Sugianto itu, selain menemui pejabat VSFC, juga mendatangi kantor HSBC di kota tersebut. Sebab bank tersebut menjadi perantara pengiriman uang ke PT ABI. ■ RH



Keluarga Widjanarko turut diperiksa

Menyoal Surat Pemulus Jalan

Pencairan dana Tommy Soeharto melalui rekening pemerintah senilai Rp 90 miliar, harus segera diusut. Hamid Awaluddin kena tuduhan baru.

Sepuluh juta dolar bukanlah jumlah sedikit. Uang sebanyak itu adalah milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pencairannya dari BNP Paribas London, Inggris, menyeret nama dua pejabat negara, Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin. Apa yang bisa lebih heboh lagi?

Kasus ini masih bergulir di berbagai media massa, apalagi terkait perkembangan baru adanya tuduhan bahwa Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin memanipulasi surat Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) agar bisa memuluskan pencairan dana tersebut.

Tuduhan itu dilontarkan Ketua PPATK Yunus Husein. Menurutnyanya, Hamid telah memasukkan data tambahan ke surat PPATK. Lembaga ini pada 17 Mei 2004 membalas surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundangan yang menanyakan soal uang milik Tommy. Dalam jawabannya, PPATK hanya menuliskan bahwa uang milik Tommy Soeharto belum pernah dilaporkan oleh perusahaan jasa keuangan ke PPATK.

Belakangan, menurut Yunus, dia melihat surat standar jawaban dari instansinya disertai surat lain yang ada penambahan data. Menurutnyanya, hal itu bukan saja salah tafsir, tetapi juga disalahgunakan.

Akibatnya, PPATK kemudian menerbitkan surat klarifikasi kepada instansi-instansi yang berwenang, terutama

Bank Indonesia, penyelidik Kejaksaan Agung dan keimigrasian. Surat klarifikasi juga dikirimkan kepada Menteri Hamid dan mantan Menteri Kehakiman Yusril.

Kompas, 19 April 2007 memberitakan, Jaksa Agung masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pencairan uang Tommy Soeharto di rekening Menteri Hukum dan HAM tersebut. Audit diperlukan untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara dengan penerimaan uang Tommy di rekening pemerintah.

Namun demikian Kejaksaan Agung belum meminta BPK untuk mengaudit, karena kewenangannya belum jelas, apakah ditangani kejaksaan, kepolisian, KPK atau Timtas Tipikor.

Pelanggaran Konvensi PBB

Sebelumnya, *Kompas*, 14 April 2007, mengutip pendapat guru besar hukum keuangan negara Arifin P. Soeria Atmadja dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Menurut Arifin, Presiden selaku penguasa keuangan negara harus bertindak tegas. Pelanggaran ini bisa menjadi preseden yang menyebabkan kekacauan keuangan negara karena tidak ada tertib anggaran.

Menurut Koordinator ICW Teten Masduki, para pejabat yang membantu pencairan dana Tommy itu, dipersalahkan atas tidak dilaporkannya pemasukan dana tunai sejumlah lebih dari Rp 100 juta.

Pasal 16 ayat 1 UU 15/2002



foto: berindo wilson

Hamid dituduh memanipulasi surat PPATK.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU 25/2003, mengatakan setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003, tindakan Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin terindi-

kasi kuat telah memperdagangkan pengaruh. Jika ini benar, merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU 7 tahun 2006. Tudingan itu mengacu pada artikel 18 konvensi tersebut. Menurutnyanya, hal itu sudah memenuhi unsur korupsi.

Tak hanya itu, menurut Teten, pencairan dana ini juga bisa dipersalahkan karena tak ada laporan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ■ RH

Aturan Soal Penarikan Uang

UU 15/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU 25/2003

Pasal 16 ayat 1 — Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan

kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 16 ayat 2 — Dirjen Bea Cukai Wajib memberikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu lima hari kerja kepada PPATK



foto: repro tempo

Indra Setiawan, salah satu dari dua mantan petinggi Garuda yang dijadikan tersangka baru.

Menunggu Nyanyian Baru

Perubahan lokasi pembunuhan menjadi bukti baru bagi polisi. Dua mantan petinggi Garuda ditangkap.

Di ketinggian langit di atas wilayah Rumania, Munir, sang aktivis itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Sebelumnya, dia mengalami diare hebat dan harus mondar-mandir ke toilet pesawat.

Setelah Polycarpus Budi Hari Priyanto, pilot maskapai Garuda, dibebaskan dari tuduhan sebagai pembunuh Munir, ketidakpuasan merebak dari pihak keluarga Munir dan rekan-rekannya sesama aktivis. Ada mata rantai yang terputus dalam kasus itu. Polisi pun kemudian memperbarui tim penyelidikannya dan mulai mencari fakta-fakta baru.

Kemudian terungkaplah sejumlah bukti baru setelah hasil sampel organ mendiagnosa Munir selesai diperiksa lebih intensif di laboratorium kepolisian di Seattle, Amerika Serikat. Hasilnya, Munir bukan diracun di pesawat seperti selama ini diduga. Melainkan di saat transit di Bandara Changi, Singapura.

Seperti dilaporkan media-media di Indonesia, dua orang mantan petinggi Garuda ditangkap dari kediaman mereka.

Kedua tersangka baru tersebut adalah mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan dan Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330 Garuda, Rohainil Aini.

Keduanya ditangkap penyidik Mabes Polri di tempat berbeda pada Sabtu pagi (14/4). Indra ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dan Rohainil ditangkap di wilayah Curug, Tangerang. Indra Setiawan tiba di ruang pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada sekitar pukul 04.00 WIB, sedang Rohainil tiba 4,5 jam sesudahnya.

Kuasa hukum PT Garuda, M Assegaf, menyesalkan penangkapan kedua tersangka tersebut. "Cara menangkapnya seperti teroris saja," katanya. Ia mengatakan, seharusnya, Polri tidak perlu menangkap tersangka, namun cukup melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan.

Sebelumnya, sudah ada indikasi tersangka baru dalam kasus Munir. Penyidikan Bareskrim Polri dalam kasus tewasnya Munir mulai mengarah kepada empat

tersangka baru. Dua tersangka merupakan purnawirawan pejabat tinggi negara dan dua lagi masyarakat sipil.

Saksi Kunci

Saat ditanya tentang saksi kunci, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri menolak menyebutkan saksi kunci dan motif kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir kendati ada kemajuan berarti dalam penyidikan.

Saksi itu adalah orang yang melihat Polycarpus dan Munir bersama di Bandara Changi, Singapura, 6 September 2004, katanya di Jakarta. "Kami harus melindungi saksi ini sehingga tidak akan saya sebutkan sekarang," katanya.

Selain saksi, Bambang juga menolak menyebutkan motif pembunuhan Munir sebab bila disebutkan malah bisa memicu polemik. "Kami tidak ingin ada polemik soal motif pembunuhan Munir," katanya. Direncanakan, alat bukti baru itu akan diserahkan Jumat (13/4).

Polri sebelumnya menyatakan siap menyerahkan alat bukti baru (novum) kepada Kajagung sebagai syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus Munir. PK itu dilakukan karena hakim kasasi Mahkamah Agung membatalkan vonis pengadilan negeri dan tinggi Jakarta yang menghukum Polycarpus 14 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Munir.

Munir ditemukan tewas di atas pesawat Garuda nomor penerbangan GA 974, Senin, 7 September 2004 yang terbang dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Hasil otopsi ahli forensik Belanda pada 13 Oktober 2004 menyebutkan, Munir meninggal karena dalam lambungnya terdapat racun arsenik dalam jumlah besar.

Saksi mata menyebutkan adanya orang lain yang terlihat bersama Munir dan Polycarpus di Bandara Changi. Sampai saat ini polisi masih menyembunyikan identitasnya sebagai Mr X, namun diduga dia adalah penyanyi dan pencipta lagu Ongen Latuihamalo.

Ongen Latuihamalo sendiri raib, namun tampaknya polisi berhasil mengetahui keberadaannya. Meski demikian, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwino menyatakan hal itu masih konsumsi internal polisi dan baru akan dipublikasikan setelah penyelidikan selesai.

Saat ini, Kepala Bareskrim Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri, yang juga ketua tim penyelidik Polri untuk kasus Munir belum mau membuka dugaan motif pembunuhan Munir. Menurut, setelah kedua mantan petinggi Garuda diperiksa, mereka akan 'bernyanyi' juga. ■ RH

Senin Berdarah di VTU

Seung-Hui Cho (23) menambah panjang daftar siswa sekolah yang melakukan penembakan di sekolah dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kebanyakan siswa pembantai ini mengalami depresi akut dan menyalahkan orang di sekitarnya atas apa yang terjadi dalam hidup mereka.

Senin pagi di kampus Virginia Tech University mendadak berubah kelabu. Perte- ngahan April itu mahasiswa dan dosen sedang sibuk mempersiapkan diri menghadapi musim ujian. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup mereka.

Jam menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit. Seorang pria berusia 23 tahun melangkah menuju asrama kampus yang dihuni lebih dari 800 orang. Kedua tangannya mengacungkan pistol 9 mm dan 22 mm lalu mencabut dua nyawa di situ. Ia kemudian menghilang. Setelah insiden itu, petugas keamanan sibuk mengamankan kampus dan melakukan investigasi atas insiden penembakan itu.

Setelah membunuh, pria itu bergegas ke kantor pos Blacksburg yang berdekatan dengan kampus Virginia Tech. Ia membawa sebuah paket besar yang isinya setumpuk surat berisi kecaman tajam, 43 foto dimana 11 foto diantaranya tertampan posenya sedang menodong pistol, dan 23 potongan rekaman



Cho Sang Pembantai

video yang dibuatnya beberapa hari yang lalu. Jam menunjukkan pukul sembilan lewat satu menit saat ia mengirimkan paket yang ditujukan ke alamat stasiun TV NBC News di New York. Ia juga menyempatkan diri mengirimkan e-mail ke Presiden NBC News Steve Capus dengan nama pengirim "Ismail Ax". Sebuah nama yang juga tertulis dengan tinta merah di lengannya.

Menyadari waktu sudah berlalu kurang lebih dua jam, pria itu segera bergegas kembali ke kampus. Baginya hari itu adalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu. Hari 'kemungkinan' dimana orang-orang 'kaya' dan 'bejat' harus mati.

Langkahnya kemudian terhenti di sebuah gedung kuliah jurusan teknik, Norris Hall. Ia masuk ke dalam lalu meng- gembok pintunya. Dengan mimik marah penuh dendam, pria itu menembakkan kedua senjatanya ke arah mahasiswa-mahasiswa yang berteriak histeris lalu lari berhamburan. Dalam waktu singkat, 30 orang tewas terbunuh dan kurang lebih 26 orang luka-luka. Melihat polisi makin mendekat dan mulai berhasil mendobrak masuk gedung kuliah, pria itu menaruh pistol ke kepalanya lalu bunuh diri. Begitu polisi mendekat, pria itu sudah sudah terburuk kaku.

Tiga hari kemudian, stasiun TV NBC News menerima paket itu. Tanpa pikir panjang, mereka segera menayangkan berita tentang adanya paket itu dan menampilkan isinya termasuk rekaman video dalam program NBC Nightly News. Dalam rekaman video itu tampak pria yang belakangan diketahui bernama Seung-Hui Cho itu menodongkan senjata ke kamera sambil mengeluarkan kata-kata kasar penuh marah. "Apa kalian tahu rasanya menjadi manusia yang disia-sia? Apa kalian tahu rasanya setiap saat dihina dan tidak mampu merasakan kesenangan kalian? Aku yakin, selama hidup, kalian tidak pernah sekalipun merasakan sakit hati itu."

Tayangan itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, mengalir melalui jaringan internet dan satelit hingga semua



Petugas keamanan mengevakuasi para ko

orang tahu bahwa pria pembunuh itu sudah lama membenci dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain atas hidupnya yang selalu diremehkan.

Semenjak 1966

Pembunuhan massal oleh siswa sekolah di Amerika ditandai semenjak tahun 1966. Tanggal 1 Agustus, Charles Whitman, mahasiswa University of Texas membunuh 14 orang dan melukai 31 orang lainnya. Ia kemudian tewas ditembus timah panas pistol polisi. Setelah pembunuhan yang dilakukan Whitman, tragedi penembakan terus berlanjut. Pembunuhan massal khususnya penembakan massal menjadi berita yang mulai sering menghiasi koran dan televisi di AS. George Hennard di Kileen, Texas; Patrick Edward Purdy di Stockton; James Huberty di San Ysidro; Eric Harris dan Dylan Klebold di Columbine High School me-

Tujuh Penembakan Paling Berdarah di Sekolah

2 Oktober 2006

Amish schoolhouse, Nickel Mines, Pa.

Charles Carl Roberts (32), seorang pengemudi truk dan ayah dari 3 orang anak masuk ke dalam sebuah kelas di sekolah Amish lalu membunuh beberapa anak kecil. Korban-korban berusia muda – semua perempuan berusia antara 6-13 tahun – disuruh berbaris di depan papan tulis lalu ia mengeksekusi mereka. Sebelumnya, Roberts menyuruh 15 anak laki-laki dalam kelas itu, begitu pula beberapa perempuan dengan anak-anak yang usianya lebih muda, untuk keluar. Negosiasi

dengan polisi gagal sebab Roberts bunuh diri. Roberts sendiri bukan anggota komunitas Amish. Polisi menduga bahwa Roberts melakukan balas dendam atas peristiwa yang pernah dialaminya saat berusia 12 tahun, dan tidak ada penjelasan lebih jauh mengapa dia menembak anak-anak itu. Lima anak perempuan mati dan 5 orang lagi dalam kondisi kritis.

13 September 2006

Dawson College, Montreal

Seorang anak muda jangkung kurus dengan

potongan rambut Mohawk memasuki kafetaria di kampus Dawson College sebelum jam 1 siang sambil membawa senjata. Penembak itu, Kimveer Gill (25), akhirnya bunuh diri setelah aksi tembak menembak dengan polisi di dalam kampus. Satu perempuan berusia 18 tahun terbunuh, dan 19 lainnya luka-luka, enam diantaranya kritis.

21 Maret 2005

Red Lake High School, Red Lake reservation, Minn.

Jeffrey Weise, siswa berusia 16 tahun



korban di Norris Hall.

nambah panjang daftar siswa pembunuh di AS. Bahkan tujuh dari delapan penembakan massal terbesar terjadi selama 25 tahun terakhir.

Pembunuhan terhadap 32 orang di Virginia Tech University, AS adalah yang terburuk sepanjang sejarah namun itu hanyalah satu bagian dari 20 penembakan massal yang terjadi setiap tahun di Amerika. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah laki-laki (95% pembunuh massal adalah laki-laki yang cenderung lebih terlatih menggunakan senjata) semakin brutal dan haus darah dibandingkan milenium sebelumnya?

Penyebab utamanya bukan hanya karena mudahnya memperoleh senjata. Menurut James Alan Fox, profesor keadilan kriminal di Northeastern University yang merupakan penulis buku "The Will to Kill" (2006) and "Extreme Killing" (2005), faktor sosial

justu sangat mempengaruhi. Dalam studinya selama lebih dari 25 tahun, James bersama koleganya Jack Levin telah mengidentifikasi lima faktor penyebab yang muncul dalam semua kasus pembunuhan massal yang pernah terjadi. Pertama, para pelaku mengalami depresi dan kegagalan yang berkepanjangan dan mulai kehilangan kemampuan untuk menanggung kesulitan dan kekecewaan hidup. Kedua, mereka menyalahkan lingkungan dan sering mengeluh bahwa orang lain tidak pernah memberikan mereka kesempatan. Terkadang mereka berpikir bahwa kelompok atau gender tertentu tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Contohnya, kasus Marc Lepine yang membunuh 14 mahasiswa teknik di University of Montreal karena pria ini merasa bahwa perempuan sudah terlalu banyak kuliah di universitas tersebut. Ketiga, para pembunuh ini kurang mendapat perhatian dari teman dan keluarganya. Mereka dikenal sebagai penyendiri. Keempat, mereka mengalami suatu peristiwa yang menurut mereka musibah berat misalnya kehilangan pekerjaan atau putus pacar. Kelima, mereka mempunyai akses untuk memiliki senjata demi memuaskan keinginannya untuk membalas dendam.

Pola hidup bermasyarakat di AS juga turut mengambil peranan. Persaingan di Amerika kini semakin ketat. Mereka yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang lemah dianggap sebagai pecundang dan para 'pecundang' ini semakin ter-

tekan karena tekanan sosial di sekitarnya. Nilai-nilai tradisional pun kian terkikis: tingkat perceraian yang semakin tinggi, menurunnya jumlah orang yang serius beragama dan kenyataan bahwa banyak orang kini tinggal di daerah perkotaan dan tidak mengenal para tetangganya. James Huberty yang membunuh 21 orang di McDonald di San Ysidro tahun 1984, baru saja pindah ke California dari Ohio setelah kehilangan pekerjaannya. Ketika ia kehilangan pekerjaan di California, dia tidak memiliki teman atau keluarga untuk berbagi sedih. Semua keluarganya ada di Ohio. Ia membunuh karena depresi.

The Question Mark Kid

Apa yang disampaikan oleh James Alan Fox, nampaknya berlaku juga terhadap diri Seung-Hui Cho. Dalam kesehariannya, Cho yang berpostur kurus ini tidak pernah mengajak bicara teman sekamarnya. Di antara 26.000 mahasiswa Virginia Tech, pria yang dibe-

sarkan di kawasan pinggir kota Washington, Centreville ini hampir tak dikenal. Ia selalu menyantap makanannya sendirian, bahkan bila diajak berbicara oleh rekannya ia hanya menjawab satu kata dan menghindari bertatapan mata.

Oleh teman-temannya ia dijuluki "The Question Mark Kid", karena pernah suatu kali dalam kelas, Cho menolak untuk bicara dan menyamakan namanya dengan simbol tanda tanya. Dalam kuliah menulis, dosen dan teman kuliah Cho juga merasakan 'keanehan' Cho. Dua tugas makalah drama yang dibuat Cho penuh dengan kekerasan dan cerita tak senonoh. Dalam tulisannya, Cho bercerita tentang pertikaian anak dan ayah tiri yang saling membunuh dengan gergaji mesin. Cho dan keluarganya pindah ke AS tahun 1992 saat ia berusia 8 tahun, dan mereka kini menjadi penduduk tetap. Demi menyambung hidup, orang tuanya bekerja sebagai tukang cuci di pinggir Washington. ■ MLP



Selasa malam ribuan orang menyalakan lilin tanda berkabung di VTU.

menembaki orang di Red Lake High School sebelah selatan Minnesota. Ia membunuh 7 orang, lima siswa, satu guru dan satu satpam. Ia juga membunuh dua orang anggota keluarganya. Ia kemudian mati bunuh diri.

1 September 2004

School Number One, Beslan, Russia

Militan Chechnya mengambil alih sebuah sekolah di Rusia dimana 1.100 murid, guru dan orang tua menjadi sandera. Tiga hari kemudian, dua ledakan terjadi di sekolah itu lalu petugas keamanan segera melakukan aksi penyelamatan. Total 333

sandera mati.

26 April 2006

Johann Gutenberg Gymnasium, Erfurt, Germany

Seorang siswa di Johann Gutenberg Gymnasium membunuh 16 orang sebelum ia bunuh diri. Kebanyakan korban yang jatuh adalah para guru.

28 April 1999

W. R. Myers High School, Taber, Alta.

Seorang anak berusia 14 tahun melakukan penembakan dengan pistol kaliber 22 mm di W. R. Myers High School. Anak laki-laki itu mem-

bunuh Jason Lang (17). Seorang siswa lainnya, Shane Christmas (17) terluka namun dapat kembali pulih. Penembakan terjadi seminggu setelah penembakan di Columbine High School.

20 April 1999

Columbine High School, Near Littleton, Colo.

Dua siswa mengenakan jubah hitam panjang memasuki kantin sekolah di Columbine High School dengan membawa tiga senjata. Mereka membunuh 12 siswa, seorang guru, dan melukai 24 lainnya. Setelah itu mereka bunuh diri. Insiden penembakan ini sempat mengguncang dunia.



Paul Wolfowitz, mantan duta besar AS di Indonesia



Shaha Ali Riza

Otoritas Moral Bank Dunia Terguncang

Penyelesaian skandal Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz masih belum jelas. Di satu pihak, kesalahan Wolfowitz bisa dimaafkan. Di lain pihak, skandal itu merusak kredibilitas Bank Dunia sebagai organisasi yang mengedepankan integritas dalam kampanye pemberantasan korupsi.

Belum genap dua tahun menjabat Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz (64) digoyang isu skandal awal April lalu. Jalinan asmara antara Wolfowitz dan Shaha Ali Riza, pejabat komunikasi Bank Dunia di Biro Timur Tengah dan Afrika Utara yang kemudian dimutasikan ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, membuahkan tuduhan tidak mengindahkan bagi reputasi mantan duta besar Paman Sam di Indonesia itu. Wolfowitz dituduh telah menggunakan pengaruhnya terhadap keputusan kenaikan gaji Shaha Riza.

Wolfowitz secara langsung merekomendasikan kenaikan spektakuler gaji Shaha Riza, yang menjadi hampir US\$200.000 atau setara dengan Rp1,8 miliar setahun sebagai kompensasi terhadap pemindahannya ke Departemen Luar Negeri AS untuk menghindari konflik kepentingan sejak Wolfowitz menjadi Presiden Bank

Dunia bulan Juni 2005. Peraturan Bank Dunia memang melarang karyawan yang memiliki hubungan supervisi menjalin asmara. Disebutkan, bila Riza tidak dipindahkan dari Bank Dunia maka akan selalu ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan AS itu, yang pada awalnya tidak mengakui isu itu akhirnya meminta maaf, "Saya telah berbuat salah, dan saya minta maaf karenanya. Seandainya saja saya bisa menuruti insting saya untuk tidak ikut campur menyangkut negosiasi soal gaji (Riza)," lanjut Wolfowitz dua beranak tiga itu.

Presiden Amerika Serikat George W Bush menyatakan akan tetap mendukung Paul Wolfowitz, dan menyebut tokoh ini telah mengemban misinya dengan sangat baik di badan dunia tersebut. Washington juga meminta Eropa untuk berhenti menghakimi Wolfowitz sampai ke 24

dewan Bank Dunia membuat keputusan.

Sebelumnya, skandal Wolfowitz menciptakan kembali persaingan AS-Eropa untuk menduduki kursi prestisius di Bank Dunia. Eropa sejak awal "keberatan" dengan penunjukan Wolfowitz yang arsitek perang Irak karena khawatir ia akan menggunakan Bank Dunia untuk membantu negara-negara sekutunya dan menghukum musuh-musuhnya. Inggris mengatakan skandal tersebut telah merusak citra Bank Dunia, sementara Jerman mempertanyakan apakah Wolfowitz masih pantas menduduki jabatan itu. Sebagai negara donor terbesar di Bank Dunia, yaitu sekitar 25 miliar dollar AS per tahun, Jerman mendesak Wolfowitz untuk tidak membahayakan otoritas moral Bank Dunia.

Karyawan Bank Dunia dan aktivis pembangunan juga mengecam langkah Wolfowitz yang ngotot untuk bertahan. Yang membuat marah karyawan Bank Dunia, menurut The New York Times, adalah "ketidakjujuran" Wolfowitz dalam kasus ini. Awalnya ia menyangkal terlibat dalam kenaikan gaji Riza, namun dokumen membuktikan ia terlibat langsung.

Keputusan menyangkut nasib Wolfowitz yang mendapat banyak simpati dari negara-negara Afrika ini sangat tergantung pada kelima negara donor terbesar Bank Dunia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris. Dengan demikian, bila Wolfowitz terpaksa mundur, kubu Eropa akan meminta peran yang lebih besar dalam menentukan penggantinya. ■ **MLP**

Satu Ponsel Dua Nomor

Belakangan ini kita disuguhkan sebuah iklan ponsel terbaru yang bisa beroperasi di jaringan GSM dan CDMA sekaligus. Jangan takjub duluan sebab ponsel seperti itu bukanlah barang baru.

Yunus, karyawan swasta yang ber Kantor di Kuningan membungkuk-lalu mengeluarkan sesuatu yang berdering dari dalam kaus kakinya yang berwarna hitam. Rupanya, Yunus suka menaruh salah satu ponselnya di situ. Mungkin dia takut dengan ulah penodong yang kian ganas di Jakarta sehingga 'menyembunyikan' ponselnya di sana. Bisa juga buat gaya-gayaan meniru penjahat yang suka menyembunyikan pistol atau pisau dalam kaus kakinya. Dua ponsel lagi ditaruhnya di saku celana sebelah kiri dan saku kemejanya. Yunus, pria 'multiponsel' ini mempunyai tiga nomor ponsel dari operator berbeda, baik operator jaringan GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*). Sama seperti Yunus, banyak orang yang memilih menggunakan CDMA karena tarif yang lebih murah daripada tarif GSM. Namun, banyak pula yang tak rela menanggalkan nomor GSM-nya secara total karena relasinya sudah telanjur menyimpan nomor itu. Akhirnya me-

reka rela menentang beberapa ponsel kemanapun kaki mereka melangkah.

Namun, orang seperti Yunus bisa saja melonjak kegirangan begitu melihat sebuah iklan ponsel terbaru yang bisa menampung dua nomor sekaligus. Mereka tidak perlu lagi repot membawa beberapa ponsel. Iklan ponsel Samsung seri SCH-W579 itu terpampang satu halaman penuh di sebuah surat kabar terbesar di Indonesia, bahkan iklan versi outdoor-nya sudah berdiri tegak di pinggir jalan raya Ibukota. Ponsel yang dapat digunakan di jaringan CDMA dan GSM ini bebas dipadukan dengan kartu GSM keluaran operator mana saja. Karena cikal bakal SCH-W579 adalah ponsel CDMA, lalu ditambahkan fungsi GSM, kemampuan CDMA ponsel ini lebih optimal.

Ponsel *dual mode* keluaran Samsung ini bukanlah barang baru. Samsung juga pernah mengeluarkan ponsel *dual mode*, seperti SCH A790, W109, A795, i819, dan SCH W379/399. Namun ponsel Samsung ini tidak dijual secara resmi alias hanya bisa ditemui di pasar gelap. Tahun 2005 lalu, Motorola juga sempat memasarkan ponsel sejenis, yaitu A840/A860 secara resmi di Indonesia. Ponsel itu digaransi oleh Motorola Indonesia selama setahun. Ketika diluncurkan harga jualnya lebih dari Rp 5 juta. Sayangnya ponsel ini kurang laku di pasaran.

Sebenarnya ada tiga versi ponsel *dual mode* yang kita jumpai di pasaran. Versi pertama adalah ponsel *dual mode*, *dual slot*, dan *single online*. Contohnya Motorola A860. Disebut *dual mode* atau *dual*

system karena bisa digunakan di dua sistem yang berbeda, GSM dan CDMA. *Dual slot* karena dibekali dua slot untuk kartu SIM dan RUIM. Sedangkan *single online* artinya dua kartu yang dipasangkan tidak bisa siaga bersamaan. Pengguna harus memilih salah satu diantaranya. Untuk berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain, pengguna cukup menekan tombol atau menu yang terdapat di ponsel. Bagi sejumlah kalangan, ponsel *dual mode* dengan *single online* masih kurang greget sebab kedua jaringan tidak bisa aktif sekaligus. Jika CDMA aktif, maka GSM mati. Begitu juga sebaliknya.

Kalau begitu, apakah ada ponsel *dual mode*, *dual slot* namun *dual online*? Ponsel versi ini sudah ada di pasaran. Contohnya ponsel Samsung yang terbaru SCH-W579, CoolPad (yulong.com.cn/product) dan Daxian (misalnya Daxian C8000). Produk CoolPad tipe 288 misalnya, bisa CDMA sekaligus GSM dan ON keduanya. Berkirim SMS juga bisa memilih apakah menggunakan jaringan CDMA atau GSM. Produk sejenis lainnya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing adalah Coolpad 768, Coolpad 268, Coolpad 298, Coolpad 289, Coolpad 238, Coolpad 728 dan Coolpad 858T. Bahkan ada juga ponsel yang bisa menggunakan dua nomor GSM di dalamnya (*dual GSM*), diantaranya Coolpad T26 G2, Coolpad 8160 G2, dan Coolpad 728 G2. Sedangkan ponsel *dual mode* versi ketiga yang mulai ditinggalkan adalah ponsel yang *dual mode*, *single slot* dan *single online*. Misalnya Samsung SCH A790. Ponsel jenis ini membuat kita harus repot-repot mematikan *handset*, lalu mencopot baterai ponsel, untuk mengganti kartu SIM dengan RUIM, atau sebaliknya.

Meski ponsel *dual mode* sudah cukup banyak, namun untuk pasar Indonesia ponsel



CoolPad 8160 G2
(dual GSM)



CoolPad 288

jenis ini masih terbilang sangat langka. Boleh dibilang ponsel SCH-W579 keluaran Samsung Electronics menjadi ponsel *dual mode* satu-satunya yang kini resmi dijual di Indonesia. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, ponsel *dual mode* merek lain akan segera menyusul. Kalau sudah begitu, konsumen bisa lebih bebas memilih harga dan fitur yang diinginkannya. ■ MLP



Samsung
SCH W579

LP bagi Penderita HIV/AIDS di Indonesia

Menjemput Maut atau “Pulang Ti

Penyebab utama kematian narapidana di Indonesia adalah virus HIV/AIDS. Ironisnya, penyakit itu diderita setelah mereka menjadi penghuni LP.

Pemuda bertubuh kurus dan berwajah cekung itu duduk termenung dengan tatapan kosong. Dedi, penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pemuda Tangerang sudah lama jadi langganan RS Umum Daerah Tangerang. Bukan sembarangan penyakit, tapi yang diidapnya adalah HIV/AIDS. Penyakit ini tertular ke tubuh Dedi lewat jarum suntik. Maklum, sebelum jadi penghuni LP, pemuda berumur 22 tahun ini termasuk pecandu berat narkoba, khususnya putaw.

“Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari saya. Saya kini hanya bisa pasrah,” ujarnya datar seperti dikutip oleh Warta Kota, Jumat, (13/4).

LP di Indonesia sejak maraknya penyalahgunaan narkotik mulai tahun 90-an, tambah menyeramkan. Bukan hanya penjahat, koruptor, pembunuh, dan sebagainya, tapi LP alias “hotel prodeo” itu juga dihuni oleh para penderita penyakit AIDS, pesakitan yang nota bene hanya tinggal menunggu “waktu”. Tak mengherankan jika dalam urusan kematian, LP kini termasuk deretan atas setelah rumah sakit.

Biang keladinya adalah akibat praktik penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis napi. Hukum di Indonesia sama sekali belum menolerir—paling tidak sampai saat ini—seorang napi yang sudah berkeluarga, misalnya, mendapat kesempatan untuk sewaktu-waktu “tidur” bersama isterinya sekalipun.

Boleh tidaknya para napi menyalurkan hasrat seksual selama di penjara, pernah jadi bahan perdebatan di tahun 70-an. Tapi akhirnya perdebatan ini meredup dan tampaknya

mengerucut pada kesimpulan “yang samar-samar” bahwa pengkekangan pemenuhan hasrat biogis merupakan bagian dari sanksi/hukuman badan yang harus diterima seorang sebagai narapidana.

Tapi, sudah barang tentu, efek negatifnya tidaklah sulit diprediksi. Homoseksual dan aneka perilaku penyimpangan seksual lainnya otomatis menjamur di lingkungan LP. Baik atas dasar “mau sama mau” atau pun karena terpaksa memenuhi keinginan “si penguasa” di lingkungan penjara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang napi yang baru masuk ke balik jeruji besi terpaksa menjadi “lelaki piaraan” seorang jagoan agar ia terhindar dari “keroyokan” penghuni sel lainnya. Penjahat sekelas Kusni Kasdut, dulu pernah membeberkan kehidupan seksualnya di penjara, dan dimuat secara bersamaan di sebuah media cetak ibukota. Para pembaca pun disuguhi memoar menyeramkan bahwa sebagai “pembunuh yang amat ditakuti” Kusni Kasdut ternyata memiliki banyak “lelaki piaraan” di dalam penjara.

Karena itu, jauh sebelum merebaknya kasus penyakit HIV dan AIDS yang banyak merenggut nyawa para napi, praktik homoseks, oralseks dan sodomi sudah tak asing lagi bagi para penghuni penjara di Indonesia. Akibatnya, kasus kematian akibat penyakit kotor seperti GO, sebenarnya tidak terbilang jumlahnya. Namun, berbagai informasi miring di seputar kehidupan napi itu relatif sulit diendus oleh pers mengingat masih tebalnya tembok penyekat informasi di era rezim Orba waktu itu. Tapi di era refor-



masi sekarang, apa yang selama ini tersimpan rapat di balik tembok penjara telah menyeruak dengan bebasnya ke tengah-tengah masyarakat. Termasuk dengan kasus kematian para napi tersebut.

Bukan cerita baru lagi bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia sekaligus juga berfungsi sebagai sarang penyakit. Ketika LP masih bernama “penjara”, kasus napi yang terserang penyakit hingga meninggal di penjara, sudah menjadi rahasia umum. Karena itu, ketika Ditjen Pemasyarakatan melansir berita meninggalnya ratusan napi di Indonesia sepanjang 2006, berita itu tidak lagi menghentikan perhatian masyarakat. Soalnya, rakyat sudah banyak tahu kondisi dan suasana LP di negara kita. Sangat berbeda jika dibanding dengan di negara maju misalnya. Di sana, hak azasi napi sekalipun, sangat dihargai dan LP juga didukung oleh dana pemeliharaan yang memadai. Tapi,

LP di Indonesia tak ubahnya seperti “ladang pembantaian”. Masuk bui sangat identik dengan kematian. Paling tidak, nasibnya akan seperti tertuang dalam lirik lagu yang cukup populer di tahun 70-an, “Apalagi penjara Tangerang/masuk gemuk pulang tinggal tulang...”

Ditjen Pemasyarakatan belum lama ini mengakui bahwa sepanjang 2006 tak kurang dari 813 orang napi di Indonesia yang meninggal akibat terkena penyakit. Kasus ini terutama merebak di LP-LP di DKI Jakarta, Banten dan Jabar dengan konsentrasi paling tinggi di LP Cipinang, Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, dan LP Pemuda Tangerang.

Penyakit HIV dituding sebagai penyebab utamanya. Lalu disusul oleh penyakit kulit, diare, TBC, dsb.

Pengidap HIV

Napi pengidap penyakit HIV merupakan kelompok paling rentan terhadap risiko ke-

nggal Tulang”



foto: Kompas

matian di LP. Terlepas dari kondisi LP kita yang rata-rata tidak manusiawi: sesak, kotor dan kumuh, kalaupun seorang napi akhirnya bisa menghirup udara bebas, umumnya hati nurani mereka sebagai insan yang berbudi boleh dikata sudah “mati”. Pelaku kejahatan seperti rampok, curanmor, penodong, penjambrat atau pembunuh bayaran, jarang bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka justru lebih banyak kembali lagi ke sel penjara sebagai penjahat kambuhan. Dengan demikian, makna “pemasyarakatan” yang diharapkan akan merehabilitasi mental dan karakter para napi, justru melenceng dari tujuan dasarnya.

Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang misalnya, kesesakan itu amat terasa. Ruangan seluas 1,5 meter x 2,5 meter itu diisi 6-8 orang. Ada pula yang diisi 10 napi. Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang seharusnya menampung 800 napi kini dijejali 3.618 o-

rang.

Bukan hanya di LP Pemuda Tangerang, kondisi seperti ini jamak terjadi di hampir seluruh LP di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Karena kelebihan penghuni itu, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) mengatakan soal LP, “Bagaimana mau mencari udara bersih, menghirup udara saja berebutan.”

Tingginya angka kematian nabi diakui, tapi Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman menyatakan, angka itu sudah menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kematian napi tahun 2006 sebesar 1,7 persen dari keseluruhan napi di negeri ini. Kematian napi pada 2005 mencapai 2,4 persen. Angka ini diperoleh dari persentase kematian napi di Jakarta.

Mardjaman mengatakan kebanyakan napi memiliki penyakit bawaan saat masuk LP. Separuh napi yang meninggal di LP adalah napi yang baru menghuni penjara kurang dari enam bulan. Selebihnya adalah napi yang menghuni 6-12 bulan. Kebanyakan napi yang meninggal terindikasi mengidap HIV.

Persatuan Napi Seluruh Indonesia yang diketuai Rahardi Ramelan prihatin melihat banyaknya napi yang sakit tapi tak tertangani dengan baik. Bersama Paul Sutopo (terpidana kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), ia mulai berinisiatif mengadvokasi pengobatan bagi napi yang sakit.

Menurut Rahardi, ribuan napi menderita penyakit kulit. Sekitar 1000 orang di antaranya menderita penyakit kulit akut. Air yang kurang bersih, napi yang tidak pernah berganti pakaian dan napi yang pecandu narkoba yang takut air menjadi faktor penyebab timbulnya penyakit kulit.

Ditambah minimnya persediaan air dan hidup berim-pitan di sel, penularan penyakit kian cepat. Apalagi napi sakit tak dipisahkan dengan yang sehat. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan persediaan obat-obatan di LP. Obat yang tersedia hanya obat-obatan dasar seperti antalgin, obat flu dan penyakit ringan lainnya.

Obat-obatan untuk penyakit kulit (scabies), TBC, diare, hepatitis, atau sariawan, yang banyak diderita napi justru tidak tersedia. Untuk kebutuhan itu, napi harus menebus sendiri resep yang dibuat dokter LP.

Persediaan Obat Sangat Minim

Rahardi bercerita, saat ia masih di LP Cipinang, ada seorang napi yang mengeluh penyakit gatal akibat penyakit kulit yang dideritanya. “Jawaban petugas apa, ya digaruk saja,” katanya.

Mengenai ketersediaan obat seorang napi LP Narkotika Cipinang mengakui tak bisa berbuat apa-apa. Ia kerap kali meminta obat ke Puskesmas Jatinegara, tapi ia justru dipimpong ke Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Setelah berusaha menanyakan ke Dinas Kesehatan Jakarta Timur, ia justru dilempar ke Puskesmas lagi dengan alasan obat-obatan untuk LP dialokasikan ke Puskesmas.

Kurangcepatnya menangani si sakit dapat juga berakibat fatal. Suatu kali kata Rahardi, ada napi yang hendak dibawa ke RS. Dia sudah dibawa ke ambulans. Tapi mobil pengangkut pasien itu belum bisa berangkat karena harus menunggu surat izin berobat ke luar. Sayangnya, saat izin itu keluar, napi itu keburu meninggal.

Mardjaman menolak jika kematian ratusan napi itu hanya dikaitkan dengan buruknya kondisi penjara yang muncul seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni LP dan rutin di negeri ini. Di LP Batam dan Rutan Bandung misalnya, yang juga kelebihan penghuni, angka kematian



foto: tempo

napinya kecil.

Baby Jim Aditya, seorang aktivis penanggulangan HIV/AIDS menilai peningkatan penghuni penjara berjalan seiring dengan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Tahun 2003, jumlah penghuni penjara 71.587 orang (kapasitas 64 ribu orang). Pada 2004, penghuni naik menjadi sekitar 86 ribu orang (kapasitas 66 ribu orang). Pada 2005, penghuni penjara menjadi 97 ribu orang (kapasitas 70 ribu orang). Pada Januari 2007, penghuni sudah naik menjadi 118.453 orang.

Dari jumlah itu, sekitar 30 persen atau sekitar 32 ribu napi terlibat kasus narkoba. Dan sekitar 72,5 persen dari angka itu atau 23.200 napi merupakan pecandu/pemakai narkoba.

Tujuan penjara pada dasarnya adalah pemasyarakatan narapidana. Artinya, para napi masih diharapkan menjadi warganegara yang baik selepas menjalani hukuman di penjara. Namun, dalam praktiknya, di penjara mereka bukan dimasyarakatkan, tak dimanusiakan. Tapi yang diterima hanyalah siksa dan hina. Penjara bagi mereka cenderung sebagai tempat untuk menunggu kematian. Entah berupa kematian jasmani atau kematian hati nurani. ■ SBR

Bangun Prasarana, Optimalkan Pelayanan

Pembangunan jalur ganda KA Tanah Abang-Serpong secara fisik maupun waktu pekerjaannya sesuai standar internasional.

Mulai beroperasi-nya jalur ganda Tanah Abang-Serpong (21/4) sepanjang 23 Km dan menelan biaya Rp. 314 miliar ini memiliki arti penting terhadap kemampuan bangsa sendiri. Bila anak bangsa diberi kesempatan, mereka mampu melakukan pekerjaan yang tidak kalah dengan pemain luar dalam membangun prasarana KA di Indonesia.

Selama ini pembangunan prasarana KA cenderung mendapat pinjaman atau hibah dari negara donor, misalnya pembangunan *double track* Manggarai-Cikarang yang mendapat bantuan dari Jepang. Secara bertahap pembangunan jalur KA yang selama ini bergantung dari luar negeri, semakin berkurang.

Menurut Soemino Eko Saputro, Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, pembangunan jalur ganda berskala besar merupakan yang pertama. "Lintas Serpong Line sebagai bukti bahwa di era kompetisi dewasa ini, kita telah menunjukkan kemampuan yang tidak kalah dengan

negara maju dalam membangun infrastruktur KA," tutur Soemino kepada *Berita Indonesia* di kantornya.

Dengan adanya revisi UU 13/92 yang disahkan oleh DPR, kalangan swasta maupun pemerintah daerah mendapat kesempatan untuk membangun prasarana KA. "Sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan prasarana maupun sarana perkeretaapian Indonesia sudah cukup memadai," kata Soemino. "Namun kita realistis, di samping penggunaan dana APBN, kita tetap bekerja sama dengan negara donor dalam membangun Perkeretaapian Indonesia," ungkapnya.

Kereta api sebagai moda angkutan massal dan andal, diharapkan menjadi tulang punggung angkutan darat. Ke depan dapat diciptakan suatu keterpaduan pada transportasi intermoda dan pada gilirannya akan menjadi simpul dalam mengoptimalkan berbagai peluang dan berbagai inovasi baru, terutama dalam memenangkan *market share* yang ada.

Tahun 2007, ungkapnya,



foto: humas dephub

Peninjauan: Soemino Eko Saputro (tengah) saat memberikan penjelasan kepada Wapres Jusuf Kalla, disaksikan Menhub Hatta Rajasa, ketika meninjau prasarana KA beberapa waktu lalu.

diharapkan jauh lebih baik dibanding tahun 2006. Untuk mencapai obsesi itu ditempuh berbagai langkah efisiensi sehingga dapat memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya.

Menurutnya, selesainya pembangunan prasarana KA Tanah Abang-Serpong perlu diimbangi dengan penambahan jumlah KRL yang memadai, dimana lalu lintas KA semakin optimal dan memiliki kapasitas angkut yang maksimal. Adanya layanan tiket elektronik, sterilisasi peron dan sterilisasi stasiun, menjadikan semua penumpang merasa aman dan nyaman selama berada di stasiun.

Komitmen

Secara terpisah, Ir. Setiawan selaku kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja (satker) Tanah Abang-Serpong mengatakan, jalur baru itu sudah bisa digunakan dengan kecepatan KA antara 60-80 Km/per jam. Ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama yang penuh komitmen, se-

hingga pembangunan prasarana jalur ganda Tanah Abang-Serpong sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan serius guna membangun prasarana kereta api, misalnya, dari satu jalur menjadi *double track*, prasarana yang tua secara bertahap diganti dengan yang baru.

Sebelumnya, kata dia, bantalan rel kayu diganti dengan bantalan beton, termasuk jenis rel (semula R-42 dan R-33 sekarang menjadi R-54). Memang disadari pembangunan prasarana kereta api butuh waktu dan dana, namun secara bertahap pembangunan prasarana KA semakin jelas kelihatan.

Sebagai pelaksana di lapangan, Setiawan, berharap pembangunan jalur ganda dapat mendukung meningkatnya kapasitas angkut serta mempercepat arus lalu lintas KA, di mana pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di semua lini. ■ **RI, MLP**



foto: berindo samsuri

Serpong Line: Stasiun Serpong, Setiawan (inset) Satuan Kerja Tanah Abang-Serpong.



Maket Bandara Sutan Thaha, Jambi.

Tantangan dan Peluang

Mulai tahun 2007, pengelolaan Bandara Sultan Thaha-Jambi dan Depati Amir-Pangkal Pinang berpindah tangan dari Departemen Perhubungan ke PT Angkasa Pura II. Ini dilakukan demi mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan.

PT Angkasa Pura (AP) II merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang melayani jasa penerbangan (Aeronautika) dan jasa penumpang Bandara (non Aeronautika). Saat ini, PT AP II sedang mengelola sepuluh Bandara utama di kawasan Barat Indonesia, yaitu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Polonia (Medan), Bandara Supadio (Pontianak), Bandara Internasional Minangkabau (Padang), Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Bandara Hussein Sastranegara (Bandung), Bandara Sultan Iskandarmuda (Aceh), Bandara Kijang (Tanjung Pinang). Sedangkan yang baru bergabung, Bandara Sultan Thaha (Jambi) dan Depati Amir (Pangkal Pinang).

Menurut S. Tulus Pranowo, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. AP II, penyerahan pengelolaan Bandara Sultan Thaha-Jambi dan

Bandara Depati Amir-Pangkal Pinang, 1 Januari 2007 dari Departemen Perhubungan kepada PT Angkasa Pura II, merupakan tantangan dan peluang, baik dari segi bisnis maupun pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan. Oleh karena itu, PT AP II mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar kepada masing-masing Bandara untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar mampu bersaing di era yang sangat kompetitif ini.

"Persaingan di era globalisasi merupakan tantangan di

masa mendatang. Agar bisa menghadapi persaingan itu, berbagai upaya pengembangan bisnis terus dilakukan, di samping pengembangan usaha lain yang terkait dengan jasa penumpang dan perkembangan pasar," kata Tulus kepada *Berita Indonesia* di kantornya.

Jasa *Aeronautika* merupakan bisnis utama, kata Tulus, dimana dalam melakukan aktivitasnya, PT AP II senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik aspek fasilitas maupun pelayanan yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pengguna jasa penerbangan.

Selain itu, pelayanan di bidang *Non Aeronautika* juga semakin ditingkatkan. Pengguna jasa di area bandara bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka bisa *shopping*, menukar uang, ber-

istirahat di area bandara tanpa harus bepergian jauh dari bandara.

Prioritas Keselamatan

Demi meningkatkan pelayanan, anggaran yang disiapkan menyangkut *safety Aeronautika* mencapai 30-60% dari anggaran yang ada. Sebab komitmen PT AP II terhadap keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama, di samping perhatian terhadap *security* (keamanan).

Menyinggung tentang peralatan, Tulus mengakui, peralatan canggih saat ini perlu penyesuaian, namun itu perlu waktu dan dana. Pemeriksaan dan perawatan berbagai peralatan harus dilakukan secara berkala dan kontinu. Prioritas utama perusahaan adalah keselamatan, baru berkembang ke yang lain. Bila bicara keselamatan dan keamanan untuk investasi, mayoritas manajemen pasti setuju.

Menyinggung soal penumpang dilarang membawa cairan ke pesawat, Tulus mengungkapkan, bahwa langkah itu diambil karena belajar dari pengalaman yang terjadi di London tahun 2006 lalu. Ada kemungkinan penumpang membawa cairan-cairan tertentu yang bila diramu bisa menjadi bahan peledak. Namun bila cairan itu sifatnya netral, tetap diperbolehkan. Seperti membawa minuman botol, asal diminum saat diperiksa petugas, tidak ada masalah. Prosedur larangan membawa cairan ini menurutnya disesuaikan dengan perkembangan yang ada. ■ RI, MLP



Maket Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.

Semifinal Piala Champion “Dirajai” Inggris

Pamor Inggris sebagai salah satu raksasa sepakbola di dunia makin menjulang. Tiga klub elit dari negeri Pangeran Charles ini berhasil menembus semifinal Piala Champion. Mampukan AC Milan lolos dari “kepongangan”?

Untuk pertama kali babak semifinal Piala Champion dikuasai klub-klub Inggris. Manchester United, Chelsea dan Liverpool berpeluang menciptakan *all-English final* seperti yang pernah dilakukan Spanyol pada 2000 dan Italia pada 2003.

Para pencinta Premiership tentu akan teringat pada periode dominasi Inggris akhir 1970-an dan awal 1980-an. Saat itu, klub Inggris yang diwakili Liverpool, Nottingham Forest dan Aston Villa berhasil menjadi juara Piala Champion enam kali berturut-turut antara 1977–1982.

Inggris sempat tenggelam setelah UEFA menjatuhkan skor-sing lima tahun antara 1985–1990 menyusul tragedi Heysel, dimana supporter Liverpool bertanggung jawab atas tewasnya 39 penonton di final Piala Champion 1984/1985.

Pada periode tersebut, tercatat 16 klub Inggris tidak dapat tampil di kompetisi Eropa. Dari Everton yang seharusnya bermain di Piala Champion 1985/86, ke Norwich City, yang semestinya

tampil di Piala UEFA 1989/90.

Kembalinya kekuatan klub Inggris dimulai oleh keberhasilan United menjuarai Liga Champion 1998/99. Isyarat semakin menjadi-jadi setelah Liverpool menjadi kampiun 2004/05 dan Arsenal berhasil lolos ke laga final 2005/2006.

Sekarang dengan tiga klub Inggris ada di semifinal, yang berarti paling tidak satu tempat di partai final akan menjadi milik klub premiership. Wajar jika negeri Pangeran Charles merasa masa kejayaan sudah kembali.

Uang, Pemain, Manajer

“Fakta bahwa tiga klub Inggris lolos ke semifinal barangkali membuat liga kami menjadi yang terbaik di Eropa. Naluri kompetitif dan kualitas sepakbola Inggris sudah banyak berkembang,” sergah manajer United, Sir Alex Ferguson.

Pengakuan diucapkan dua orang pelatih yang timnya disingkirkan klub Inggris: Luciano Spalletti (Roma) serta Ronald Koeman (PSV). Roma dipermalukan 1-7 oleh United dan PSV dibuat Liverpool gagal membuat gol.



Pemain Manchester United Wayne Rooney dan Christian Ronaldo.

“Klub Inggris punya uang, pemain bagus dan manajer yang bagus,” sebut Koeman. Argumen Spalletti lebih gamblang. “Klub Inggris seperti Italia beberapa tahun lalu. Mereka punya pemain-pemain bagus dan keuangan hebat,” kata Spalletti seperti dikutip si-

tus resmi UEFA.

“Klub Inggris lebih fisik dan lebih komplit. Pemain-pemain mereka lebih siap berduel satu lawan satu karena terbiasa melakukan itu di Premiership. Sekarang mereka membawa kekuatan tersebut ke Eropa,” tambahnya. ■ SBR

AC Milan Diharapkan Memupus Rasa Malu Italia

AC Milan menjadi harapan terakhir Negeri Piza di ajang Piala Champion. Wajar media Italia serentak memuji prestasi Milan.

“Terbang, Milan, Terbang!” tulis koran *La Gazzetta dello sport*. Publik Italia berharap Milan bisa menebus rasa malu yang muncul se usai Roma dibantai Manchester United 1-7 di partai kedua perempat final. Milan akan bertemu United di babak semifinal 24 April dan 2 Mei nanti.

“Setelah skor 1-7 tersebut, orang membuat

lelucon tentang sepakbola Italia. Saya bisa memastikan bahwa kami, orang Italia, punya hati dan karakter. Milan sudah menunjuk itu,” sergah gelandang Milan, Gennaro Gattuso.

Milan juga membuat bangga Italia karena konsistensi mereka di Liga Champion. Bicara soal nasionalisme sejati, Italia yang diwakili Milan, bisa juma. Aktor-aktor penentu I Rosseneri merupakan orang asli Italia dari pemain sampai presidennya.

Lihat saja saat starter Milan menekuk Bayern

Munchen 2-0, Rabu (11/4). Ada tujuh Italiano yang mengisi posisi-posisi vital di semua lini. Mereka adalah Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini dan Filippo Inzaghi.

Bandingkan dengan United yang cuma didukung lima Inggris: Rio Ferdinand, Wes Brown, Michael Carrick, Alan Smith, serta Wayne Rooney. Jumlah pemain asli Inggris di Liverpool dan Chelsea malah lebih parah. ■ SBR

Pelatnas SEA Games Mulai Kalkulasi Pencoretan

Satuan Tugas (Satgas) Pelatnas mulai mengkalkulasi cabang mana saja yang atletnya harus dikurangi. Perhitungan itu didasari perkembangan yang terjadi di Pelatnas lewat berbagai uji coba.

“Dengan kondisi seperti sekarang ini, kami harus tegas.

Atlet yang dikirim harus benar-benar cakap, *to win the game*. Jadi yang ada di Pelatnas harus atlet elite dengan tugas meraih medali emas atau perak,” sebut Achmad Sutjipto, Ketua Satgas Pelatnas, Rabu (18/5).

Rencana Satgas untuk bertindak tegas memang ditunggu sejak awal. Selama ini memang muncul pertanyaan tentang fokus strategi Satgas menghadapi SEAG 2007 yang dianggap masih gamang. Dari berbagai keputusan, tampak satgas tidak fokus kepada olahragawan yang berpotensi meraih emas. Tapi juga mengakomodasi atlet yang sama

sekali tidak berpeluang. “Hal ini tidak perlu terjadi,” ujar Fritz Simanjuntak, pengamat olahraga.

Belum lagi inefisiensi biaya yang terjadi di awal pelatnas saat satgas melakukan perencanaan dengan permintaan dana Rp 300 miliar. Bukan dana yang sudah dialokasikan lewat APBN sebesar Rp 70 miliar. Walhasil, di awal Pelatnas, Satgas sempat merekrut 800 atlet sementara atlet yang berpotensi meraih medali emas hanya 100 orang.

Karena perhitungan di awal seperti itu, ditengarai terjadinya inefisiensi biaya tes kesehatan, honor untuk 700 orang olahragawan. “Ditambah bengkaknya personel Satgas, diperkirakan inefisiensi biaya mencapai sekitar Rp5



Cabang panahan di nomor compun tidak akan diberangkatkan.

miliar,” ujar Fritz.

Fisik Masih Lemah

Karena itu, di momen pertama validasi, Satgas mulai memainkan tongkat tegasnya. Apalagi berita turunnya dana tambahan dari pemerintah, Rp 70 miliar lagi, menuntut Satgas harus lebih selektif dan efektif demi mencapai target.

Cabang panahan yang baru saja meraih perunggu di nomor *compound* individu putri di seri Piala Dunia di Ulsan, Korsel, menurut Sutjipto malah tidak akan memberang-

katkan nomor *compun*. Ini setelah melihat kenyataan bahwa prestasi mereka jauh di bawah Malaysia dan Filipina. Tak hanya itu, atlet nomor *recurve* skornya masih di bawah 1.300. “Jadi kalau pun harus berangkat, paling hanya empat atlet,” tambah Sutjipto.

Begitu pula dengan tinju. Hanya peraih perunggu di turnamen Piala Raja Thailand dua minggu lalu yang akan dipertimbangkan. Cabang gulat pun tampaknya hanya akan mengirim lima atlet putra, tanpa pegulat putri. ■ SBR



Peraih perunggu di cabang tinju masih dipertimbangkan.

Munas PSSI Rawan Politik Uang

Politik uang amat rawan terjadi dalam setiap pemilihan calon ketua sebuah organisasi, termasuk PSSI. Guna mencegah terjadinya praktek kotor tersebut, Panitia Musyawarah Nasional PSSI di Makassar Sulawesi Selatan, 19-21 April lalu telah melakukan berbagai upaya.

Salah satunya dengan verifikasi formulir pengajuan calon ketua umum dan komite eksekutif. Selanjutnya, pembatasan *money poli-*

tics dilakukan dengan mengedepankan aturan pemilihan lewat tata tertib munas yang disesuaikan dengan Pedoman Dasar baru berdasarkan Statuta FIFA.

“Apapun hasil munas nanti harus diterima. Kalau memang hanya ada satu calon yang muncul jangan langsung alergi karena sama sekali tidak ada niat kami untuk merekayasa,” kata Nugraha Besus, Rabu (18/4).

Seorang calon baru bisa maju ke pencalonan

setelah mendapat dukungan minimal 125 suara. Selanjutnya para calon harus memenuhi kriteria umum dan verifikasi dari Komite Pelaksana Munas PSSI, baru bisa masuk dalam pemilihan tahap pertama.

Jika ada satu calon, dia akan terpilih secara aklamasi. Tapi jika lebih, akan diambil dua orang untuk masuk dalam tahap berikutnya, kecuali salah satu calon berhasil meraih 50 persen suara plus satu. ■ SBR

Asap Untuk Nyamuk-Nyamuk Nakal



Pengasapan massal melalui pesawat udara tidak efektif.

Pemerintah terlambat memberi pertolongan, terlambat melakukan pengasapan, dan terlambat menyediakan obat. Keterbatasan dana dan anggaran yang terlambat cair menjadi dalih.

Demam berdarah dengue (DBD) kembali mewabah di Ibukota. Penyakit yang dibawa nyamuk *Aedes aegypti* itu telah membunuh 41 orang sejak Januari silam. Ratusan lainnya selamat setelah menghuni lorong-lorong rumah sakit.

Seperti diberitakan berbagai media massa, Gubernur DKI Sutiyoso menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) DBD di wilayah Jakarta. KLB demam berdarah menunjukkan lingkungan hidup yang tidak sehat. Sungguh memalukan status itu di depan forum internasional, karena Jakarta adalah ibukota negara.

Banyak pihak menilai pemerintah setengah-setengah dalam mengatasi wabah ini. Dana, lagi-lagi menjadi alasan

klasik. Pengasapan (*fogging*) di 135 kelurahan zona merah demam berdarah, terpaksa ditunda. Alasannya, pengasapan perlu dana sekitar Rp17 miliar sedangkan anggaran yang tersedia hanya Rp 1,2 miliar.

Padahal Dinas Kesehatan Jakarta memiliki dana Jaminan Penanganan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) tahun 2007 sebesar Rp 200 miliar. Selain itu masih ada sisa anggaran JPK Gakin 2006 sebanyak Rp 25 miliar.

Sutiyoso dinilai hanya menciptakan kesan telah memerhatikan masyarakat, karena korban masih terus berjatuhan. Meski status Jakarta sudah dinyatakan KLB, korban masih saja bertambah, penderita masih saja berjejer di lorong-lorong rumah sakit.

Masyarakat juga tetap belum melaksanakan perilaku sehat sehari-hari. Aksi pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan tiga M—mengu-ras, menutup, dan mengubur—yang dilakukan setiap Jumat, tidak efektif. Petugas dan masyarakat tidak sungguh-sungguh melaksanakan.

Kini, setelah rancangan peraturan daerah mengenai flu burung, Gubernur Sutiyoso mengajukan rancangan perda tentang demam berdarah. Setelah menjadi aturan formal, yang dibutuhkan selanjutnya adalah aparat penegak hukum yang tegas dan adil.

Namun, seperti dilaporkan *Republika*, 10 April 2007, perda khusus DBD itu ditang-gapi dingin oleh DPRD. Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Agus Darmawan, perda

khusus DBD tidak diperlukan karena pengaturannya bisa diselipkan dalam perda kesehatan yang belum selesai dibahas sejak empat tahun lalu. Padahal, perda tersebut sudah menghabiskan dana Rp 400 juta sampai Rp 500 juta.

Pengasapan

Sebelumnya, Pemprov DKI meminta bantuan TNI untuk melakukan pengasapan massal di seluruh kelurahan di Jakarta. Pemprov DKI awalnya mengusulkan pengasapan massal di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan pesawat udara untuk memberantas nyamuk berdarah yang menularkan DBD. Namun usul tersebut dibatalkan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Wibowo Sukijat menyatakan pengasapan massal melalui pesawat udara tidak efektif dilakukan karena terhambat dengan keberadaan gedung-gedung tinggi di Ibukota.

“Tidak memungkinkan dilakukan untuk melakukan pengasapan massal melalui pesawat udara. Di Jakarta banyak gedung tinggi,” kata Wibowo.

Keluhan soal kualitas mesin *fogging* yang diberikan oleh Biro Administrasi Wilayah (Adwil) Pemprov DKI Jakarta yang dikeluhkan. Banyak mesin yang rusak ketika akan digunakan, sehingga proses pengasapan menjadi terkendala.

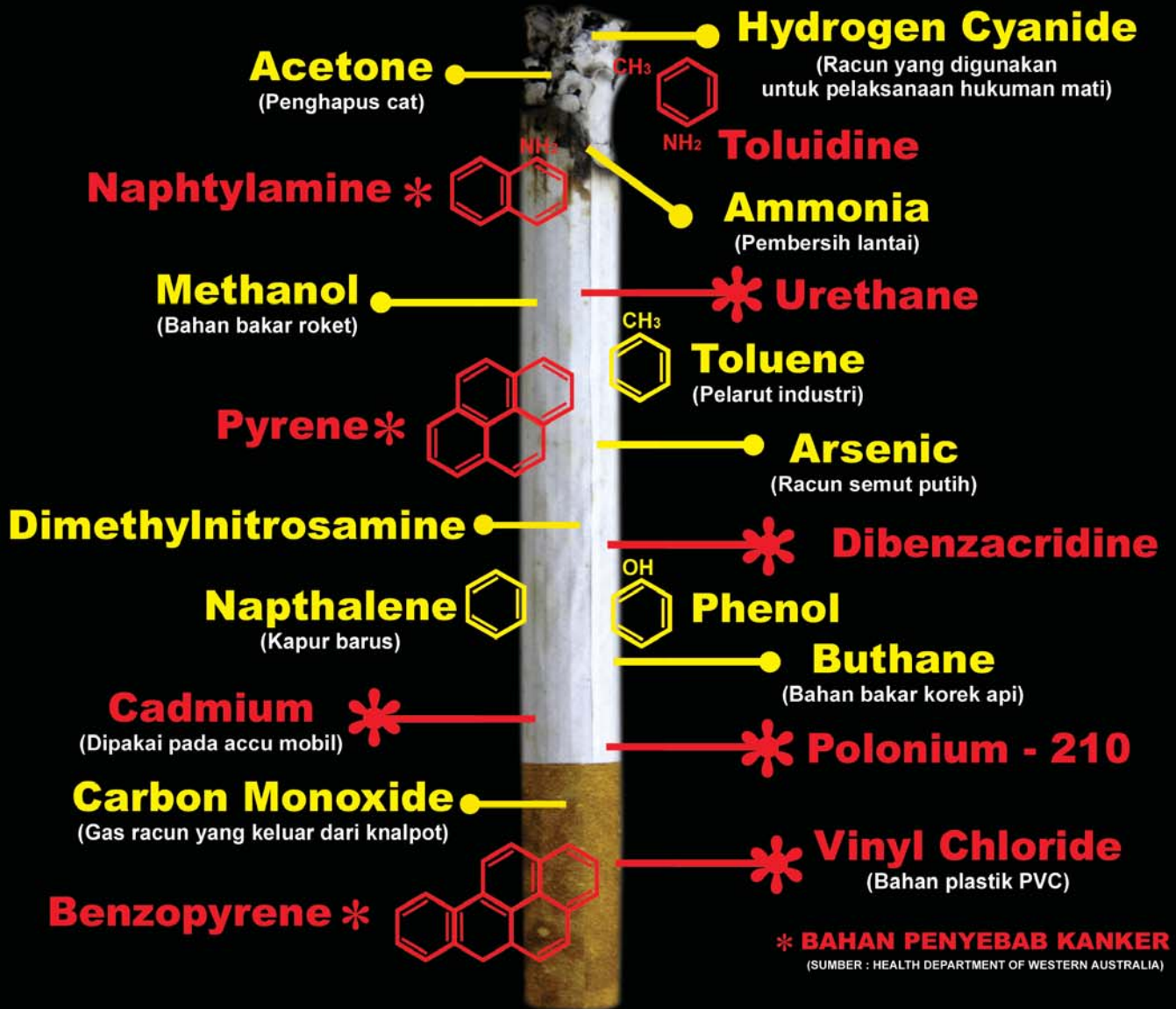
Kualitas mesin asal Jerman dengan merk Blancfog itu berbeda dengan mesin *fogging* yang dibeli dari dana PPMK dan Sudin Kesmas Jaksel. Padahal usia mesin itu, belum sampai satu tahun.

Bahkan, ketika Wakil Walikota Jaksel, Budiman Simarmata mencoba menggunakan mesin tersebut, mesin-mesin *fogging* itu justru mengeluarkan api, dan tak lama kemudian mati.

Untuk sementara, para petugas pengasapan menggunakan mesin *fogging* yang berasal dari Sudin Kesmas Jaksel dan milik masing-masing kelurahan. ■ RH

STOP MEROKOK

Pada Waktu Merokok Anda Mengisap Kurang Lebih 4000 Bahan Kimia,
Termasuk Racun-racun Ini:



Iklan Layanan Masyarakat ini disampaikan Oleh:

BERITA INDONESIA

dan



AL-ZAYTUN



PUSAT PENDIDIKAN,
PENGEMBANGAN BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN

Bekerja sama dengan:

YAYASAN JANTUNG SEHAT INDONESIA